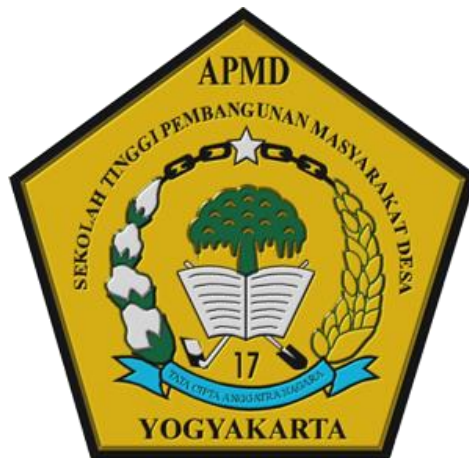


**KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA**

*(Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah)*

TESIS



disusun oleh :

INDRA WIBOWO

23610055

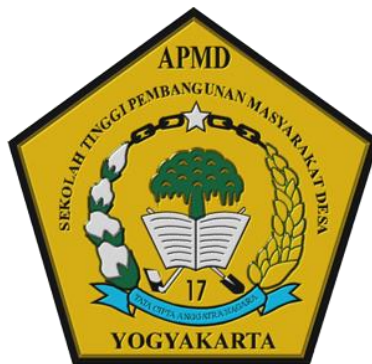
**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

**KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA**

*(Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah)*

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



diajukan oleh :

INDRA WIBOWO

23610055

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA

*(Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)*

Disusun Oleh

INDRA WIBOWO
23610055

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal 8 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

1. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

Penguji Samping I

3. Dr. Yuli Setyowati, S.IP., M.Si.

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,
Plt. Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.
NIDN: 0507106801

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN
EKSTREM DI INDONESIA

*(Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)*

Disusun oleh:

INDRA WIBOWO

23610055

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 10 Juli 2025

Susunan Tim Penguji

Nama

1. **Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.**

Ketua/Pembimbing

2. **Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.**

Penguji Samping I

3. **Dr. Yuli Setyowati, S.IP., M.Si.**

Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,

**Plt. Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.

NIDN: 0507106801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : INDRA WIBOWO

NIM : 23610055

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA (*Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,


INDRA WIBOWO

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika tidak dapat bermanfaat, jangan berbuat kerusakan”

Segala puji syukur atas nikmat Allah SWT atas selesainya penyusunan tesis ini, untuk itu penulis mempersembahkan kesyukuran ini kepada:

1. Orang Tua, Istri, Anak-anak tercinta;
2. Dra. Hj. Aida Lailawati, M.Si selaku promotor;
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas beasiswa tugas belajar.

KATA PENGANTAR

Bismillah hirrahman nirrahim, Alhamdulillah hirabbil ‘alamin,
Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan kesempatan-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai, serta sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada STPMD “APMD” beserta civitas akademiknya yang telah membantu hingga selesainya penulisan tesis ini, antara lain:

1. Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si;
2. Plt. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.;
3. Dosen Pembimbing tesis, Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos, M.Si;
4. Dosen Penguji I tesis, Dr. Sugiyanto, S.Sos, M.M.;
5. Dosen Penguji II tesis, Dr. Yuli Setyowati, S.IP, M.Si;
6. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Pengelola/karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Bapak Yohanes, Bapak Deni dan Mas Roman;
9. Para Dosen Pengajar matakuliah Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta;
10. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan.

Demikian, Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri, kalangan akademisi serta masyarakat luas.

Yogyakarta, 10 Juli 2025

Penulis,

Indra Wibowo

DAFTAR ISI

KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA (<i>Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</i>)	i
KOMPARASI MANAJEMEN STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA (<i>Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah</i>)	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
INTISARI	xxi
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur	22
C. Fokus Penelitian dan kerangka berpikir	33
D. Rumusan Masalah.	36
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	36
F. Kerangka Konseptual	37

1. Pemerintah dan pemerintah daerah	37
2. Strategi	38
3. Manajemen strategi	40
4. Kemiskinan	54
BAB II METODE PENELITIAN	67
A. Lokasi Penelitian	69
B. Sumber Data	69
C. Teknik Pengumpulan Data	71
D. Teknik Pemilihan Informan atau Narasumber.	73
E. Teknik Validasi Data	74
F. Teknik Analisis Data	75
BAB III GAMBARAN UMUM	78
A. Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	78
1. Kondisi umum daerah	78
2. Demografi	84
3. Aspek kesejahteraan masyarakat	88
4. Kondisi kemiskinan.....	96
B. Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.....	108
1. Kondisi umum daerah	108
2. Demografi	110
3. Aspek kesejahteraan masyarakat	114
4. Kondisi kemiskinan.....	120
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	137
A. Deskripsi Informan.....	137
B. Formulasi Strategi	140
1. Pernyataan Visi dan Misi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	140

2. Pengukuran eksternal	149
3. Pengukuran internal	169
4. Analisis dan pilihan strategi	193
5. Analisis komparasi formulasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem.....	201
C. Implementasi Strategi.....	210
1. Program-Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	210
2. Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	242
3. Prosedur program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	266
4. Analisis komparasi implementasi strategi penanganan kemiskinan ekstrem.....	275
D. Evaluasi Strategi.....	280
1. Evaluasi dasar-dasar strategi	281
2. Evaluasi kinerja penurunan angka kemiskinan ekstrem	286
3. Tindak lanjut perbaikan	291
4. Analisis komparasi evaluasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem.....	296
E. Kebaruan	301
BAB V PENUTUP.....	302
A. Kesimpulan	302
B. Saran.....	307
C. Keterbatasan Penelitian	308
DAFTAR PUSTAKA	309

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2019-2023.....	11
Tabel 1. 2	Angka kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2019-2023.....	17
Tabel 1. 3	Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2019-2023.....	19
Tabel 1. 4	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2020	20
Tabel 1. 5	Pengeluaran orang/hari kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional	63
Tabel 3. 1	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo	79
Tabel 3. 2	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepala Keluarga	86
Tabel 3. 3	Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022	87
Tabel 3. 4	Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022	88
Tabel 3. 5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022.....	90
Tabel 3. 6	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022 (%).....	92

Tabel 3. 7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2022) menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022	95
Tabel 3. 8 Penduduk Kabupaten Kulon Progo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022	103
Tabel 3. 9 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan tahun 2018-2022	104
Tabel 3. 10 Keadaan Produksi Beras	105
Tabel 3. 11 Ketersediaan Pangan Berdasarkan Jenis Bahan Makanan Untuk Konsumsi Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Per Kapita.....	106
Tabel 3. 12 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022	107
Tabel 3. 13 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan	108
Tabel 3. 14 Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman	110
Tabel 3. 15 Jumlah Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021	111
Tabel 3. 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021	112
Tabel 3. 17 Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021	113
Tabel 3. 18 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021- 2022	123
Tabel 3. 19 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	128

Tabel 3. 20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.....	131
Tabel 3. 21 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan tahun 2018-2022.....	133
Tabel 3. 22 Luas Panen Serelia di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020	134
Tabel 3. 23 Perkembangan Luas Panen Serelia (ton/ha) di Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020.....	134
Tabel 4. 1 Matriks SWOT Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kulon Progo.....	195
Tabel 4.2 Matriks SWOT Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat....	199
Tabel 4.3 Jumlah Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan mulai Tahun 2021 – 2024.....	195
Tabel 4. 4 Nama Program Pemerintah Daerah dalam Strategi Penghapusan Kemiskinan Esktrek	236
Tabel 4. 5 Data Jumlah Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 – 2024.....	222
Tabel 4. 6 Rencana dan Realisasi Belanja untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dan 2023	236
Tabel 4. 7 Rencana Belanja untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	237
Tabel 4. 8 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat Tahun 2023	2485
Tabel 4. 9 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi peningkatan pendapatan Tahun 2023	2499

Tabel 4.10 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat Tahun 2023.....	255
Tabel 4. 11Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi peningkatan pendapatan Tahun 2023	259
Tabel 4. 12 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan Tahun 2023.....	262
Tabel 4. 13 Data Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2024	287
Tabel 4. 14 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2024.....	288
Tabel 4. 15 Data penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	289
Tabel 4. 16 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 – 2024.....	291

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional ASEAN Tahun 2022	4
Gambar 1. 2	Jumlah dan presentase penduduk miskin, September 2012–Maret 2023	7
Gambar 1. 3	Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau, Maret 2023	7
Gambar 1. 4	Estimasi penduduk miskin ekstrem menurut Provinsi tahun 2021-2022	13
Gambar 1. 5	Kantong Kemiskinan Ekstrem Provinsi DIY	15
Gambar 1. 6	Kantong Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Tengah	16
Gambar 1. 7	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2019-2023	18
Gambar 1. 8	Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2023	21
Gambar 1. 9	Bagan Kerangka Berpikir Error! Bookmark not defined.	
Gambar 1. 10	Proses manajemen strategik Ward (1996)	42
Gambar 1. 11	Komponen Manajemen Strategik Hill dan Jones (1998).....	42
Gambar 1. 12	Faktor-faktor lingkungan eksternal dari Ireland, Hoskisson, dan Hitt (2011)	43
Gambar 1. 13	Model manajemen strategis komprehensif Fred R. David (1988).....	52
Gambar 1. 14	Model manajemen strategik Wheelen dan Hunger (2003).....	54
Gambar 3. 1	Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo	80

Gambar 3. 2	Peta Geostrategic Kabupaten Kulon Progo	82
Gambar 3. 3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (%).....	94
Gambar 3. 4	Grafik Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) Kab Kulon Progo Th 2018-2022	96
Gambar 3. 5	Grafik Tingkat Kemiskinan Kab. Kulon Progo, DIY, dan Indonesia Tahun 2018-2022	98
Gambar 3. 6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022	99
Gambar 3. 7	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022.....	100
Gambar 3. 8	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022.....	102
Gambar 3. 9	Peta Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.....	109
Gambar 3. 10	PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017 – 2021	115
Gambar 3. 11	Empat Besar PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kontribusi terbesar tahun 2021	115
Gambar 3. 12	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berbanding Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021	119
Gambar 3. 13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**	119
Gambar 3. 14	Persentase Penduduk Miskin (P0) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	121

Gambar 3. 15 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022	122
Gambar 3. 16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022	124
Gambar 3. 17 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022	125
Gambar 3. 18 Angka Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kotawaringin Barat Tahun 2022	126
Gambar 3. 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022	129
Gambar 3. 20 Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022	130
Gambar 3. 21 Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022.....	132
Gambar 4.1 Dokumentasi foto penyampaian komitmen penanganan kemiskinan oleh Pj. Bupati Kulon Progo Ir. Srie Nurkyatsiwi MMA setelah pelantikan di Bangsal Kepatihan, Rabu (22/5/2024)	143
Gambar 4. 2 Dokumentasi foto penyerahan dokumen Ranperda APBD Tahun 2025 kepada Ketua DPRD oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa di Aula DPRD (22/10/2024).....	148
Gambar 4. 3 Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kabupaten Kulon Progo (27/09/2021)	156
Gambar 4. 4 Pembangunan Ikon KSPN Borobudur Gerbang Klamong (19/03/2020).....	157
Gambar 4. 5 Kawasan Wisata Tumpeng Menoreh.....	158

Gambar 4. 6	Industri CPO PT. Citra Borneo Utama.....	160
Gambar 4. 7	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo (24/04/2024)	167
Gambar 4. 8	Kegiatan koordinasi dan pengawasan pembangunan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di kantor Bappedalitbang Kobar, Rabu (28/8/2024)	169
Gambar 4. 9	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Adikarta Sekretariat Daerah Kulon Progo pada Rabu (31/01/2024)	174
Gambar 4. 10	Sampul depan dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025.....	181
Gambar 4. 11	Sampul depan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dan 2025.....	189
Gambar 4. 12	Peluncuran Program Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang Didanai APBD Tahun 2025 (23/02/2025)	212
Gambar 4. 13	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahap ke II ini di salurkan melalui BUMDes Kalurahan salamrejo (15/02/2021).....	214
Gambar 4. 14	Proses produksi keripik kara benguk di dapur Mucuna Chips KDK Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, Sabtu (10/8/2024)	218
Gambar 4. 15	Penjabat Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, secara simbolis melakukan peletakan batu pertama sebagai awal pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Selasa (01/10/2024)	219

Gambar 4. 16 Dr. H. R. Agung Setyawan, ST, MSc, MM selaku Bupati Kulon Progo, menyerahkan bantuan Program Bedah Rumah yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kulon Progo kepada tujuh warga di Kalurahan Wates, Senin (19/05/2025)	220
Gambar 4. 17 Pendampingan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH di Bank Himbara Cabang Sungai Rangit dilakukan oleh Dinsos Kotawaringin Barat (25/01/2024)	233
Gambar 4. 18 Hj. Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat secara resmi memulai pelaksanaan Bazaar Begoyap yang digelar di kawasan Pangkalan Bun Park, Sabtu (19/3/2022)	241
Gambar 4. 19 Infografis APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023	243
Gambar 4. 20 Infografis APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024	245
Gambar 4. 21 Dokumentasi Foto bersama Warga Miskin Desa Salam Rejo.....	283
Gambar 4. 22 Dokumentasi Foto kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS di Yogyakarta	295

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Foto dan Transkrip Wawancara

Lampiran 2 : Rekapitulasi warga miskin ekstrem

Lampiran 3 : Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan

Lampiran 4 : Realisasi Fisik dan Keuangan Penanganan Kemiskinan
Ekstrem

Lampiran 5 : Dokumen pendukung lainnya

INTISARI

Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022. Menindaklanjuti amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diinstruksikan untuk menyusun dan melaksanakan berbagai strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan manajemen strategi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah, dengan studi kasus ganda di Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah. Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada konsep formulasi strategi dari Fred R. David dan Forest R. David (2017), serta konsep implementasi dan evaluasi strategi yang dikembangkan oleh Wheelen dan Hunger (2003). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap formulasi strategi, pernyataan visi dan misi mencerminkan komitmen pimpinan daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, serta aspek politik, hukum, dan pemerintahan berpengaruh terhadap perencanaan strategi. Secara internal, perencanaan masih menghadapi kendala berupa data warga miskin ekstrem yang belum valid dan belum terpadunya program serta kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisis dan pemilihan strategi masih lemah akibat belum validnya data, kurangnya integrasi program, lemahnya strategi peningkatan pendapatan, dan rendahnya akses pendidikan. Dalam implementasi strategi, kedua pemerintah daerah telah menjalankan program pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan, namun upaya peningkatan pendapatan masyarakat belum maksimal. Pengalokasian anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sudah dilakukan. Dalam pelaksanaan prosedur, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempermudah administrasi program RTLH, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memperluas cakupan pembangunan rumah baru.

Evaluasi strategi menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data masih belum optimal, perencanaan program masih lemah, dan penurunan angka kemiskinan ekstrem terjadi setiap tahun meskipun tidak signifikan. Namun demikian, kedua pemerintah daerah telah melakukan tindak lanjut perbaikan melalui perbaikan data, penyempurnaan program, dan pengembangan inovasi daerah.

Kata kunci : Komparasi, manajemen strategi, kemiskinan ekstrem

ABSTRACT

The government has set a target to eliminate extreme poverty to zero percent by 2024, as outlined in Presidential Instruction (Inpres) Number 4 of 2022. In response to this mandate, each regional government is instructed to develop and implement various strategies to accelerate the eradication of extreme poverty within their respective areas. This study aims to describe strategic management in the elimination of extreme poverty at the regional level, using a multiple-case study approach in Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta, and Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province. The analytical framework of this research refers to the concept of strategy formulation by Fred R. David and Forest R. David (2017), as well as the concepts of strategy implementation and evaluation developed by Wheelen and Hunger (2003). This research employs a descriptive qualitative method using a case study approach. Data collection techniques include in-depth interviews, document analysis, and direct observation. The results of the study indicate that, in the strategy formulation stage, the vision and mission statements reflect the commitment of regional leaders to the eradication of extreme poverty. External factors such as economic, social, cultural, demographic, environmental conditions, and aspects of politics, law, and governance influence strategic planning. Internally, planning still faces challenges such as invalid data on extremely poor residents and a lack of coordination among Regional Apparatus Organizations (OPD) in programs and activities. Strategy analysis and selection remain weak due to data inaccuracies, lack of program integration, insufficient strategies for income generation, and limited access to education. In the strategy implementation stage, both regional governments have carried out programs aimed at reducing expenditure burdens and alleviating poverty pockets, although efforts to increase household income have not been optimal. Budget allocations for extreme poverty eradication have been made. In terms of procedure implementation, the Kulon Progo Regency Government has simplified administrative processes for the RTLH (Uninhabitable Housing) program, while the Kotawaringin Barat Regency Government has expanded the scope of new housing construction. The strategy evaluation shows that the data

verification and validation processes are still suboptimal, program planning remains weak, and although the extreme poverty rate decreases annually, the decline is not significant. Nevertheless, both regional governments have taken corrective actions through data improvements, program refinement, and regional innovation development.

Keywords: *Comparison, strategic management, extreme poverty*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi problematika pemerintahan di seluruh dunia yang belum terselesaikan hingga kini. Berdasarkan data Oxford Poverty & Human Development Initiative dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam “*Global Multidimensional Poverty Index 2023*” dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi (*Multidimensional Poverty Index* atau MPI) yang memperhitungkan faktor selain pendapatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, menyebutkan bahwa jumlah warga miskin di dunia mencapai jumlah 1,1 (satu koma satu) miliar jiwa. Beberapa fakta menarik bahwa separuh dari total kemiskinan tersebut atau sekitar 566 (lima ratus enam puluh enam) juta adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun serta 84 % penduduk miskin dari jumlah tersebut berada di wilayah perdesaan (Oxford & UNDP, 2023).

Bahkan di negara yang berstatus negara maju seperti halnya Amerika Serikat. Menurut laporan “*Poverty in United States : 2022*” oleh United States Census Bureau menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Amerika Serikat sebesar 12,4 persen pada tahun 2022 atau 40,92 juta warga Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan melonjak dari tahun 2021 sebesar 7,4 persen (Bureau, 2022).

Sedangkan di China yang merupakan negara perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat juga menghadapi tantangan yang sama, akan tetapi Pemerintah China berhasil mengurangi angka kemiskinan sebagaimana Laporan World Bank (2022) yang berjudul

“Four Decades of Poverty Reduction in China” menyebutkan bahwa selama empat dekade terakhir, sekitar 800 juta penduduk Tiongkok berhasil keluar dari kondisi hidup dengan pendapatan kurang dari 1,90 dolar Amerika per hari., yang berarti hampir tiga perempat dari pengurangan kemiskinan global sejak tahun 1980. Berdasarkan standar kemiskinan Tiongkok saat ini, jumlah penduduk yang memperoleh pendapatan kurang dari 1,90 dolar Amerika per harinya, telah berkurang hampir 800 juta jiwa. penduduk miskin di Tiongkok turun 770 juta jiwa. Berdasarkan ukuran apa pun, kecepatan dan skala pengentasan kemiskinan di Tiongkok belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah (World Bank, 2022).

Kedua contoh negara tersebut diatas, menunjukkan bahwa kemiskinan adalah permasalahan global yang bagi sebagian negara seperti Amerika Serikat mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran didalam penanganan kemiskinan, sebagaimana diungkapkan oleh Matthew Desmond (2023) dalam bukunya *“Poverty, by America”* yang menyebutkan bahwa Negara Amerika lebih banyak kemiskinan dibandingkan negara demokrasi maju lainnya diantaranya penyebabnya adalah kesenjangan orang kaya dan miskin, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan minimnya kesempatan tenaga kerja (Desmond, 2023).

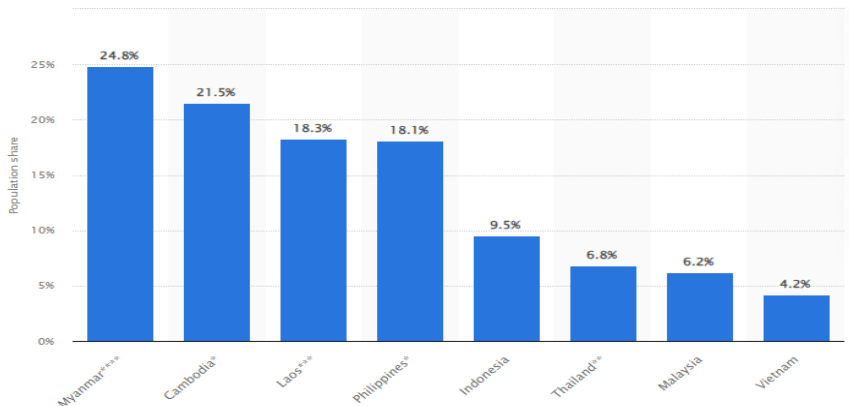
Di sisi lain Pemerintah China telah berhasil dalam penanganan kemiskinan. Menurut Laporan World Bank (2022) menyebutkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan di Tiongkok terutama bergantung pada dua pilar. Pilar pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat, didukung oleh transformasi ekonomi yang luas, yang memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat miskin dan meningkatkan

pendapatan rata-rata. Pilar kedua adalah kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang terus berlanjut, yang pada awalnya menyasar wilayah-wilayah yang secara geografis kurang beruntung dan kurangnya peluang ekonomi, namun kemudian berfokus pada rumah tangga miskin, terlepas dari lokasi mereka. Keberhasilan Tiongkok diuntungkan oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, yang merupakan kunci keberhasilan penerapan strategi pertumbuhan serta serangkaian kebijakan pengentasan kemiskinan yang terus berkembang. Tiongkok juga mendapat manfaat dari beberapa kondisi awal yang menguntungkan pada saat pembukaan diri, seperti tingkat sumber daya manusia yang relatif tinggi.

Berdasarkan realita kemiskinan kedua negara tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada level negara maju, kemiskinan masih merupakan masalah yang perlu dihadapi dengan strategi penanganan kemiskinan yang komprehensif, sebagaimana di Amerika Serikat, aspek pelayanan publik terutama kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar dari warga masyarakat kurang memadai sehingga sulit dijangkau oleh warga masyarakat miskin. Kemudian juga terkait penyerapan tenaga kerja atau tingkat pengangguran yang memerlukan kerjasama sektor publik dan perusahaan.

Disamping itu keberhasilan penanganan kemiskinan ditunjukkan oleh Pemerintah China, dimana melalui strategi peningkatan pendapatan rata-rata, fokus pengentasan kemiskinan berbasis daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pelayanan publik yang memadai, serta peningkatan sumberdaya manusia di China yang masif, sehingga negara ini menjadi salah satu contoh pengentasan kemiskinan.

Kondisi terbalik penanganan kemiskinan diantara kedua negara maju tersebut, menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang, tidak terkecuali di level regional ASEAN. Berdasarkan data “*population share living below national poverty line ASEAN 2022, by country*” menyebutkan bahwa Myanmar menempati posisi pertama dengan angka kemiskinan yang tinggi sebesar 24,8 %, Kamboja sebesar 21,5 %, Laos sebesar 18,3 %, Filipina sebesar 18,1 %, Indonesia sebesar 9,5 %, Thailand sebesar 6,8 %, Malaysia sebesar 6,2 %, dan Vietnam sebesar 4,2 %.



Gambar 1. 1 Persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional ASEAN Tahun 2022

Sumber : Statista.com (2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas Negara di ASEAN masih menghadapi persoalan kemiskinan dengan angka kemiskinan tertinggi ditunjukkan oleh Myanmar. Menurut Duncan Boughton (2023) dalam artikel “*Double jeopardy : COVID-19, coup d’etat, and poverty in Myanmar*”, penyebab utama kemiskinan tinggi di Myanmar disebabkan oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada bulan Februari 2021. Kedua, disebabkan

oleh pandemi COVID-19. Dan ketiga, melonjaknya harga bahan bakar minyak, harga pupuk dan makanan.

Kamboja sebagai negara dengan angka kemiskinan tinggi kedua di ASEAN sebesar 21,5 % memiliki kesamaan penyebab kemiskinan dengan Myanmar kecuali dalam hal kudeta militer. Seperti yang diungkapkan oleh Marvin Vanny (2024) dalam artikel *“Policy For Attacking Poverty Case : Cambodia”* menyebutkan bahwa kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang signifikan masih terjadi antara masyarakat kelas bawah dan atas, sementara pandemi COVID-19 telah menghancurkan Kamboja dan mendorong banyak orang ke dalam kemiskinan. Selain itu, keluarga pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tantangan dalam mengakses layanan dan pekerjaan, sehingga memerlukan fokus pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga publik untuk pengelolaan sumber daya efektif dan layanan bertanggung jawab.

Kedua negara ASEAN yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut diatas, memiliki penyebab kemiskinan yang hampir sama yakni dampak dari pandemi COVID-19 yang menerapkan pembatasan aktivitas terutama aktivitas ekonomi, kurang memadainya pelayanan publik terutama kesehatan dan pendidikan, serta kesenjangan antara yang kaya dan miskin akibat liberalisasi ekonomi menjadi faktor utama penyebab kemiskinan.

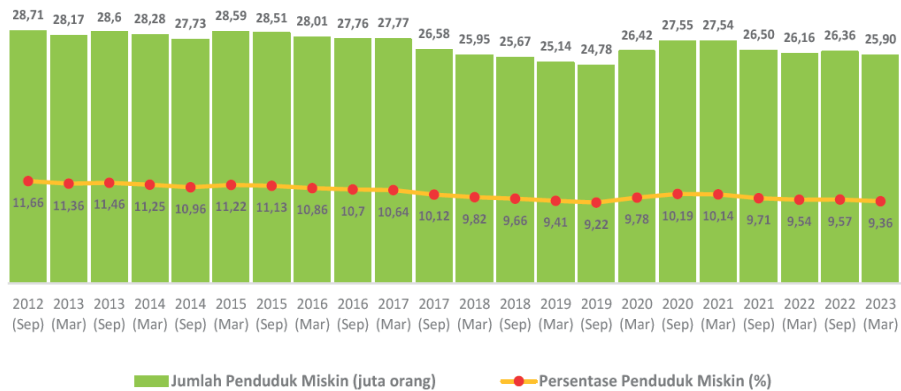
Diantara seluruh negara ASEAN tersebut, Vietnam menjadi negara dengan angka kemiskinan yang cukup rendah yakni sebesar 4,2 %. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemiskinan di Vietnam diungkapkan oleh Huong Thi Thanh Tran (2022) dalam artikel *“The effect of financial inclusion on multidimensional poverty: the case*

of Vietnam”, yang menyebutkan bahwa inklusi keuangan di Vietnam dapat mengurangi kemiskinan multidimensi. Secara khusus, rumah tangga yang memiliki rekening bank, menabung di bank, menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau berinvestasi pada saham atau obligasi mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk jatuh ke dalam kemiskinan multidimensi. Kemudian juga faktor pertumbuhan ekonomi dan pendidikan turut mempengaruhi pengurangan kemiskinan di Vietnam.

Beberapa potret kemiskinan negara ASEAN tersebut diatas, menunjukkan bahwa di tingkat regional ASEAN memiliki permasalahannya masing-masing terkait dengan penanganan kemiskinan. Negara ASEAN seperti Vietnam dapat dikatakan berhasil menekan angka kemiskinan, tetapi Myanmar dan Filipina masih dihadapkan pada kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang menghambat penanganan kemiskinan. Lantas bagaimana dengan kemiskinan di Negara Indonesia?.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan profil kemiskinan di Indonesia, Maret 2023, menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin sebesar 9,36 % atau 25,90 juta jiwa. Angka kemiskinan ini turun secara perlahan apabila dilihat dari mewabahnya COVID-19 yang menaikkan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 10,19 % atau 27,55 juta jiwa kemudian di tahun 2021 sebesar 9,71 % atau 26,5 juta jiwa, tahun 2022 turun menjadi 9,57 % atau 26,36 juta jiwa dan di tahun 2023 periode maret turun menjadi 9,36 % atau 25,90 juta jiwa. Rincian sebaran kemiskinan lebih banyak di daerah perdesaan sebesar 12,2 % atau 14,16 juta jiwa atau dibanding perkotaan sebesar 7,29 % atau 11,74 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, mencapai sekitar 13,62 juta jiwa,

sedangkan Pulau Kalimantan mencatat angka terendah dengan sekitar 970 ribu jiwa.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Gambar 1. 2 Jumlah dan presentase penduduk miskin, September 2012–Maret 2023

Sumber : BPS (2023)

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	7,97	10,33	9,27	2,20	3,47	5,67
Jawa	7,40	11,81	8,79	7,85	5,77	13,62
Bali dan Nusa Tenggara	8,50	17,73	13,29	0,65	1,44	2,09
Kalimantan	4,45	6,88	5,67	0,38	0,59	0,97
Sulawesi	5,87	13,16	10,08	0,50	1,54	2,04
Maluku dan Papua	6,13	26,73	19,68	0,16	1,35	1,51
Indonesia	7,29	12,22	9,36	11,74	14,16	25,90

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 1. 3 Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau, Maret 2023

Sumber : BPS (2023)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), penurunan angka kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah aspek. Pertama, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang pada

Februari 2023 berada di angka 5,45 persen, menurun dari 5,86 persen pada Agustus 2022. Kedua, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan hingga mencapai 110,85 pada Maret 2023, dibandingkan dengan 106,82 pada September tahun sebelumnya. Ketiga, laju inflasi menurun secara signifikan, di mana dalam periode September 2022 hingga Maret 2023 tercatat hanya 1,32 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan inflasi enam bulan sebelumnya yang mencapai 3,60 persen. Keempat, konsumsi rumah tangga menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,21 persen pada kuartal pertama 2023 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2022. Selain itu, distribusi bantuan sosial yang lebih optimal juga turut memberikan dampak positif, tercermin dari realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai 89,3 persen dan penyaluran bantuan sembako tahap pertama yang telah terealisasi sebesar 86,5 persen.

Pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari berkurangnya pengangguran terbuka, meningkatnya pendapatan petani, inflasi yang terkendali, konsumsi rumah tangga yang meningkat, disertai dengan realisasi bansos PKH dan bansos Sembako yang cukup tinggi. Apabila dianalisis pengaruh positif tersebut diatas adalah pengaruh yang bersifat output dinamis artinya diperlukan peranan atau strategi pemerintah yang berkelanjutan dalam rangka penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mengambil berbagai langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup: pertama, penyaluran berbagai jenis bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua, peningkatan akses terhadap layanan dasar melalui implementasi program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jaringan jalan tol. Keempat, alokasi Dana Desa yang disertai dengan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat.

Di tengah pelaksanaan program penanganan kemiskinan tersebut diatas, muncul istilah kemiskinan ekstrem yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo agar diselesaikan dengan target 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Hal ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang memuat beberapa poin diantaranya pertama, sinergi dan keterpaduan antar instansi. Kedua, melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan yang tepat dan terarah melalui strategi kebijakan yang mencakup pengurangan beban biaya hidup masyarakat, peningkatan sumber pendapatan warga, serta pengurangan wilayah-wilayah dengan konsentrasi kemiskinan tinggi.

Standar kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia dalam “*overview poverty*” tahun 2024 adalah orang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dollar per hari atau sekitar Rp. 34.900,- naik dari yang sebelumnya sebesar 1,9 dollar. Akibat pandemi COVID-19, pada tahun 2022 total 712 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan ekstrem, meningkat 23 juta orang dari tahun 2019. Kemiskinan ekstrem masih terkonsentrasi di sebagian wilayah Afrika Sub-Sahara, wilayah rentan dan terkena dampak konflik, serta wilayah pedesaan.

Berdasarkan definisi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), kemiskinan ekstrem merupakan situasi di mana individu atau kelompok tidak sanggup mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih, sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, pendidikan, akses informasi, penghasilan, serta layanan sosial. Seseorang digolongkan dalam kategori miskin ekstrem apabila pengeluarannya per hari berada di bawah ambang batas USD 1,9, sesuai dengan standar *Purchasing Power Parity* (PPP). PPP sendiri merupakan acuan internasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan absolut secara konsisten antarnegara dan lintas waktu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, seseorang digolongkan sebagai miskin ekstrem apabila pengeluarannya per hari kurang dari Rp 10.739, atau setara dengan Rp 322.170 per bulan. Dengan demikian, apabila sebuah keluarga terdiri dari empat anggota misalnya ayah, ibu, dan dua anak maka keluarga tersebut tergolong miskin ekstrem apabila total pengeluaran bulanannya tidak melebihi Rp 1.288.680.

Adapun data kemiskinan ekstrem di Indonesia menurut data BPS dan Bank Dunia dalam “Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024” sebagaimana tabel dibawah menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem mengalami penurunan sejak tahun 2012 yang berjumlah 28,50 juta jiwa sampai dengan tahun 2019 yang mencapai jumlah 9,89 juta jiwa. Akan tetapi, kenaikan jumlah penduduk miskin ekstrem terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
2019-2023

Tahun	Kemiskinan esktrim			Kemiskinan BPS			Konversi GK Nasional ke US\$ PPP
	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan Konversi dari US\$1,9 PPP)	% Penduduk Miskin (Po)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)	% Penduduk Miskin (Po)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	
2012	238.288,5	11,7	28,50	267.408	11,96	29,13	2,13
2013	249.910,8	9,4	23,23	289.041	11,36	29,07	2,20
2014	261.647,7	7,9	19,86	318.514	11,25	28,28	2,31
2015	284.184,9	7,2	18,35	342.541	11,22	28,59	2,34
2016	285.184,9	6,5	16,76	364.527	10,86	28,01	2,44
2017	305.720,2	5,7	14,88	374.478	10,64	27,77	2,33
2018	316.736,1	4,7	12,42	401.220	9,82	25,95	2,41
2019	323.291,0	3,7	9,89	425.250	9,41	25,14	2,49
2020	345.291,6	3,9	10,54	454.652	9,78	26,42	2,50
2021	358.232,6	4,0	10,86	472.525	10,14	27,54	2,51

Sumber : BPS dan Bank Dunia, berbagai tahun diolah (2022)

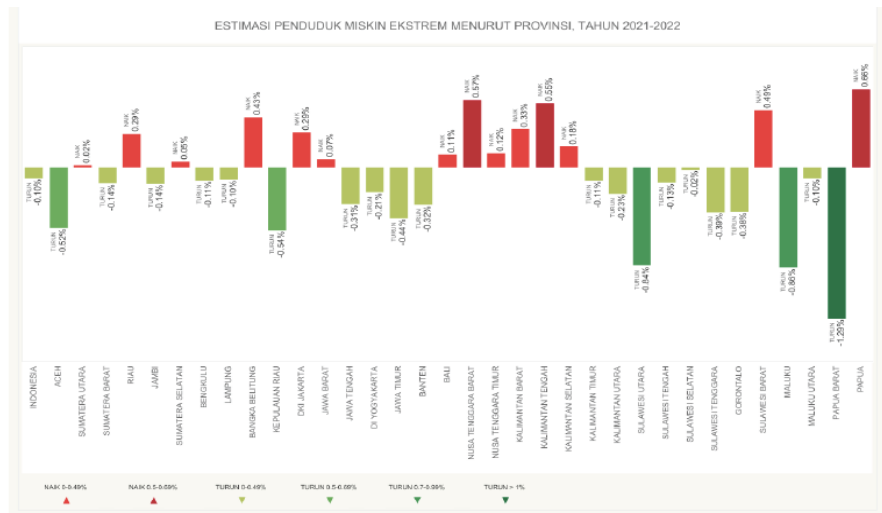
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengadopsi pendekatan kebijakan kolaboratif. Pendekatan ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yang mengatur secara rinci peran, tugas, serta kewenangan dari setiap Kementerian, Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran, terintegrasi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Wilayah-wilayah prioritas tersebut ditentukan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 25 Tahun 2022, yang mencantumkan sebanyak 212 kabupaten/kota sebagai lokasi prioritas pada tahun 2022, serta mencakup perluasan wilayah prioritas untuk periode 2023 hingga 2024.

Untuk memastikan implementasi strategi kebijakan sesuai dengan arahan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan tepat sasaran di wilayah-wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem,

diterbitkanlah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022. Keputusan ini mengatur mengenai sumber serta jenis data yang dimanfaatkan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data yang digunakan bersumber dari hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN, termasuk hasil pemutakhiran datanya, yang telah dikategorikan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis data ini mencakup informasi detail tentang keluarga dan individu, termasuk identitas nama dan alamat secara lengkap (*by name by address*). Informasi tersebut kemudian disebut sebagai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan. Pada Maret 2023, persentase kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,12%, menunjukkan penurunan sebesar 0,92 persen poin dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 2,04%. Meski demikian, dalam periode 2021 hingga 2022, terdapat lonjakan jumlah penduduk miskin ekstrem yang cukup tinggi di beberapa provinsi, terutama di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Tengah. Sebaliknya, provinsi yang mencatat penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem paling besar antara lain Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Di sisi lain, sejumlah provinsi masih memiliki tingkat kemiskinan yang melampaui rata-rata nasional, yakni: Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.



Gambar 1. 4 Estimasi penduduk miskin ekstrem menurut Provinsi tahun 2021-2022

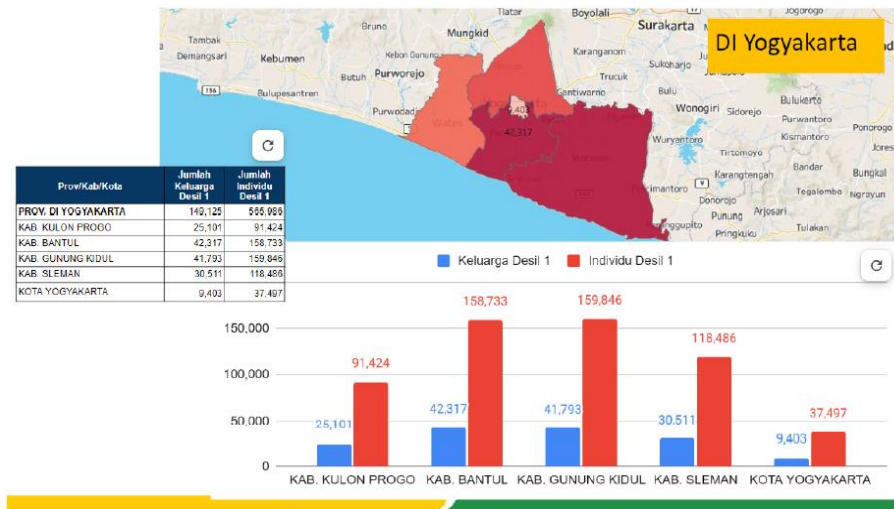
Sumber : P3KE (2023) dalam Peta Kemiskinan Ekstrem Nasional BAZNAS (2024)

Strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah berdampak pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa daerah yang mengalami stagnasi bahkan peningkatan angka kemiskinan ekstrem misalnya Provinsi Kalimantan Tengah naik sebesar 0,55 persen. Di sisi lain ada beberapa daerah yang mengalami penurunan angka kemiskinan ekstrem misalnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar -0,21 persen.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 mengenai penghapusan kemiskinan ekstrem, peran utama berada di tangan Kepala Daerah—baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota—sebagai pihak yang paling bertanggung jawab di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah, khususnya antara daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta adanya target nasional untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024, maka penelitian ini difokuskan pada komparasi mengenai manajemen strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun lokasi yang dipilih adalah Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai situasi serta penanganan kemiskinan di Indonesia, dengan menyoroti perbedaan manajemen strategi antara wilayah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

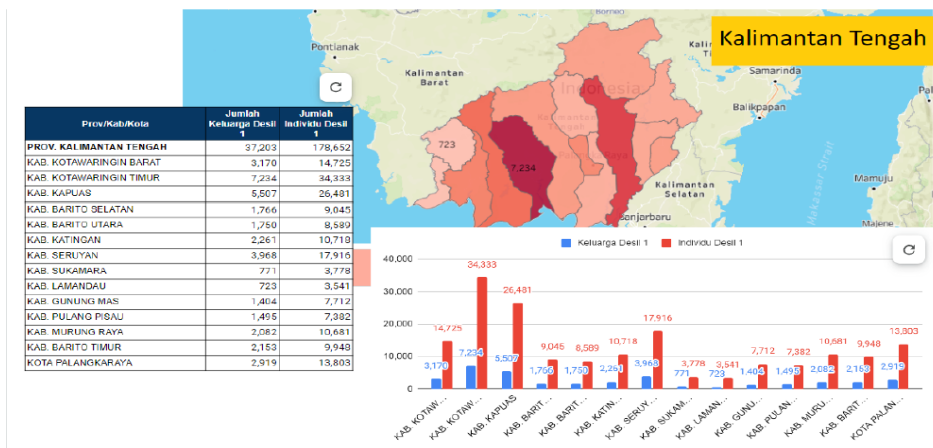
Mengacu pada data P3KE (2023) dalam dokumen “Peta Kemiskinan Ekstrem Nasional 2024” yang dirilis oleh BAZNAS, wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai oleh konsentrasi tertinggi keluarga atau individu yang tergolong dalam desil 1. Secara total, terdapat 1.192.953 keluarga atau sekitar 5.079.790 jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 di wilayah ini. Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman tercatat sebagai daerah dengan populasi kemiskinan ekstrem tertinggi. Sebaliknya, Kota Yogyakarta serta Kabupaten Kulon Progo menempati posisi terendah dalam hal jumlah penduduk yang tergolong miskin ekstrem.



Gambar 1. 5 Kantong Kemiskinan Ekstrem Provinsi DIY

Sumber : P3KE (2023) dalam BAZNAS (2024)

Kantong kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data P3KE (2023) disebutkan bahwa jumlah keluarga desil 1 di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 37.203 keluarga atau 178.652 jiwa. Wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Seruyan. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kemiskinan ekstrem paling sedikit adalah Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Gunung Mas.



Gambar 1. 6 Kantong Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : P3KE (2023) dalam BAZNAS (2024)

Informasi atau data awal dari BPS Kabupaten Kulonprogo dalam “Ringkasan Eksekutif Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023” sebagaimana tabel menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari presentase penduduk miskin pada tahun 2019-2023 adalah yang paling tinggi di Provinsi DIY dengan presentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 15,64 persen. Persentase ini terus menurun sejak tahun 2021 sebesar 18,38 dan 2022 sebesar 16,39 persen.

Tabel 1. 2 Angka kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
2019-2023

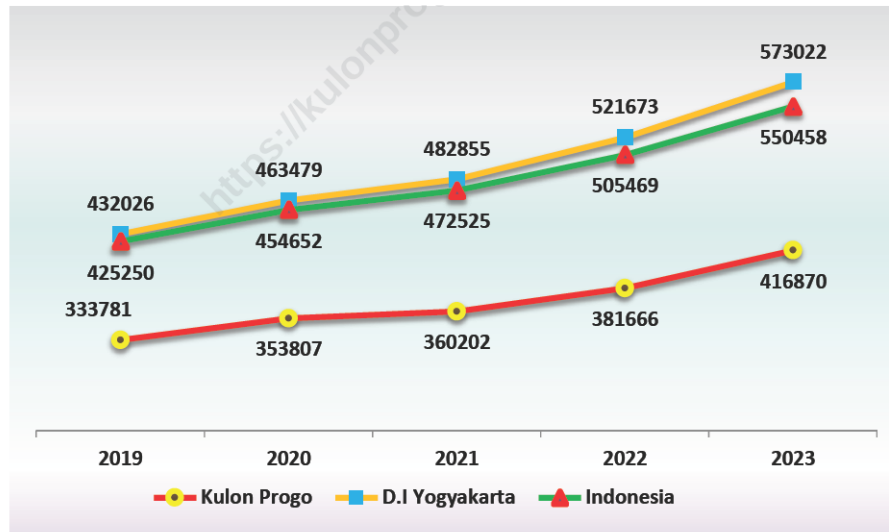
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
01 Kulon Progo	17,39	18,01	18,38	16,39	15,64
02 Bantul	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
03 Gunung Kidul	16,61	17,07	17,69	15,86	15,60
04 Sleman	7,41	8,12	8,64	7,74	7,52
71 Yogyakarta	6,84	7,27	7,69	6,62	6,49
D.I Yogyakarta	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04

Sumber : BPS (2023)

Di sisi lain, masih berdasarkan referensi yang sama, dijelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menetapkan tingkat kemiskinan. Pendekatan ini mengacu pada standar minimum pengeluaran per kapita setiap bulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan esensial, baik makanan maupun non-makanan. Batas minimum tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan (GK), yang menjadi acuan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak.

Garis kemiskinan di Kulon Progo terus mengalami peningkatan selama periode Maret 2019–2023. Dibandingkan dengan garis kemiskinan D.I Yogyakarta dan Indonesia, garis kemiskinan Kulon Progo selalu berada di bawah keduanya dalam kurun waktu Maret 2019–2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Kulon Progo masih lebih rendah daripada tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2023, garis kemiskinan Kulon Progo sebesar Rp 416.870,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022 yang sebesar Rp.

381.666,-, angka ini mengalami peningkatan sebesar 9,22 persen. Untuk tingkat provinsi DI Yogyakarta dan Indonesia, garis kemiskinan juga mempunyai tren selalu meningkat selama periode Maret 2019-2023. Garis kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta pada Maret 2023 sebesar Rp 573.022,- atau meningkat sebanyak 9,84 persen dari kondisi Maret 2022 sebesar Rp. 521.673,-. Untuk kondisi Indonesia, garis kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 550.458,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,90 persen dibandingkan Maret 2022 sebesar Rp. 505.469,-.



Gambar 1. 7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo 2019-2023

Sumber : BPS (2023)

Tabel 1. 3 Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
01 Kulon Progo	74,62	78,06	81,14	73,21	70,74
02 Bantul	131,15	138,66	146,98	130,13	128,51
03 Gunung Kidul	123,08	127,61	135,33	122,82	122,24
04 Sleman	90,17	99,78	108,93	98,92	97,50
71 Yogyakarta	29,45	31,62	34,07	29,68	29,48
D.I Yogyakarta	448,47	475,72	506,45	454,76	448,47

Sumber : BPS (2023)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo sempat mengalami lonjakan selama pandemi Covid-19. Pada rentang waktu Maret 2019 hingga Maret 2020, tercatat adanya kenaikan lebih dari 3.000 orang miskin, yakni dari 74,62 ribu jiwa menjadi 78,06 ribu jiwa. Kondisi ini terus memburuk hingga periode Maret 2020–2021 akibat dampak pandemi. Namun, memasuki tahun 2023, perekonomian secara umum mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Fenomena serupa kembali terjadi pada rentang waktu Maret 2020 hingga 2021, di mana jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan lebih dari tiga ribu orang, mencapai 81,14 ribu jiwa pada Maret 2021. Namun, tren ini berbalik pada periode Maret 2021 hingga 2022, dengan penurunan signifikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo, yaitu berkurang hampir delapan ribu jiwa menjadi 73,21 ribu jiwa. Pada tahun 2023, jumlah tersebut kembali menyusut sekitar tiga

ribu jiwa menjadi 70,74 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Kulon Progo tercatat sebesar 3,31 persen atau sekitar 14.266 jiwa pada tahun 2022, mengalami penurunan dari 3,44 persen atau 15.184 jiwa pada tahun sebelumnya (turun sebesar 0,13 persen).

Selain itu, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kotawaringin Barat yang termuat dalam dokumen *“Profil Kemiskinan dan Pembangunan Manusia Kotawaringin Barat Tahun 2020”*, disebutkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah ini tergolong rendah, yakni hanya 3,59 persen, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, apabila dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin, Kabupaten Kotawaringin Barat justru berada di posisi keempat tertinggi dengan total sekitar 11,46 ribu jiwa.

Tabel 1. 4 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)	P0	P1	P2	GARIS KEMISKINAN (RP/KAP/BULAN)
1	Kotawaringin Barat	11,46	3,59	0,40	0,08	397.883
2	Kotawaringin Timur	26,64	5,62	0,87	0,16	446.039
3	Kapuas	18,17	5,04	0,78	0,19	332.999
4	Barito Selatan	6,12	4,45	0,89	0,26	433.787
5	Barito Utara	6,78	5,17	0,67	0,13	504.430
6	Sukamara	2,13	3,23	0,30	0,05	522.601
7	Lamandau	2,61	3,09	0,36	0,09	479.514
8	Seruyan	14,53	6,85	0,87	0,16	504.264
9	Katingan	8,23	4,79	0,51	0,09	474.056
10	Pulang Pisau	5,21	4,09	0,73	0,20	395.989
11	Gunung Mas	5,78	4,75	0,75	0,21	438.881
12	Barito Timur	7,88	6,09	0,55	0,08	517.183
13	Murung Raya	7,18	5,85	0,87	0,24	492.693
14	Palangka Raya	10,23	3,44	0,44	0,08	435.008
Kalimantan Tengah		132,94	4,82	0,80	0,20	485.635

Sumber : BPS (2021)

Berdasarkan data P3KE sebagaimana gambar angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk yang paling rendah dari 14 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar

0,5 persen pada tahun 2023 atau sekitar 960 jiwa warga masyarakat miskin ekstrem.



Gambar 1. 8 Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2023

Sumber : LPJ Triwulan II Pj. Bupati Kotawaringin Barat (2023)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua Pemerintah Daerah tersebut diatas dalam menangani permasalahan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, akan tetapi warga miskin ekstrem masih dapat dihapuskan sepenuhnya. Oleh karena itu, sangatlah menarik bagaimana melihat manajemen strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan kemudian dilakukan komparasi baik penyebab kemiskinan maupun strategi yang dijalankan.

B. Kajian Literatur

Menurut Karsadi (2022) tinjauan atau kajian pustaka dalam proses penelitian merupakan tahapan penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Melalui tinjauan atau kajian pustaka seorang peneliti akan memperoleh informasi awal mengenai penelitian-penelitian yang serupa yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan tinjauan atau kajian pustaka, maka peneliti dapat juga memperoleh data, baik secara umum maupun spesifik mengenai permasalahan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya (Karsadi, 2022).

Dalam penelitian ini kajian literatur didapatkan dari beberapa dari beberapa sumber yang terkait dengan kemiskinan dan manajemen strategi penanganan kemiskinan diantaranya:

1. Nurul Bariyah (2022) judul “Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju *Sustainable Development Goals*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diolah dengan metode statistika. Hasil penelitian ini menyebutkan ada pengaruh dari tingkat pendidikan dan kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan. (Bariyah, 2022). Penelitian diatas menarik untuk dicermati dikarenakan hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi, belum terlalu mendalam karena hanya menganalisis angka statistik tingkat pendidikan dan kesehatan, tanpa memperdalam penyebab kurangnya tingkat pendidikan dan kesehatan dan upaya pemerintah untuk menangani hal tersebut serta masih terbatas sebelum pandemi COVID-19.

2. Fahmi Idris dkk (2023) judul “Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan landasan teori efektivitas menurut Sutrisno (2013), yang mencakup lima unsur utama: (1) pemahaman terhadap program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) pencapaian target, serta (5) terjadinya perubahan yang nyata. Dari kelima indikator tersebut, empat telah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat hambatan pada aspek ketepatan sasaran (Idris et al., 2023). Topik ini menjadi penting untuk ditelaah karena Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menekankan pentingnya upaya pengurangan wilayah kantong kemiskinan. Salah satu indikator kemiskinan adalah keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga penyediaan Rumah Layak Huni (RTH) dipandang sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Menariknya, hasil penelitian mengungkap bahwa sebagian penerima program RTH tidak merasakan perbaikan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan studi lanjutan terkait strategi bantuan pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
3. Willya Achmad dkk (2023) judul “*Analysis of the Factors Affecting Poverty in Padasari Village*”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ganda dan linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam dapat berdampak buruk pada tingkat kemiskinan, sumber daya manusia mempengaruhi kualitas dan kuantitas angkatan kerja suatu daerah, dan sumber

daya manusia yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan pelatihan. akan sulit bagi mereka untuk memperoleh kesejahteraan (Achmad et al., 2023). Penelitian ini secara khusus mengungkap penyebab kemiskinan yang terjadi di desa Padasari Kabupaten Sumedang, bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan sebagai dasar formulasi strategi.

4. Nining Ailiyah (2023) judul “Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo”. Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap meningkatnya angka kemiskinan yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 di Desa Seboro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengkaji kontribusi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam memperbaiki kondisi ekonomi warga setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi BPNT di Desa Seboro telah berjalan secara tepat sasaran dan sesuai jadwal. Program ini dinilai cukup efektif karena mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengembalikan tingkat kesejahteraan ekonomi seperti sebelum terjadinya pandemi (Ailiyah et al., 2023). Penelitian diatas spesifik meneliti mengenai Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut

Inpres No. 4 Tahun 2022, salah satu strategi penghapusan kemiskinan ekstrem adalah pengurangan beban biaya keluarga, sehingga warga masyarakat miskin perlu dibantu dengan bantuan sembako yang diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran terhadap kebutuhan bahan pokok. Akan tetapi, strategi ini hanya bersifat sementara dan belum cukup untuk menurunkan angka kemiskinan.

5. Siti Rohima (2020) judul “*Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengurangan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, dengan mengevaluasi pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang digunakan mencakup Pemetaan Kemiskinan dengan pendekatan Tipologi Klassen serta Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil uji-t regresi, ditemukan bahwa Belanja Bantuan Sosial dan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, sedangkan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Sementara itu, hasil uji-F mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan memengaruhi pengurangan kemiskinan. Namun, alokasi Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal dinilai belum tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penganggaran yang lebih terarah, khususnya dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal, agar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Rohima et al., 2020). Secara keseluruhan, studi kuantitatif ini menunjukkan bahwa

perencanaan APBD yang berbasis pada efektivitas dan ketepatan sasaran dalam alokasi anggaran dapat berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah melalui formulasi strategi dan implementasi strategi dimana anggaran berupa bantuan sosial dapat mereduksi kemiskinan.

6. Musafran Harahap (2023) dengan judul “Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Medan serta mengevaluasi intervensi dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanganinya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, menggunakan referensi dari jurnal ilmiah dan data yang tersedia melalui aplikasi SEPPAKAT milik Bappenas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pengurangan kemiskinan memerlukan sinergi antar kebijakan serta program pembangunan lintas sektor. Strategi paling efektif dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan merancang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) secara terstruktur, melakukan intervensi berdasarkan akar permasalahan utama, serta merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendorong kemiskinan di Kota Medan adalah pembangunan yang tidak merata (Harahap, 2023). Penelitian tersebut diatas menyajikan hasil dari studi data sekunder atau studi literatur yang menunjukkan bahwa berdasarkan data-data yang ada upaya pemerintah daerah masih belum maksimal dalam penanganan

kemiskinan. Penelitian tersebut belum secara mendalam menjelaskan apa penyebab upaya pemerintah belum maksimal dan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mengatasinya.

7. Adi Wisnutama (2022) dengan judul “Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan dalam menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun pada tahun 2022. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa indikator utama kemiskinan ekstrem menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Meskipun persentase penduduk yang tergolong miskin ekstrem terlihat kecil, jumlah absolutnya tetap signifikan. Pemerintah Kabupaten Madiun telah merancang berbagai program pembangunan yang merata di seluruh kecamatan, mencakup sektor pendidikan, layanan kesehatan, pertanian, kegiatan sosial dan keagamaan, pemberdayaan perempuan dan anak, ketenagakerjaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat (Wisnutama et al., 2023). Penelitian tersebut dapat menjadi bahan menarik tentang bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara melihat dari pelaksanaan program yang sudah berjalan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini implementasi strategi.
8. Debby Intan Suci Rahmawati et.al., (2022) dengan judul “Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pertama, perumusan strategi oleh Dinas

Sosial Kabupaten Karawang belum terlaksana secara maksimal dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang bersifat jangka panjang serta ketidakmampuan dalam mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh. Kedua, pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari distribusi bantuan sosial yang belum merata, meskipun data penerima bantuan sudah tersedia. Ketiga, dalam aspek evaluasi strategi, Dinas Sosial belum menunjukkan upaya yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Hal ini terlihat dari tidak adanya langkah korektif maupun proses evaluasi ulang terhadap permasalahan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut (Intan Suci Rahmawati et al., 2022). Penelitian tersebut menarik untuk dicermati terkait dengan peranan Dinas Sosial didalam menanggulangi kemiskinan ekstrem yang menyatakan bahwa mulai tahap formulasi, implementasi dan evaluasi strategi yang dilaksanakan belum optimal. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Inpres No. 4 Tahun 2022 bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem menggunakan pendekatan kolaboratif atau kerjasama diantara instansi terkait, sehingga tidak hanya Dinas Sosial yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

9. Yuanzhi Guo dkk (2022) judul *“Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province”*. Penelitian ini menyelidiki konotasi pengentasan kemiskinan yang ditargetkan dan mempertimbangkan kasus Fuping di Provinsi Hebei untuk mengeksplorasi praktik

pengentasan kemiskinan yang ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di pedesaan Tiongkok dapat dibagi menjadi enam tahap, dan inti dari pengentasan kemiskinan yang ditargetkan terletak pada membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mencapai hasil yang nyata dengan mengidentifikasi dan membantu rumah tangga yang dilanda kemiskinan secara akurat, mengelola objek dan tindakan secara akurat, dan secara akurat menilai efektivitas pengentasan kemiskinan. Praktik pengentasan kemiskinan yang ditargetkan di wilayah Fuping terutama melibatkan pembangunan industri, bantuan pemukiman kembali, pembangunan keuangan dan pendidikan, bersama dengan keamanan medis dan konsolidasi tanah, yang semuanya membangun mekanisme endogen dan berkelanjutan yang memungkinkan pembangunan regional. Studi ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan yang ditargetkan merupakan sebuah strategi inovatif yang cocok untuk mengatasi dampak penyebaran kemiskinan dan membantu pembuat kebijakan merumuskan langkah-langkah yang rinci dan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan (Guo et al., 2022). Alasan kenapa peneliti mengambil artikel internasional dengan studi kasus di China adalah dikarenakan keberhasilan Pemerintah China didalam menurunkan angka kemiskinan. Contohnya pada penelitian diatas yang menyebutkan bahwa strategi pemerintah China dengan menargetkan rumah tangga miskin berhasil mengeliminasi kemiskinan. Strategi target tersebut terdiri dari beberapa tahapan diantaranya: membantu mereka yang benar-

benar membutuhkan bantuan, mencapai hasil yang nyata dengan secara akurat mengidentifikasi dan membantu rumah tangga yang dilanda kemiskinan, mengelola objek dan tindakan secara akurat, dan secara akurat menilai efektivitas pengentasan kemiskinan. Dari tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan data warga miskin kemudian menilai program bantuan yang cocok untuk diberikan adalah langkah yang tepat dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat menjadi bahan dalam formulasi strategi.

10. Nursini (2020) judul "*Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia*". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui mekanisme penyerapan tenaga kerja, selama periode 1997 hingga 2018. Tingkat kemiskinan diukur menggunakan tiga indikator utama: Head Count Index (P0), Poverty Gap Index (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). UMKM dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan skala usahanya, yakni usaha mikro kecil (UMK) dan usaha kecil menengah (UKM). Selain itu, model penelitian turut mempertimbangkan variabel kontrol seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat keterbukaan, belanja pemerintah, dan investasi. Temuan studi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan berbeda tergantung pada skala usaha. UKM memberikan dampak

yang lebih besar dibandingkan UMK karena tidak hanya menurunkan proporsi penduduk miskin, tetapi juga memperkecil kesenjangan dan keparahan kemiskinan. Di antara variabel kontrol yang dianalisis, hanya pertumbuhan ekonomi yang terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam menekan angka kemiskinan secara langsung dan tidak langsung (Nursini, 2020). Penelitian kuantitatif tersebut diatas mengungkapkan bahwa UMKM berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa strategi peningkatan pendapatan masyarakat sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2022 melalui kegiatan pemberdayaan UMKM bagi warga masyarakat dapat menekan tingkat kemiskinan. Hal ini merupakan bagian dari formulasi dan implementasi strategi.

11. Syarif Hidayat et.al (2024) judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi serta indikator keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, Indonesia. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut terbagi dalam tiga fokus utama: program pengurangan beban, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem informasi dan big data. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengembangkan sejumlah platform digital seperti SIDAMESRA, SIDAKIS, dan SEMAKIN guna meningkatkan ketepatan data penerima manfaat. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, digunakan

indikator keluaran seperti jangkauan program, potensi bias, kemudahan akses, dan relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait status penerimaan bantuan. Ketidaktepatan sasaran bantuan masih kerap terjadi, sebagian besar disebabkan oleh fleksibilitas dalam prosedur birokrasi. Dari sisi akses, laman resmi Dinas Sosial Bantul telah menyediakan formulir pengaduan dan call center daring, namun belum dilengkapi dengan layanan WhatsApp yang mudah diakses publik. Adapun dari sisi kesesuaian program, sebagian besar penerima mengakui manfaat yang dirasakan sudah sejalan dengan kebutuhan mereka, meskipun dibutuhkan penguatan pengawasan dalam proses implementasi di lapangan (Hidayat & Adji Suradji Muhammad, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa masih perlunya pengawasan program penanganan kemiskinan.

Adapun kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut diatas dan *standing positon* penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian masih bersifat parsial yang artinya meneliti kemiskinan dilihat dari faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kemiskinan, program yang telah dijalankan, maupun evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.
- 2) Penelitian masih terbatas pada tema kemiskinan, belum masuk secara mendalam memaparkan terkait dengan kemiskinan ekstrem yang urgen dan kekinian.

- 3) Penelitian belum mengungkap perbandingan penanganan kemiskinan di dua daerah, terutama daerah pulau jawa dan luar pulau jawa.
- 4) Penelitian yang dilaksanakan berupa studi literatur, penelitian masih belum mendalam apabila dibandingkan dengan penelitian lapangan.
- 5) Penelitian yang dilaksanakan melihat strategi dari 1 (satu) indikator saja misalnya analisis SWOT atau tahapan formulasi strategi saja.

C. Fokus Penelitian dan kerangka berpikir

Kemiskinan ekstrem menjadi masalah yang menarik untuk dikaji dikarenakan, pertama, Presiden Joko Widodo menetapkan target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 yang artinya seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia akan berupaya untuk memenuhi target tersebut dan kedua, kondisi kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem yang berbeda-beda di wilayah Indonesia, maka penyebab dan strategi yang dilaksanakan kemungkinan juga berbeda.

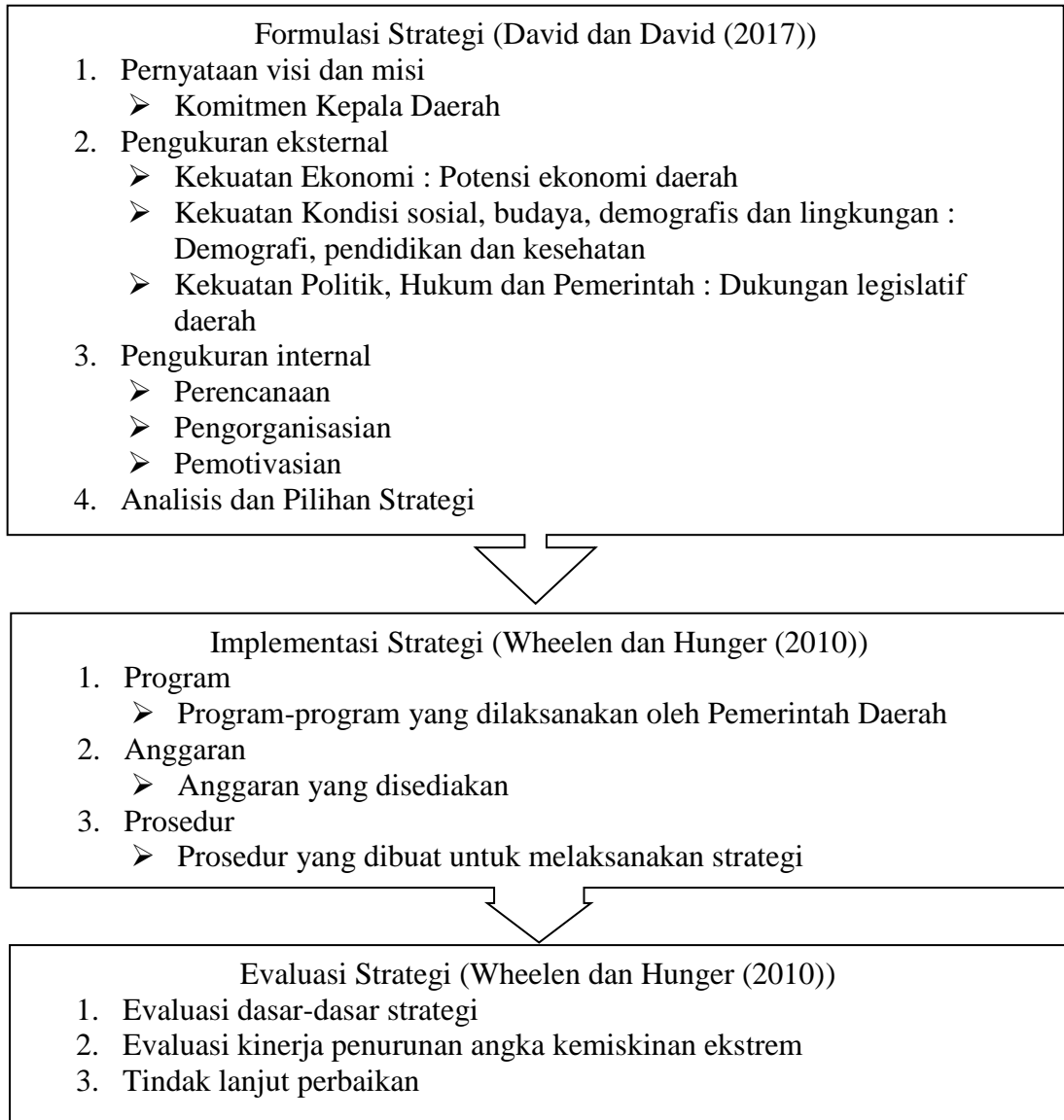
Kemudian dari sisi literature review, pertama, belum ada penelitian yang menggunakan pendekatan komparasi di level Kabupaten dengan perbedaan pulau di Indonesia khususnya pulau Jawa dan luar Jawa yang mengambil tema tentang kemiskinan dan kedua, belum ada penelitian lapangan yang komprehensif terkait dengan manajemen strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menggunakan teori Fred R. David dan Forest R. David dari segi formulasi strategi dan teori Wheelen dan Hunger dari segi implementasi dan evaluasi strategi sehingga melihat manajemen strategi penghapusan kemiskinan ekstrem

dari tiga tahapan yakni Formulasi Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi.

Menurut Hardani dan rekan-rekan (2020), kerangka berpikir adalah suatu bentuk model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu utama. Kerangka berpikir yang tersusun dengan baik mampu menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian (Hardani et al., 2020).

Penelitian ini menganalisis manajemen strategi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan teori manajemen strategik dari David dan David (2017) dan Wheelen dan Hunger (2010) antara lain: Formulasi Strategi yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, pengukuran eksternal (kekuatan ekonomi, kondisi sosial, budaya, demografi dan lingkungan), pengukuran internal (perencanaan, pengorganisasian, dan pemotivasian), Implementasi Strategi (program, anggaran dan prosedur) dan Evaluasi Strategi (evaluasi dasar-dasar strategi, evaluasi kinerja dan tindak lanjut perbaikan) pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun gambaran norma atau aturan terkait dengan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang didalamnya menginstruksikan Bupati/walikota untuk melakukan strategi kebijakan diantaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Ketiga strategi tersebut menjadi panduan didalam melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini. Sehingga kerangka pikir akan digambarkan dalam bagan dibawah ini:



Gambar 1. 9 Bagan Kerangka Berpikir

D. Rumusan Masalah.

Merujuk pada fokus yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka dapat disusun perumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini, yaitu:

“Bagaimana Komparasi Manajemen Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Studi Kasus Ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan manajemen strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia khususnya di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung manajemen strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia khususnya di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang valid dan manajemen strategi penanganan kemiskinan di Indonesia terutama terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dari segi keilmuan, khususnya Ilmu Pemerintahan “Mazhab Timoho 5 G”, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi khazanah perspektif *governmentality*.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluatif terhadap pengelolaan strategi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem, sekaligus menawarkan solusi atas berbagai faktor yang berperan sebagai hambatan maupun pendukung dalam pelaksanaannya.

F. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah dan pemerintah daerah

Istilah "pemerintahan" berasal dari kata dasar "perintah", yang setidaknya mengandung empat unsur pokok: terdapat dua pihak yang terlibat, adanya hubungan antara keduanya, pihak yang memberikan perintah memiliki otoritas, dan pihak yang menerima perintah menunjukkan kepatuhan. Dalam konteks kenegaraan, apabila kekuasaan negara dibagi atau dipisahkan, maka muncul perbedaan makna antara pemerintahan dalam pengertian luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti sempit merujuk hanya pada lembaga pelaksana atau eksekutif yang menjalankan administrasi negara. Sementara itu, dalam arti luas, pemerintahan mencakup juga lembaga pembuat undang-undang (legislatif) serta lembaga peradilan (yudikatif) (Syafiie, 2022).

Dalam bahasa Inggris, istilah *government* digunakan untuk merujuk pada dua hal sekaligus, yaitu pemerintah dan pemerintahan, yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam memahami maknanya. Meski demikian, kata dasar *government* dapat menjadi kunci untuk menelusuri fungsi dan peran pemerintahan yang dijalankan oleh suatu otoritas. Sementara itu, dalam bahasa Belanda,

terdapat beberapa istilah yang juga berpotensi menimbulkan ambiguitas, seperti *gouvernement(en)*, *reger*, *overheid*, dan *bestuur*. Jika menggunakan bahasa Indonesia, kita menemukan akar kata “perintah” dalam kata “pemerintahan”, yang dapat memberi kesan otoriter atau memunculkan citra sebagai “titah penguasa” sebuah konotasi yang cenderung ditolak oleh masyarakat demokratis masa kini. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, masyarakat memang pernah akrab dengan bentuk pemerintahan otokratis, di mana perintah dan titah dari penguasa dianggap wajar sebagai alat untuk menjaga loyalitas dan kepatuhan rakyat (Eko Yunanto, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya pelaksanaan desentralisasi serta pemberian kewenangan otonomi kepada daerah guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan, mutu layanan publik, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Struktur pemerintahan daerah diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi serta pelaksanaan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan, selaras dengan prinsip-prinsip otonomi yang bersifat nyata, dinamis, harmonis, dan penuh tanggung jawab.

2. Strategi

Dalam *Webster's New World Dictionary*, istilah “strategi” awalnya dijelaskan sebagai ilmu yang berkaitan dengan perencanaan dan pengarahan operasi militer. Namun demikian, pemahaman mengenai strategi tidak dapat dibatasi hanya pada perspektif militer

semata. Lebih luas lagi, strategi dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, yang mencakup penetapan prioritas, perencanaan program tindak lanjut, serta pengalokasian sumber daya secara optimal guna menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, strategi merupakan instrumen untuk meraih tujuan akhir, namun tidak cukup hanya dipahami sebagai sekadar perencanaan. Strategi harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, dimulai dari bagaimana perusahaan menggunakan sumber dayanya secara efisien dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi yang efektif menjadi krusial, sehingga rencana strategis harus dikaitkan secara langsung dengan aspek operasional. Peluang untuk mencapai keberhasilan akan meningkat apabila perencanaan strategi yang solid diiringi dengan implementasi yang efektif pula (Susanto, 2014).

Hill dan Jones (1998) membedakan strategi ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan kontemporer. Dalam pendekatan konvensional, strategi dianggap sebagai suatu rencana atau pola yang menyatukan tujuan utama organisasi, kebijakan-kebijakan, serta langkah-langkah tindakan yang saling berkaitan secara menyeluruh. Sementara itu, pendekatan kontemporer memandang strategi sebagai pola yang muncul dari rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil secara berkelanjutan. Di sisi lain, Chandler (1962) menjelaskan bahwa strategi adalah seperangkat tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, disertai dengan komitmen untuk bertindak serta

pendistribusian sumber daya guna merealisasikan tujuan tersebut (Susanto, 2014).

Menurut Fred R. David dan Forest R. David (David & David, 2017) Strategi merupakan langkah potensial yang memerlukan keputusan dari manajemen tertinggi serta alokasi sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Keputusan strategis ini berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesejahteraan organisasi dalam jangka panjang. Selain itu, strategi memiliki dampak yang luas pada berbagai fungsi organisasi dan menuntut analisis menyeluruh terhadap kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.

Dari definisi diatas, maka dapat diartikan strategi adalah sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan tindakan-tindakan yang terukur dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Didalam birokrasi publik contoh nyata dari strategi ini seringkali dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

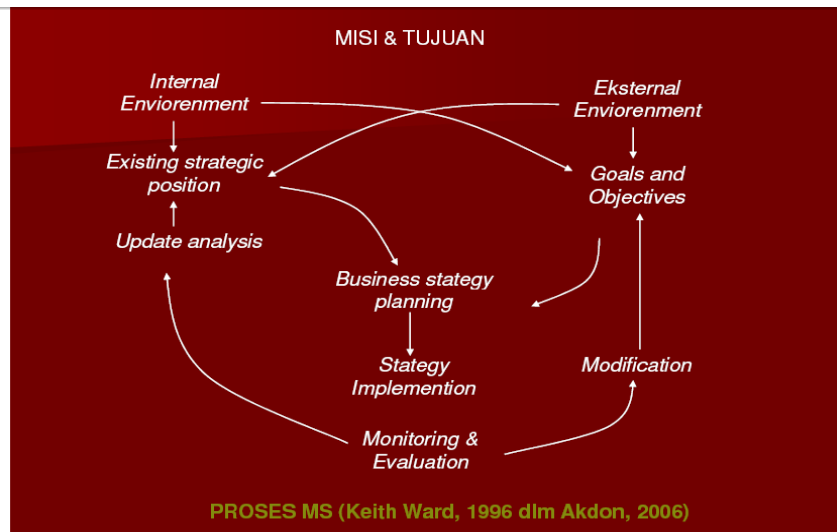
3. Manajemen strategi

Menurut Jauch dan Glueck (1998), manajemen strategik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan serta tindakan yang dirancang untuk merumuskan dan menetapkan strategi-strategi yang efektif demi membantu organisasi mencapai tujuannya. Sementara itu, Hill dan Jones, sebagaimana dikutip dalam Pearce dan Robinson II (2007), mendefinisikan manajemen strategik sebagai kombinasi

antara seni dan ilmu dalam merancang, menjalankan, serta mengevaluasi keputusan strategis lintas fungsi untuk mewujudkan tujuan jangka panjang organisasi (Susanto, 2014).

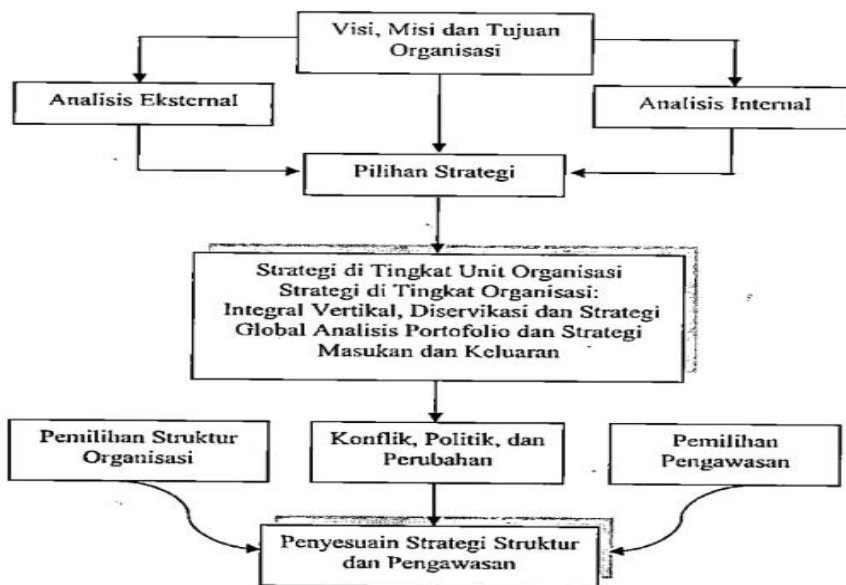
Dalam penerapannya, manajemen strategik berlangsung dalam bentuk siklus berulang, sebagaimana dinyatakan oleh Tourengau (1981: 9) bahwa proses ini merupakan rangkaian peristiwa strategis yang patut untuk diulang secara terus-menerus. Sejalan dengan itu, Ward (1992: 4) juga menyampaikan bahwa keseluruhan proses manajemen strategik mencakup pula tahapan implementasi dari strategi yang telah dipilih (Susanto, 2014).

Dalam pelaksanaannya, manajemen strategik adalah suatu rangkaian proses berkelanjutan yang membentuk suatu siklus untuk membantu organisasi merumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan target serta pengambilan keputusan yang tepat (Tourengau, 1981; Ward, 1996; Jauch & Glueck, 1997; Wheellen dan Hunger, 2010; Irelan, Hoskisson dan Hilt, 2011). Berdasarkan batasan yang telah disebutkan, proses manajemen strategis dapat dipahami sebagai pelaksanaan dari strategi-strategi yang telah dipilih, yang merujuk pada tujuan serta pola dalam pengambilan keputusan. Proses ini umumnya berbentuk siklus yang bersifat berulang. Dengan kata lain, manajemen strategis sangat dipengaruhi oleh konteks dan dimensi tertentu, tergantung pada karakteristik organisasi yang menetapkannya. Ward (1996) mengemukakan secara menyeluruh bahwa proses manajemen strategis merupakan aktivitas yang berlangsung terus-menerus dan berkaitan erat dengan upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih optimal dan menarik (Susanto, 2014).



Gambar 1. 10 Proses manajemen strategik Ward (1996)

Sumber : AB Susanto (2014)



Gambar 1. 11 Komponen Manajemen Strategik Hill dan Jones (1998)

Sumber : AB Susanto (2014)

Berdasarkan komponen tersebut, maka elemen-elemen penting dari manajemen strategik adalah (Susanto, 2014):

a. Misi dan tujuan

Misi merupakan landasan utama keberadaan suatu organisasi serta menggambarkan peran yang seharusnya dijalankan. Sementara itu, tujuan mencerminkan hasil yang ingin dicapai organisasi dalam waktu dekat, menengah, maupun jangka panjang.

b. Analisis eksternal

Analisis eksternal dilakukan untuk menelaah kondisi lingkungan yang memengaruhi operasional organisasi. Tujuannya adalah mengenali berbagai peluang dan risiko strategis yang mungkin berdampak terhadap jalannya organisasi.



Gambar 1. 12 Faktor-faktor lingkungan eksternal dari Ireland, Hoskisson, dan Hitt (2011)

Sumber : AB Susanto (2014)

c. Analisis internal

Analisis internal merupakan proses untuk menelaah keunggulan serta kekurangan yang dimiliki suatu organisasi, dengan tujuan mengenali berbagai sumber daya yang tersedia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

d. Pilihan strategis

Komponen ini mencakup berbagai pilihan strategi yang dapat ditempuh untuk meraih tujuan organisasi. Dalam kajiannya, dilakukan telaah mendalam terhadap kondisi internal, termasuk kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal seperti peluang dan ancaman. Proses ini dikenal sebagai analisis SWOT—singkatan dari *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Melalui analisis ini, diperoleh beragam opsi strategi. Organisasi kemudian menilai setiap alternatif tersebut secara komprehensif, dengan mempertimbangkan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

e. Strategi di tingkat unit organisasi

Untuk organisasi yang beroperasi dalam satu lingkungan persaingan tertentu, hasil dari proses perencanaan strategis adalah penentuan strategi yang tepat pada level unit organisasi

f. Desain struktur organisasi

Dalam merancang maupun menjalankan strategi kerja, suatu organisasi harus menerapkan struktur yang tepat. Struktur organisasi berperan penting dalam mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

g. Pilihan integrasi dan sistem pengawasan

Pelaksanaan strategi sering kali membutuhkan lebih dari satu bentuk struktur organisasi. Dalam proses ini, diperlukan berbagai tindakan serta koordinasi yang efektif di antara unit-unit dalam organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menentukan metode paling tepat untuk mengevaluasi kinerja serta memilih mekanisme pengawasan yang optimal.

h. Strategi penyesuaian, struktur dan pengawasan

Penerapan suatu strategi menuntut penyesuaian terhadap struktur organisasi serta mekanisme pengawasan yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keselarasan antara strategi organisasi, bentuk struktur, dan sistem pengendaliannya. Variasi dalam strategi dan kondisi lingkungan akan menimbulkan tuntutan yang berbeda, sehingga dibutuhkan respons struktural dan sistem pengawasan yang disesuaikan.

i. Konflik, politik dan perubahan

Meskipun secara teoritis proses manajemen strategis berjalan melalui pengambilan keputusan yang rasional, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat dinamika politik organisasi, seperti keberadaan berbagai kelompok dan persaingan internal, yang turut memengaruhi penanganan misi strategis tertentu.

j. Umpan balik

Manajemen strategis adalah suatu proses berkelanjutan yang tidak pernah berhenti. Ketika suatu strategi mulai diterapkan, pelaksanaannya perlu diawasi secara berkala untuk

mengetahui sejauh mana tujuan strategis telah tercapai. Hasil pemantauan ini kemudian digunakan sebagai masukan untuk merumuskan strategi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis merupakan serangkaian keputusan dan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup penentuan visi dan misi, analisis terhadap faktor eksternal dan internal, perumusan strategi yang tepat, pelaksanaan strategi tersebut, serta proses evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan.

Menurut David dan David (2017), manajemen strategis merupakan perpaduan antara keahlian praktis dan pendekatan ilmiah dalam menyusun, menerapkan, serta mengevaluasi keputusan yang melibatkan berbagai fungsi organisasi. Proses ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan utamanya melalui penyelarasan berbagai bidang seperti manajemen umum, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi. Istilah manajemen strategis secara umum merujuk pada rangkaian kegiatan yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Tujuan utamanya adalah merancang peluang inovatif jangka panjang demi keberlanjutan dan keberhasilan organisasi di masa depan (David & David, 2017).

Sebagaimana disebutkan diatas, proses manajemen strategik terdiri atas tiga tahap: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Bagian formulasi strategi akan dijelaskan konsep dari Fred R. David dan Forest R. David (2017) dikarenakan konsep formulasi strategi yang disampaikan telah dipakai oleh lembaga

pendidikan dan pemerintahan. Sedangkan untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi, penelitian ini menggunakan konsep dari Wheelen dan Hunger (2003) dikarenakan konsepnya lebih sederhana untuk dipakai menganalisis organisasi publik/birokrasi pemerintahan.

a. Formulasi strategi

Penyusunan strategi mencakup proses perumusan visi dan misi, analisis terhadap peluang serta tantangan dari lingkungan eksternal, penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal, pengembangan berbagai opsi strategi, serta pemilihan strategi yang paling tepat untuk diimplementasikan (David & David, 2017). Dalam penelitian ini formulasi strategi dilihat dari pernyataan visi dan misi, pengukuran eksternal, pengukuran internal, serta analisis dan pilihan strategi.

1) Pernyataan visi dan misi

Pernyataan misi, yang kerap dikenal sebagai pernyataan keyakinan, filosofi, tujuan, prinsip bisnis, atau bahkan sebagai definisi dari identitas organisasi, berfungsi untuk menggambarkan aspirasi organisasi serta kelompok yang ingin dijangkaunya. Setiap organisasi memiliki dasar eksistensinya, meskipun hal tersebut tidak selalu dituangkan secara tertulis oleh para perumus strategi. Dalam praktik manajemen strategis, penyusunan visi dan misi secara menyeluruh telah diakui secara luas oleh kalangan praktisi dan akademisi sebagai tahapan awal yang sangat penting.

Sebagai tahapan awal dalam proses manajemen strategis, rumusan visi dan misi berfungsi sebagai panduan utama dalam setiap kegiatan perencanaan. Visi dan misi yang dirancang secara tepat sangat penting untuk merancang, melaksanakan, serta menilai strategi. Namun, merumuskan dan menyampaikan visi serta misi secara tegas sering kali menjadi aspek yang terabaikan dalam manajemen strategis. Jika tidak ada kejelasan dalam visi dan misi, maka keputusan-keputusan jangka pendek bisa saja bertentangan dengan tujuan jangka panjang.

Dalam konteks pemerintah daerah maka pernyataan visi dan misi harus dinyatakan oleh pimpinan daerah dalam hal ini Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten adalah Bupati.

2) Pengukuran eksternal

Kekuatan eksternal dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama. Pertama adalah aspek ekonomi. Kedua mencakup faktor budaya, sosial, demografi, serta lingkungan. Ketiga berkaitan dengan aspek politik, pemerintahan, dan hukum. Keempat menyangkut perkembangan teknologi. Kelima meliputi tekanan dari persaingan. Dalam proses perencanaan strategis, penting untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor eksternal utama secara spesifik dan terukur. Bahkan lebih penting lagi, faktor-faktor tersebut harus bersifat aplikatif dan memiliki dampak strategis. Dengan menganalisis peluang dan ancaman dari luar organisasi, institusi dapat merumuskan visi dan misi yang terarah, merancang strategi untuk mencapai tujuan jangka

panjang, serta menyusun kebijakan yang mendukung pencapaian target tahunan.

Adapun yang menjadi perhatian dari penelitian ini adalah kekuatan eksternal berupa kekuatan ekonomi dengan variabel potensi ekonomi daerah. Kekuatan sosial, budaya, demografis dan lingkungan dengan variabel demografi, pendidikan dan kesehatan. Kekuatan politik, pemerintah dan hukum dengan variabel dukungan legislatif daerah.

3) Pengukuran internal

Penetapan tujuan dan strategi organisasi perlu diawali dengan analisis terhadap faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang dikembangkan mampu mengoptimalkan keunggulan yang ada dan mengurangi dampak dari berbagai keterbatasan. Pendekatan *Resource-Based View* (RBV) berpendapat bahwa keunggulan bersaing lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya internal dibandingkan oleh faktor eksternal. Dalam kerangka RBV, kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh seberapa baik mereka memanfaatkan aset yang dimiliki, termasuk sumber daya fisik, manusia, maupun struktural organisasi. Sumber daya fisik meliputi teknologi, fasilitas, dan lokasi usaha. Sumber daya manusia mencakup kompetensi pegawai, tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan. Adapun sumber daya organisasi mencakup struktur kelembagaan, sistem perencanaan, serta teknologi informasi.

RBV menekankan bahwa sumber daya inilah yang memungkinkan organisasi untuk menangkap peluang serta mengurangi risiko dari ancaman eksternal.

Disamping pendekatan berbasis sumber daya, pengukuran internal juga melihat fungsi manajemen yang terdiri dari aktivitas dasar: perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan karyawan (*staffing*) dan pengendalian. Adapun yang menjadi perhatian dari penelitian ini adalah:

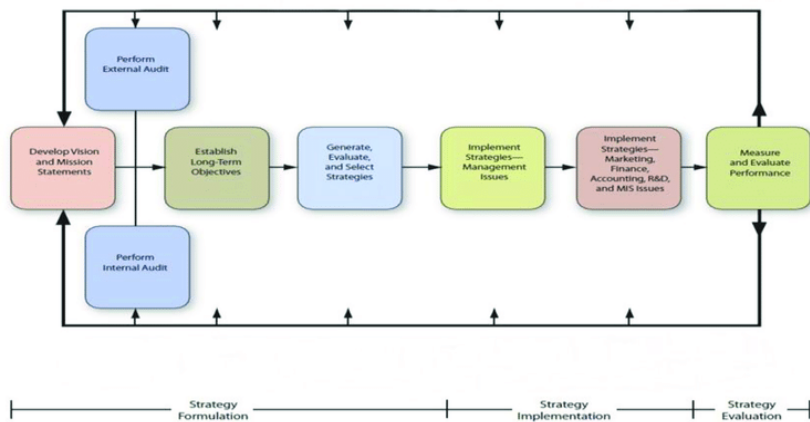
- a) Perencanaan, Perencanaan merupakan elemen kunci yang menjembatani kondisi saat ini dengan masa depan, serta meningkatkan peluang tercapainya tujuan yang diinginkan. Melalui proses perencanaan, dapat diidentifikasi secara jelas apa yang perlu dicapai, sekaligus merinci unsur-unsur penting seperti siapa yang terlibat, apa yang dilakukan, kapan pelaksanaannya, di mana tempatnya, serta alasan dan cara untuk mencapainya. Selain itu, perencanaan juga berperan dalam mengevaluasi sejauh mana upaya, biaya, dan konsekuensi yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang ditargetkan.
- b) Pengorganisasian, Pengorganisasian bertujuan untuk menciptakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan menetapkan struktur hubungan kerja dan wewenang. Proses ini mencakup penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dan kepada siapa laporan harus disampaikan. Dalam manajemen, fungsi pengorganisasian melibatkan serangkaian langkah, seperti membagi tugas

menjadi bagian-bagian pekerjaan yang lebih spesifik (spesialisasi tugas), mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit atau departemen (departementalisasi), serta memberikan wewenang kepada pihak tertentu (pendelegasian otoritas).

- c) Pemotivasian, dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi orang untuk menyelesaikan tujuan khusus. Komunikasi memegang peran krusial dalam membangkitkan motivasi. Pelaksanaan manajemen strategis akan berjalan lebih lancar apabila para bawahan diberi ruang untuk menyampaikan kekhawatiran, mengutarakan kendala, serta memberikan usulan dan masukan.

4) Analisis dan pilihan strategi

Proses perumusan strategi yang efektif dapat dibagi ke dalam tiga kerangka pengambilan keputusan utama. Tahap pertama adalah tahap input, yang bertujuan mengumpulkan dan merangkum data penting sebagai dasar dalam menyusun strategi. Tahap kedua dikenal sebagai tahap pencocokan, yang menitikberatkan pada pengembangan berbagai opsi strategi dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal yang signifikan. Sementara itu, tahap ketiga atau tahap keputusan, memanfaatkan informasi dari tahap sebelumnya untuk secara objektif menilai dan memilih strategi yang paling tepat.



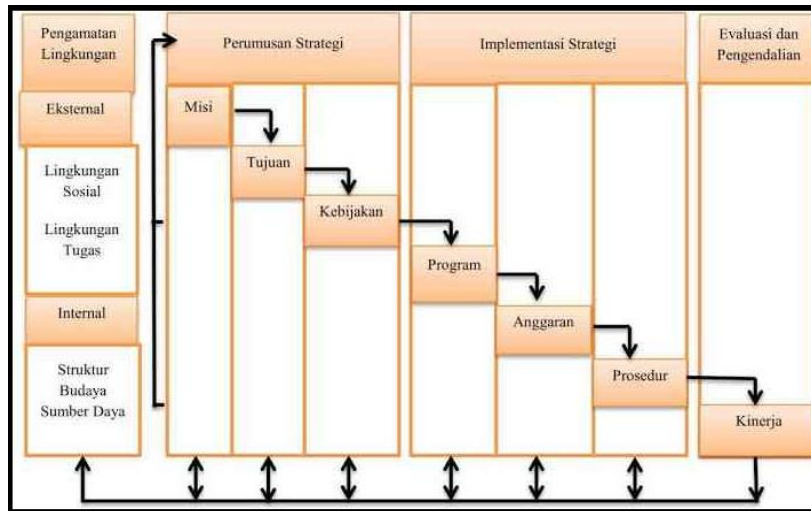
Gambar 1. 13 Model manajemen strategis komprehensif
Fred R. David (1988)

Sumber : David dan David (2017)

b. Implementasi strategi dan evaluasi strategi

Menurut Wheelen dan Hunger, proses manajemen strategis terdiri dari empat tahap utama, yaitu analisis lingkungan, perumusan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Pada intinya, mereka mengarahkan kita untuk berpikir strategis dengan mempertimbangkan sejumlah pertanyaan penting: bagaimana kondisi organisasi saat ini?, jika tidak ada perubahan, di manakah posisi organisasi dalam kurun waktu satu, dua, lima hingga sepuluh tahun ke depan apakah kondisi tersebut bisa diterima dan memuaskan?, jika tidak memadai, langkah konkret apa yang perlu dilakukan oleh manajemen?, risiko apa yang mungkin timbul dari langkah tersebut?, serta strategi antisipatif apa yang harus disiapkan?

Menurut Wheelen dan Hunger, perumusan strategi dapat dijabarkan secara operasional melalui beberapa tingkatan, yaitu misi, tujuan, strategi, serta kebijakan. Sementara itu, implementasi strategi dijalankan melalui program, penyusunan anggaran, dan prosedur. Secara lebih rinci, implementasi strategi dimulai dari penyusunan program yang bertujuan untuk mengubah strategi menjadi tindakan nyata (berorientasi pada aksi). Setelah seluruh program dirancang, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran. Penyusunan anggaran ini menjadi langkah akhir untuk menilai kelayakan strategi yang telah dipilih oleh manajemen. Dengan melakukan estimasi terhadap biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu program, manajemen dapat menilai apakah strategi yang sebelumnya dianggap tepat ternyata memiliki kelemahan atau bahkan tidak layak dijalankan. Adapun prosedur operasional standar (SOP) memuat detail aktivitas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan program tersebut secara sistematis (Hunger & Wheelen, 2003). Hal ini secara jelas dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1. 14 Model manajemen strategik Wheelen dan Hunger (2003)

Sumber : (Hunger & Wheelen, 2003)

4. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Secara etimologis, Poerwadarminta (1976) menjelaskan bahwa kata "kemiskinan" berasal dari istilah "miskin", yang menggambarkan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau kekayaan. Dalam pemahaman yang lebih luas, kemiskinan menunjukkan keadaan ketidakmampuan yang dialami oleh individu, keluarga, atau kelompok dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial lainnya. Kuncoro (1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang layak. Kartasmita (1997) memandang kemiskinan sebagai permasalahan dalam proses

pembangunan, yang tercermin dari adanya pengangguran dan keterbelakangan, serta berkembang menjadi kesenjangan sosial. Pandangan serupa dikemukakan oleh Friedman (1992), yang menilai kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan akses terhadap sumber daya sosial yang penting. Sementara itu, Brendley (dalam Ala, 1981) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memperoleh barang dan layanan dasar guna memenuhi kebutuhan sosial tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Salim (dalam Ala, 1981), yang mengungkapkan bahwa kemiskinan seringkali diidentikkan dengan keterbatasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh individu, kelompok, maupun keluarga dalam mencukupi standar kebutuhan hidup minimum (Rustanto, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan pengertian kemiskinan adalah kondisi seseorang, kelompok atau keluarga tidak dapat memenuhi standar hidup yang layak dimana bukan hanya terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran tetapi juga aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Adapun definisi kemiskinan Menurut World Bank (Bank Dunia) dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty> (diakses tanggal 16 Juni 2024) dan definisi inilah yang seringkali dipakai oleh Pemerintah, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang

mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Definisi ini menekankan pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup minimum yang layak dan mengakibatkan keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar yang penting untuk kesejahteraan manusia. Elemen-elemen utama dalam definisi kemiskinan oleh World Bank:

- 1) Kemiskinan sering diukur berdasarkan pendapatan dan konsumsi. World Bank menetapkan garis kemiskinan internasional pada \$2,15 per hari (berdasarkan paritas daya beli tahun 2022). Mereka yang hidup di bawah garis ini dianggap hidup dalam kemiskinan ekstrem.
- 2) Kemiskinan tidak hanya mencakup kurangnya pendapatan tetapi juga ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan yang memadai, air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.
- 3) Kemiskinan juga melibatkan aspek kerentanan terhadap kejutan ekonomi dan sosial serta eksklusi sosial yang mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini mencakup ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak dan layanan penting lainnya.
- 4) World Bank mengakui bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup dimensi-dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan sering kali menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI)

yang mempertimbangkan berbagai faktor selain pendapatan.

- 5) Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan termasuk tingkat pengangguran, tingkat buta huruf, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta angka kematian bayi dan ibu.

Sebagaimana sejalan dengan pendapat Bank Dunia dan sejumlah pakar sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik yang bersifat konsumsi makanan maupun non-makanan. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat jumlah pengeluaran. Oleh karena itu, seseorang diklasifikasikan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya setiap bulan tidak mencapai ambang batas garis kemiskinan.

b. Faktor penyebab kemiskinan

Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), seperti (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural dan (3) kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1997) dan Baswir (1997) sebagai berikut (Rustanto, 2015):

1) Kemiskinan natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997) Kemiskinan natural merupakan jenis kemiskinan yang timbul akibat kondisi-kondisi yang bersifat alamiah, seperti adanya disabilitas, penyakit kronis, usia lanjut, maupun dampak dari bencana alam. Menurut Kartasasmita (1997), situasi seperti ini menjadi penyebab utama munculnya kemiskinan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh individu yang mengalaminya disebut sebagai “*persisten poverty*” yaitu merujuk pada kondisi kemiskinan yang telah berlangsung lama dan diwariskan antar generasi. Wilayah dengan karakteristik kemiskinan semacam ini biasanya berada di daerah yang mengalami kerusakan sumber daya alam secara serius atau berada dalam kondisi keterpencilan geografis (Rustanto, 2015).

2) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka

hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Baswir (1997) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, apatis *nrimo*, dan sebagainya (Rustanto, 2015).

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan jenis kemiskinan yang timbul akibat faktor-faktor yang diciptakan oleh manusia, seperti ketimpangan dalam kebijakan ekonomi, pembagian aset yang tidak seimbang, praktik korupsi dan kolusi, serta sistem ekonomi global yang lebih berpihak pada kelompok masyarakat tertentu. Menurut Baswir (1997) Kemiskinan struktural muncul sebagai akibat dari intervensi dalam mengatasi kemiskinan alamiah melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang pemerintah. Namun, ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta ketimpangan dalam akses terhadap peluang justru mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi tidak setara, sehingga tercipta ketimpangan dalam struktur sosial. Menurut Kartasasmita (1997) Kondisi ini dikenal sebagai '*accident poverty*', yakni situasi kemiskinan yang muncul akibat pengaruh suatu

kebijakan tertentu yang berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan pandangan umum, menurut Chambers (1983), akar persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial terletak pada apa yang ia sebut sebagai *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Perangkap ini terdiri dari lima elemen utama, yaitu kondisi miskin, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan, serta ketidakmampuan. Kelima aspek ini saling berkaitan erat dan saling memengaruhi satu sama lain (Rustanto, 2015).

c. Teori kemiskinan

Dari berbagai teori yang menjelaskan kemiskinan, ada terdapat dua teori (*grand theory*) yang mendasari teori kemiskinan yaitu:

- 1) Teori neo-liberal, menurut para pakar yang menganalisis kemiskinan Shannon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave menyimpulkan tingkat kemiskinan akan semakin berkurang apabila pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Para ahli ekonomi tersebut sudah memberikan jawaban bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat residual atau sementara yang saling bersangkutan. Peran pemerintah sangat diperlukan apabila permasalahan kemiskinan tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai program kebijakan tersendiri untuk menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah, seperti halnya pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin (Rumadan, 2022).

2) Teori demokrasi sosial, berbeda halnya dari teori sebelumnya yang memandang kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat sementara karena menyangkut beberapa individu. Pendapat teori ini lebih memandang bahwa kemiskinan tertuju pada sifat yang struktural. Konsep dasar teori ini bahwa kemiskinan disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakmerataan yang diakibatkan terhambatnya akses-akses pelayanan masyarakat, sehingga teori ini menekankan pada pengeluaran pemerintah untuk memberikan akses pelayanan sosial kepada masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat. Adanya kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau masyarakat menjadi miskin (Rumadan, 2022).

d. Ukuran kemiskinan di Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan beberapa ukuran dan pendekatan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa ukuran kemiskinan yang sering digunakan oleh BPS :

1) Garis Kemiskinan (*Poverty Line*): Garis kemiskinan adalah nilai kebutuhan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. BPS menetapkan garis kemiskinan ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang merupakan survei rumah tangga terbesar dan terpenting di Indonesia. Data Susenas digunakan untuk menghitung rata-rata pengeluaran per kapita yang dibutuhkan

untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

- 2) Indeks Kemiskinan (*Poverty Index*): BPS menggunakan indeks kemiskinan untuk mengukur proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indeks ini diperoleh dari hasil perbandingan antara rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan yang telah ditetapkan.
- 3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Depth Index*): Indeks ini mengukur seberapa jauh penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah indeks kedalaman kemiskinan, semakin dekat penduduk miskin tersebut dengan garis kemiskinan.
- 4) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*): Indeks ini menggambarkan tingkat ketidakmampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan minimum. Semakin tinggi indeks ini, semakin parah kondisi kemiskinan yang dialami oleh penduduk miskin.

e. Kemiskinan ekstrem

Berdasarkan definisi dari Bank Dunia, kondisi kemiskinan ekstrem menggambarkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam mengakses kebutuhan esensial seperti nutrisi, air bersih, layanan sanitasi, hunian layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Bank Dunia menggunakan ukuran kemiskinan ekstrem berdasarkan garis kemiskinan internasional (*International Poverty Line*) yang ditetapkan

sebagai pengeluaran per kapita harian kurang dari 1,90 dolar AS pada tahun 2011, disesuaikan dengan inflasi dan perbedaan daya beli di setiap negara.

Artinya, seseorang digolongkan sebagai miskin ekstrem apabila pengeluaran hariannya kurang dari Rp10.739 per orang, atau sekitar Rp322.170 per bulan (BPS, 2021). Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga terdiri atas empat anggota (ayah, ibu, dan dua anak), maka keluarga tersebut tergolong miskin ekstrem apabila total pengeluaran bulanannya tidak melebihi Rp1.288.680 (BPS, 2021).

Tabel 1. 5 Pengeluaran orang/hari kemiskinan ekstrem dan kemiskinan nasional

Keterangan	Kemiskinan Ekstrem Nasional	Kemiskinan Nasional
Pengeluaran/orang/hari	Rp 10.739	Rp 15.750
Pengeluaran/orang/bulan	Rp. 322.170	Rp. 472.525

Sumber : BPS (2021)

Penduduk yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrem merupakan bagian dari masyarakat miskin karena tingkat penghasilan mereka berada di bawah ambang batas garis kemiskinan nasional. Definisi mengenai kemiskinan ekstrem ini disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan metode pengukuran yang dirumuskan oleh Bank Dunia. Di Indonesia, penetapan garis kemiskinan

ekstrem dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah melakukan berbagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem secara terarah melalui beragam kebijakan strategis. Strategi tersebut antara lain: pertama, menekan beban pengeluaran warga melalui penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial, serta subsidi lewat berbagai program dan kegiatan; kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara mendorong program pemberdayaan; dan ketiga, meminimalkan konsentrasi daerah miskin melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang merata.

Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai kebijakan teknis sebagai tindak lanjutnya.

- 1) Surat Keputusan Menko PMK No.25 Tahun 2022 Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024.
- 2) Surat Keputusan Menko PMK No.30 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis dan Sumber Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- 3) Surat Keputusan Menko PMK Tentang Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- 4) Surat Keputusan Menko PMK Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data P3KE.

- 5) Ketentuan Menko PMK dan/atau kementerian/lembaga lainnya untuk dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Penentuan wilayah prioritas dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada periode 2022–2024 dilakukan berdasarkan tingkat indeks kemiskinan ekstrem di tingkat kabupaten/kota. Penetapan ini mempertimbangkan dua hal utama, yaitu wilayah dengan persentase kemiskinan ekstrem yang tinggi dan wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang besar. Ketentuan ini merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022.

Pemerintah pusat menetapkan prioritas pada 212 kabupaten/kota karena wilayah-wilayah tersebut menampung sekitar 75% dari total penduduk yang tergolong miskin ekstrem secara nasional. Meski demikian, kabupaten/kota di luar daftar prioritas tetap diberi kesempatan untuk turut serta dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022, disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah masing-masing.

Untuk mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem, dibutuhkan data terbaru yang mencakup pemeringkatan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk, lengkap dengan identitas nama dan alamat. Data ini kemudian menjadi acuan utama dalam menetapkan sasaran intervensi berbagai program.

Apabila data terkini dengan pemeringkatan kesejahteraan tersebut belum tersedia, maka dapat digunakan data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai alternatif.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Auerbach dan Silverstein (2003) metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis serta penafsiran terhadap data berupa teks dan wawancara, dengan tujuan utama mengungkap makna di balik suatu fenomena. Pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dengan metode kuantitatif yang bersifat konvensional. Jika penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian kualitatif justru bertujuan untuk merumuskan hipotesis berdasarkan temuan di lapangan (Sugiyono, 2023).

Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (2002), Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik atau bukan berbentuk angka. Tujuan utamanya adalah menggali informasi yang kaya dan mendalam mengenai suatu permasalahan atau fenomena tertentu. Dalam prosesnya, metode ini umumnya memanfaatkan teknik seperti diskusi kelompok terarah (*focus group*), wawancara mendalam, serta observasi partisipatif untuk memperoleh data yang relevan (Sugiyono, 2023).

Menurut Creswell (2012), metode kualitatif dibagi menjadi lima macam yaitu *phenomenological research*, *grounded theory*, *ethnography*, *case study* and *narrative research* (Sugiyono, 2023).

1. Penelitian Fenomenologis, Metode ini bertujuan menggali makna mendalam dari pengalaman hidup individu. Peneliti mengumpulkan data melalui keterlibatan langsung dengan

partisipan untuk memahami esensi dari fenomena yang mereka alami.

2. *Grounded Theory* (Teori Dasar). Pendekatan ini berfokus pada pengembangan teori yang muncul dari data yang diperoleh di lapangan. Peneliti mengkaji pandangan partisipan untuk merumuskan konsep atau proses yang bersifat umum secara induktif.
3. Etnografi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyelami kehidupan kelompok sosial tertentu untuk memahami pola budaya mereka. Proses ini dilakukan di lingkungan alami melalui wawancara serta observasi mendalam.
4. Studi Kasus. Jenis penelitian ini menelusuri secara rinci satu unit kasus tertentu, seperti individu, kelompok, atau kegiatan, dalam batasan waktu dan tempat tertentu. Peneliti menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam.
5. Penelitian Naratif. Metode ini berfokus pada kisah hidup seseorang atau beberapa individu. Peneliti menghimpun informasi mengenai pengalaman hidup partisipan dan menyusunnya menjadi narasi yang terstruktur dan kronologis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berpijak pada paradigma postpositivistik atau interpretatif. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji fenomena dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif atau kualitatif, kemudian dianalisis secara induktif.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna, mengungkap keunikan, membangun pemahaman terhadap suatu fenomena, serta merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2023).

Berkenaan dengan penjelasan metode penelitian kualitatif di atas, maka penelitian ini mengambil metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus yang menggambarkan komparasi manajemen strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan studi kasus ganda di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian studi kasus ganda merupakan salah satu pendekatan dalam metode kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena melalui lebih dari satu kasus secara mendalam, sistematis, dan kontekstual. Tujuannya adalah untuk memahami kemiripan dan perbedaan antar kasus guna menghasilkan temuan yang lebih luas dan reliabel. Adapun proses penelitian studi kasus ganda yaitu, merancang penelitian kasus, menyiapkan dan merencanakan penelitian lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, melaporkan temuan, dan menyusun laporan penelitian (Yin, 2018).

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun dipilihnya kedua daerah tersebut dikarenakan memiliki kesamaan masih adanya warga miskin ekstrem serta perbandingan 2 (dua) wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari sumber

pertama, baik dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipasi, *focus group discussion* (FGD) dan lain-lain. Data primer adalah jenis data utama yang dikumpulkan langsung dari informan oleh peneliti. Proses pengumpulan data ini umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang, terutama jika dilakukan melalui wawancara mendalam. Data primer biasanya diperoleh langsung dari sumber pertama, tanpa perantara. Selain menggunakan teknik wawancara, data primer juga bisa dikumpulkan melalui observasi partisipatif, yang juga memakan waktu cukup lama karena peneliti harus benar-benar terlibat secara aktif dalam kehidupan komunitas yang menjadi fokus penelitian, bukan hanya sekadar berpura-pura terlibat (Karsadi, 2022).

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari pihak kedua atau bersumber dari hasil studi, dokumentasi, atau data yang telah dikumpulkan oleh individu atau lembaga lain, seperti arsip, dokumen, catatan tertulis, dan sejenisnya. Data sekunder ini umumnya berupa data statistik yang bersumber dan berasal dari berbagai instansi pemerintahan, seperti data BPS, BAPPENAS, BKKBN dan dari instansi pemerintah lainnya. Termasuk data sekunder ini berupa data yang tersimpan di lembaga-lembaga penelitian, baik lembaga penelitian pemerintah (seperti LITBANG kementerian, LIPI dan lain-lain). Data sekunder umumnya dikumpulkan peneliti melalui pihak lain atau bukan berasal langsung dari sumber aslinya. Dalam beberapa kasus untuk penelitian kualitatif tertentu keberadaan data sekunder juga sangat dibutuhkan untuk melengkapi dan mendukung data primer (Karsadi, 2022).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan para informan sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen dan informasi yang tersedia di instansi seperti BPS, BAPPEDA, serta lembaga teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah serta karya jurnalistik (berita) dan informasi dari *website* yang terpercaya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.

1. Wawancara mendalam

Kata kunci keberhasilan utama dalam wawancara mendalam menurut Irawati Singarimbun (Sofian Effendi dan Tukiran eds., 2017: 223-224) adalah *control* dan *rapport*, yaitu bagaimana seorang peneliti mengontrol wawancara agar pembicaraan tidak meluas dan bagaimana saat kita melakukan itu, jawaban tersebut tidak menyinggung informan. *Rapport* merujuk pada hubungan interaktif yang harmonis antara peneliti dan informan, yang mencakup aspek-aspek kepribadian dalam komunikasi mereka. Penilaian-penilaian negatif informan terhadap sikap dan perilaku peneliti seringkali menimbulkan bias, baik berupa pemberian informasi yang bohong maupun penolakan wawancara. Intinya pewawancara harus sopan, rendah hati, egaliter, melindungi privasi informan dan bersikap akrab (Karsadi, 2022).

2. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang umum digunakan adalah observasi. Jenis observasi yang paling sering diterapkan, khususnya dalam studi ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi, adalah observasi partisipatif, di mana peneliti turut terlibat dalam lingkungan yang diteliti. Selain observasi partisipasi, untuk kasus-kasus penelitian tertentu, peneliti juga menggunakan observasi non-partisipasi. Dibandingkan observasi non-partisipasi, maka penggunaan teknik observasi partisipasi memiliki kelebihan, yaitu mampu mengungkap dan memahami secara mendalam perilaku masyarakat pada situasi sosial tertentu karena terlibat langsung dan menjadi bagian dari masyarakat yang diamati. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan utama penelitian kualitatif tidak lain adalah pemahaman makna secara mendalam dari situasi sosial atau fenomena sosial tertentu (Karsadi, 2022).

3. Studi dokumentasi

Dokumen adalah bahan tertulis yang berasal dari catatan seseorang yang berkaitan dengan pengalaman dan riwayat hidup seseorang serta bahan tertulis lainnya yang berasal dari instansi pemerintahan atau lembaga nonpemerintahan. Secara umum, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian kualitatif mencakup dua jenis sumber, yaitu dokumen pribadi dan dokumen yang bersifat resmi. Kedua jenis dokumen ini bermanfaat sebagai sumber data penelitian kualitatif dan berfungsi melengkapi data atau informasi yang sebelumnya

diperoleh dari teknik pengumpulan data yang lain (Karsadi, 2022).

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah dokumen resmi. Menurut Karsadi, dokumen resmi merujuk pada catatan tertulis, laporan tertulis, dan arsip yang didokumentasikan oleh instansi pemerintahan dan instansi nonpemerintahan, berupa data statistik, peraturan dan kebijakan pemerintah secara tertulis, laporan tahunan, risalah rapat suatu kantor dan sejenisnya. Dokumen resmi ini juga berguna untuk melengkapi data atau informasi yang berasal dari wawancara, observasi dan FGD. Dalam penelitian kualitatif, dokumen resmi keberadaannya sangat penting, karena merupakan sumber data tertulis yang keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

D. Teknik Pemilihan Informan atau Narasumber.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2023), *purposive sampling* merupakan cara menentukan sampel dengan menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya karena individu tersebut dinilai memiliki pengetahuan paling relevan dengan topik yang diteliti, atau memiliki posisi yang strategis sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi dari objek atau situasi sosial yang sedang dikaji (Sugiyono, 2023).

Berdasarkan penjelasan terkait dengan teknik tersebut diatas maka informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a) Penjabat Bupati Kulon Progo
 - b) Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo

- c) Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kulon Progo
 - d) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo
 - e) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo
 - f) 2 (empat) orang Kepala Desa/Lurah.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
- a) Penjabat Bupati Kotawaringin Barat
 - b) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
 - c) Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
 - d) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
 - e) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - f) 2 (empat) orang Kepala Desa/Lurah.

E. Teknik Validasi Data

Uraikan bagaimana melakukan validasi atas data-data yang diperoleh meliputi antara lain;

a. Uji derajat kepercayaan

Menurut Sugiyono (2023), pengujian tingkat kepercayaan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memperluas waktu observasi, meningkatkan intensitas keterlibatan peneliti, melakukan triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis data yang bertentangan, serta melakukan pemeriksaan ulang kepada informan (*member check*).

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui pendekatan triangulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi, memakai beragam teknik

pengumpulan data, serta dilakukan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

b. Uji keteralihan

Penelitian ini akan mencoba menguraikan laporan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Sehingga dapat menjadi validitas eksternal terhadap populasi yang diambil sampel/informan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman (1984), yang menjelaskan bahwa proses analisis dilakukan secara simultan dan berlangsung terus menerus hingga data dianggap memadai atau jenuh. Tahapan analisis mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta proses penarikan dan pengujian kesimpulan (Sugiyono, 2023).

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian inti dalam setiap penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, data biasanya dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya. Proses ini berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, bisa memakan waktu sehari-hari bahkan berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang sangat melimpah. Di tahap awal, peneliti akan melakukan eksplorasi awal terhadap kondisi sosial atau objek yang diteliti, dengan mencatat secara rinci semua hal yang dilihat maupun didengar. Dengan cara ini, peneliti akan mendapatkan beragam informasi yang sangat kaya dan bervariasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan, dan penekanan pada informasi yang relevan serta esensial. Proses ini bertujuan untuk menyoroti unsur-unsur penting dengan mengidentifikasi tema serta pola yang muncul. Dengan begitu, data yang telah direduksi akan memberikan pemahaman yang lebih tajam dan memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data berikutnya atau ketika perlu ditelusuri kembali. Reduksi data bisa dilakukan dengan bantuan perangkat digital dan pemberian kode pada kategori-kategori tertentu. Proses ini senantiasa diarahkan oleh kerangka teori dan sasaran penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, fokus utama adalah pada penemuan atau *insight* yang diperoleh dari data tersebut.

3. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan lainnya. Dengan cara ini, informasi menjadi lebih terstruktur dan membentuk pola tertentu yang memudahkan pemahaman. Selain itu, data juga bisa disajikan lewat penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, alur proses, dan bentuk visual serupa. Namun, dalam penelitian kualitatif, metode yang paling umum digunakan untuk menyampaikan data adalah melalui uraian berbentuk narasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih banyak menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif dan dapat mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti

yang cukup kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila data yang diperoleh di lapangan pada tahap lanjutan menunjukkan konsistensi dan validitas yang tinggi, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam studi kualitatif bisa saja mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan, mengingat bahwa permasalahan dan rumusan masalah dalam pendekatan ini masih bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring berlangsungnya proses penelitian di lapangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kondisi umum daerah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat provinsi tersebut. Lokasinya tidak berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, sehingga diperlukan perjalanan sekitar 25 kilometer untuk mencapainya. Kabupaten ini terbagi menjadi 12 kapanewon, yang masing-masing memiliki karakteristik fisik dan sosial yang berbeda. Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kulon Progo dapat dikelompokkan menjadi tiga zona utama: bagian utara, tengah, dan selatan. Perbedaan bentuk lahan pada tiap zona ini turut memengaruhi keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat di setiap wilayahnya.

Kabupaten Kulon Progo terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat pemerintahan berada di Kota Wates. Wilayah ini mencakup 12 kapanewon, terdiri atas 87 kalurahan dan 1 kelurahan, serta terbagi menjadi 918 pedukuhan, 1.825 Rukun Warga (RW), dan 4.469 Rukun Tetangga (RT). Secara keseluruhan, luas wilayahnya mencapai 586,28 kilometer persegi (BPS Kulon Progo, 2023). Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 mengenai Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, total luas wilayah Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 577,22 km². Namun, rincian luas untuk masing-masing kecamatan (kapanewon)

belum dijelaskan secara spesifik dalam keputusan tersebut. Ketidaksesuaian data luasan ini nantinya akan menjadi salah satu fokus dalam proses penyesuaian dan harmonisasi dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo yang masih dalam tahap penyusunan. Informasi detail mengenai nama-nama kapanewon beserta luas wilayahnya dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kapanewon
Kabupaten Kulon Progo

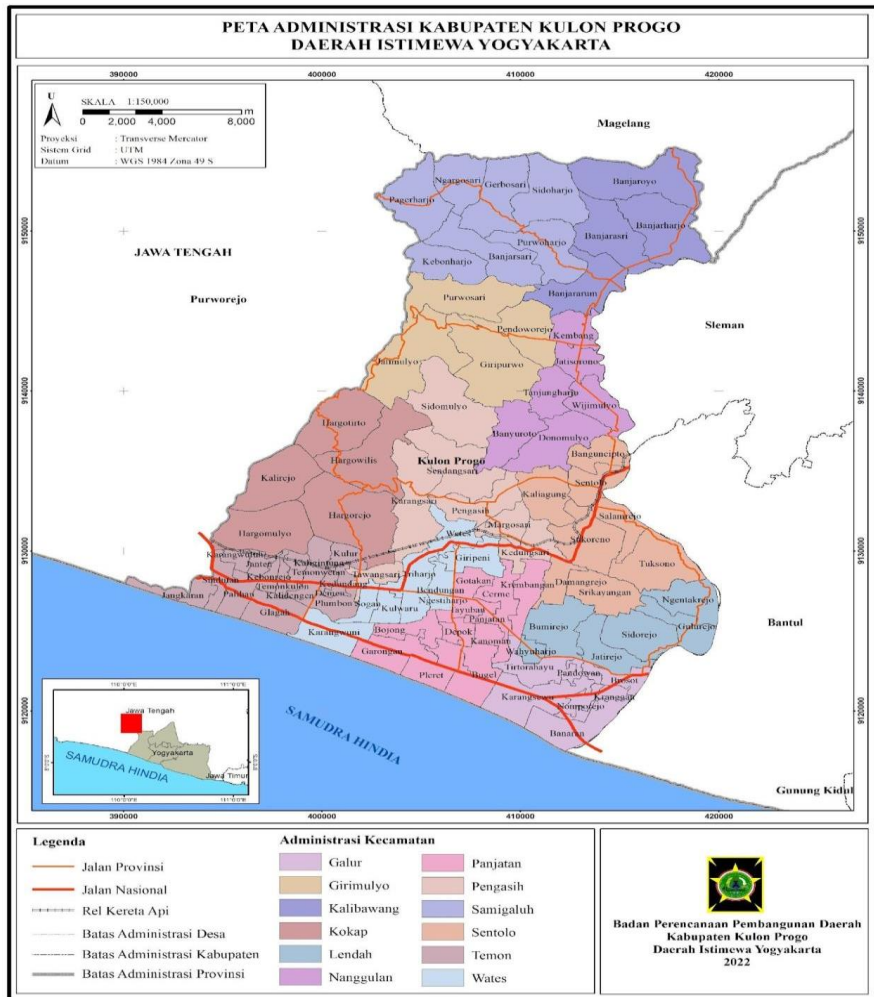
No	Kapanewon	Luas Wilayah (km)	Persentase (%)
1	Temon	36,30	6,19
2	Wates	32,00	5,46
3	Panjatan	44,59	7,61
4	Galur	32,91	5,61
5	Lendah	35,59	6,07
6	Sentolo	52,65	8,98
7	Pengasih	61,66	10,52
8	Kokap	73,80	12,59
9	Girimulyo	54,90	9,36
10	Nanggulan	39,61	6,76
11	Kalibawang	52,96	9,03
12	Samigaluh	69,29	11,82
Kabupaten Kulon Progo		586,28	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo, 2023

Kabupaten Kulon Progo memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten

Sleman, sisi selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara bagian baratnya berbatasan dengan Kabupaten Purworejo yang juga berada di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar berikut menyajikan informasi lebih rinci mengenai batas-batas administratif Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak antara $7^{\circ}38'30''$ hingga $7^{\circ}58'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}1'37''$ hingga $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur. Dari perspektif geostrategis, posisi wilayah ini tergolong cukup menguntungkan. Terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Kondisi ini menjadikan Kulon Progo sebagai pintu masuk utama ke wilayah DIY dari arah barat, yang sekaligus menghubungkan daerah ini dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di sisi barat dan utara Pulau Jawa, seperti Kabupaten Purworejo dan kawasan pariwisata nasional Candi Borobudur di Magelang. Selain itu, karena wilayah selatannya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Kulon Progo memiliki peluang strategis dalam menjalin konektivitas dengan negara-negara di bagian selatan, seperti Australia. Posisi geografis yang demikian juga dapat terlihat secara visual dalam peta berikut:



Gambar 3. 2 Peta Geostrategic Kabupaten Kulon Progo

Sumber : Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) atau Yogyakarta International Airport (YIA) di wilayah Kapanewon Temon, beriringan dengan penetapan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), diprediksi akan meningkatkan arus kunjungan wisatawan melalui bandara tersebut. Rute pariwisata yang menghubungkan BIY dengan kawasan Borobudur berpotensi menjadi koridor ekonomi baru di wilayah Kulon Progo. Keberadaan bandara ini diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap rantai nilai global (global value chain), khususnya dalam sektor transportasi dan layanan akomodasi di Kulon Progo. Selain itu, kehadiran Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang membentang di sepanjang garis pantai Kulon Progo turut memperluas akses distribusi barang dan jasa, terutama untuk wilayah selatan Pulau Jawa. Letak strategis ini menjadi peluang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat kabupaten maupun di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan.

Dilihat dari karakteristik fisik geografisnya, Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi tiga zona wilayah yaitu:

a. Kawasan pesisir

Kawasan ini tergolong sebagai dataran rendah dengan elevasi antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini mencakup Kapanewon Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, serta sebagian area dari Kapanewon Sentolo dan Pengasih. Jika dilihat dari sudut kemiringan lahannya, daerah ini memiliki gradien lereng berkisar antara 0 hingga 2 persen. Secara geografis, wilayah ini termasuk kawasan pesisir dengan garis pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 24,8 kilometer.

b. Kawasan dataran

Wilayah ini termasuk kawasan perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut, mencakup wilayah Kapanewon Nanggulan, sebagian Sentolo, Pengasih, serta sebagian Kalibawang. Ditinjau dari tingkat kemiringan lahannya, daerah ini memiliki lereng sebesar 2 hingga 15 persen, yang menunjukkan bentuk topografi bergelombang hingga berombak, serta berfungsi sebagai zona transisi antara dataran rendah dan kawasan berbukit.

c. Kawasan pegunungan

Wilayah Pegunungan Menoreh berada pada ketinggian antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut dan mencakup beberapa kapanewon, yaitu Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang. Jika dilihat berdasarkan skala

wilayah kapanewon, area yang memiliki tingkat kemiringan lereng lebih dari 40 derajat (wilayah pegunungan) terletak di bagian barat Kabupaten Kulon Progo dan mencakup Kapanewon Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, serta sebagian wilayah Nanggulan.

Sementara itu, kapanewon yang tidak memiliki wilayah dengan lereng curam di atas 40 derajat antara lain Wates, Panjatan, Galur, Lendah, dan Sentolo. Kapanewon-kapanewon ini berada di zona dataran rendah, sehingga tidak memiliki ciri khas fisiografi pegunungan. Kapanewon Panjatan memiliki wilayah dengan kemiringan lereng kurang dari 20 derajat yang paling luas. Sebaliknya, Kapanewon Samigaluh hampir seluruhnya terdiri dari kawasan dengan morfologi pegunungan dan sangat sedikit wilayah dataran. Kondisi kontur wilayah seperti ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kawasan, kegiatan ekonomi, serta hubungan antarwilayah.

2. Demografi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 443.591 jiwa, yang terdiri atas 219.776 laki-laki dan 223.815 perempuan, dengan jumlah keluarga mencapai 155.219. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini cenderung menurun, kecuali pada tahun 2018 yang mencatat peningkatan sebesar 0,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar -0,95% dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, jumlah keluarga

mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada 2016, jumlah keluarga sebanyak 146.414, kemudian naik menjadi 149.172 pada 2017, bertambah menjadi 150.954 pada 2018, namun turun menjadi 149.976 pada 2019. Pada 2020, jumlah keluarga meningkat lagi menjadi 152.251 dan terus bertambah menjadi 153.404 pada 2021.

Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya angka kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 huruf g menyatakan bahwa data kependudukan di tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan hasil verifikasi dan konsolidasi dari kementerian yang menangani urusan dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan keberadaan data ganda. Hal ini bisa terjadi akibat kesamaan identitas seperti nama, perekaman KTP elektronik di lebih dari satu tempat, atau ketidakterlaporannya data kematian. Ketidaksesuaian data juga dapat timbul karena perbedaan data antara instansi terkait, seperti BPS atau PT. Taspen. Proses pembersihan data di tingkat nasional seringkali memicu penyesuaian terhadap jumlah penduduk yang tercatat, sehingga berpengaruh pada fluktuasi angka penduduk resmi yang terdata.

Penurunan jumlah penduduk dan keluarga terjadi sebagai akibat dari proses validasi data kependudukan, yang mencakup penghapusan data warga yang telah pindah dari Kulon Progo serta pemisahan data keluarga bagi individu yang sudah membentuk

rumah tangga baru. Rincian perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepala Keluarga

No.	Tahun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Kepala Keluarga
1	2018	222.014	226.100	448.114	0,47	150.954
2	2019	221.299	225.947	447.246	-0,19	149.976
3	2020	219.505	223.498	443.003	-0,95	152.251
4	2021	219.347	223.527	442.874	-0,03	153.404
5	2022	219.776	223.815	443.591	0,16	155.219

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2023 (diolah) dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan komposisi usia penduduk, terjadi penurunan jumlah anak usia 0–4 tahun pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dari yang semula 25.506 jiwa di tahun 2021 menjadi 19.970 jiwa. Di sisi lain, jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun) mengalami peningkatan, yaitu dari 300.743 jiwa pada tahun 2021 menjadi 303.633 jiwa pada tahun 2022. Rincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Batasan Umur di Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2018 – 2022

No.	Kelompok Umur	<u>Tahun</u>				
		2018	2019	202	2021	2022
1	0 – 4	27.165	26.941	26.372	25.506	25.641
2	5 – 9	32.147	30.770	30.322	29.933	29.300
3	10 – 14	31.861	31.783	32.377	32.561	32.342
4	15 – 19	32.414	31.931	31.299	31.065	31.168
5	20 – 24	32.313	32.179	32.480	32.196	31.742
6	25 – 29	28.713	29.946	30.860	31.666	31.675
7	30 – 34	28.972	27.870	27.403	27.656	28.295
8	35 – 39	32.363	31.790	31.787	30.829	29.597
9	40 – 44	30.749	31.593	31.412	31.665	32.197
10	45 – 49	31.892	29.961	30.280	30.589	30.303
11	50 – 54	31.328	32.365	31.457	31.153	31.028
12	55 – 59	28.222	27.975	28.167	28.725	29.460
13	60 – 64	22.368	24.008	24.949	25.199	25.972
14	65 – 69	17.189	18.094	18.366	19.049	19.598
15	70 – 74	13.419	13.561	12.984	13.261	13.954
16	>75	25.942	26.479	22.488	21.821	21.319
	Jumlah	447.057	447.246	443.003	442.874	443.591

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, tahun 2022
dalam RAT Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2022, proporsi penduduk perempuan di Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 50,46%, sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang mencakup 49,54% dari total populasi. Perbandingan ini menunjukkan kestabilan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada paruh pertama tahun 2021, rasio jenis kelamin (sex ratio) berada di angka 98,19, yang berarti terdapat sekitar 98 pria untuk setiap 100 wanita. Informasi

lebih lanjut mengenai jumlah penduduk berdasarkan sex ratio dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Data Sex Ratio Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	<i>Sex Ratio</i>
2018	221.510	225.547	447.057	98,21%
2019	221.299	225.947	447.246	97,94%
2020	219.505	223.498	443.003	98,21%
2021	219.347	223.527	442.874	98,12%
2022	219.776	223.815	443.591	98,19%

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, tahun 2022 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

3. Aspek kesejahteraan masyarakat

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi

Pengembangan ekonomi di suatu wilayah tidak semata-mata berfokus pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, namun juga harus diarahkan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita, meskipun indikator ini belum sepenuhnya mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan di antara penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfungsi sebagai salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Secara umum, PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas usaha dalam suatu daerah, atau dapat pula diartikan sebagai akumulasi nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit ekonomi di wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah mampu mengelola serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimilikinya dalam menghasilkan output barang dan jasa. Besar kecilnya PDRB dipengaruhi oleh pemanfaatan potensi faktor produksi seperti sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, permodalan, pemanfaatan teknologi, dan jiwa kewirausahaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Kulon Progo, dinamika kegiatan ekonominya tercermin melalui PDRB, baik dalam bentuk nilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2019, kemudian menurun pada 2020, dan kembali menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 3. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	PDRB (milyar rupiah)	10.312,52	11.996,40	11.655,13	12.443,06	14.303,54
2	Jumlah Penduduk (ribuan orang)	447,06	447,25	443,00	442,87	443,59
3	PDRB Perkapita (ribu rupiah)	23.067,42	26.822,58	26.309,55	28.096,42	32.244,95

Sumber data: Tabel Statustik BPS, 2022 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024 (*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara)

Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil tercermin melalui data PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, angka tersebut menunjukkan peningkatan, dari 23,06 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 32,24 juta rupiah pada tahun 2022.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mendorong peningkatan nilai PDRB per kapita secara bertahap. Hal ini turut membentuk pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada konfigurasi pasar domestik di Kabupaten Kulon Progo. Naiknya PDRB per kapita idealnya diimbangi dengan kemampuan pasar lokal dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian wilayah. Tren pertumbuhan PDRB yang positif di Kulon Progo

mengindikasikan adanya peluang pasar yang besar. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar potensi ekonomi tidak terus mengalir keluar daerah, yang selama ini terjadi karena keterbatasan jenis dan ketersediaan produk di pasar lokal.

b. Struktur perekonomian daerah

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Kulon Progo masih bertumpu pada empat sektor utama, yakni sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran beserta Jasa Reparasi Kendaraan Bermotor. Dominasi ini tercermin dari kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Pada tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 15,57% terhadap PDRB, mengalami penurunan dari 16,4% di tahun sebelumnya. Sektor Perdagangan dan Reparasi Kendaraan mencatatkan kontribusi sebesar 12,31%, turun tipis dari 12,42% pada 2021. Sektor Konstruksi pun menunjukkan penurunan dari 16,64% menjadi 15,57%. Sementara itu, kontribusi sektor Industri Pengolahan juga menurun dari 11,10% menjadi 10,34%. Di sisi lain, sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, dari 7,5% pada 2018 meningkat menjadi 12,18% pada 2022.

Tabel 3. 6 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022 (%)

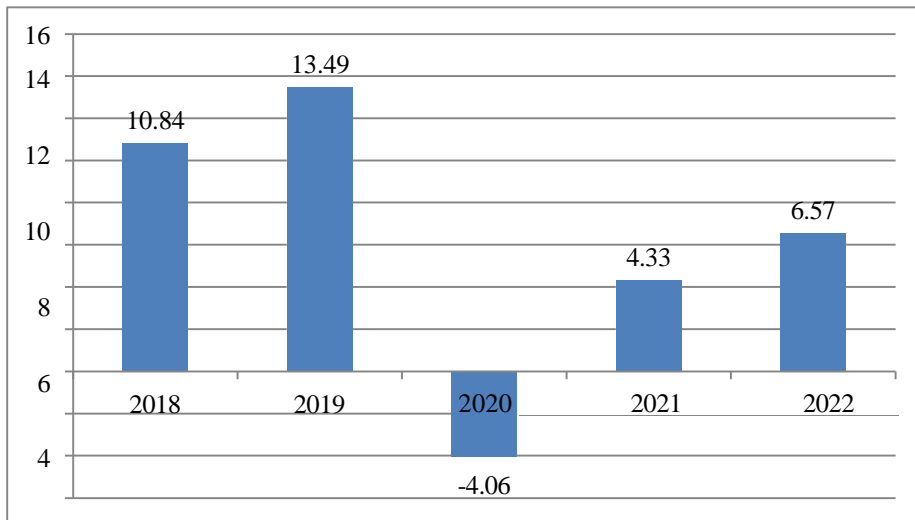
Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,62	15,86	16,81	16,4	15,57
Pertambangan dan Penggalian	1,64	1,48	1,44	1,35	1,25
Industri Pengolahan	12,02	11,08	11,20	11,10	10,34
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Konstruksi	13,34	19,95	16,84	16,64	15,57
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,46	12,36	12,74	12,42	12,31
Transportasi dan Pergudangan	7,5	7,54	7,75	7,92	12,18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,67	3,44	3,65	3,37	3,81
informasi dan Komunikasi	4,74	4,29	5,16	6,01	5,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07	2,89	2,83	2,83	2,84
Real Estate	3,21	2,99	3,22	3,33	2,96
Jasa Perusahaan	0,26	0,24	0,27	0,28	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jminan Sosial Wajib	8,8	8,01	8,15	7,75	7,21
Jasa Pendidikan	5,55	5,1	5,45	5,44	5,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	1,29	1,63	1,62	1,55
Jasa Lainnya	3,51	3,27	2,84	3,16	3,30
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber data: Tabel Statistik BPS, 2022 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024 (*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara)

c. Laju pertumbuhan ekonomi

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonominya. Indikator ini diperoleh dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa oleh seluruh sektor kegiatan ekonomi dalam kurun waktu satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga mencapai -4,06 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penurunan ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Kendati demikian, kondisi tersebut mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya, ditandai dengan pertumbuhan sebesar 4,33 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 6,57 persen pada 2022.



Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (%)

Sumber data: BPS, 2023 (diolah) dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2019, sektor konstruksi mencatatkan laju pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 69,08 persen. Sementara itu, seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2022, dengan peningkatan signifikan terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 31,76 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman yang tumbuh sebesar 12,73 persen.

Tabel 3. 7 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(2022) menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.56	1.72	0,61	1,62	1,86
2	Pertambangan dan Penggalian	26.64	3.26	-8,56	-2,29	1,33
3	Industri Pengolahan	7.90	5.42	-3,55	1,72	2,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.90	8.06	-1,27	1,85	6,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.84	8.43	2,07	3,89	4,32
6	Konstruksi	59.73	69.08	-18,44	3,11	3,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7	5.19	-1,59	1,56	6,45
8	Transportasi dan Pergudangan	6.97	10.48	-2,47	6.47	31,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.03	8.05	-5,13	10.46	12,73
10	Informasi dan Komunikasi	7.33	5.56	17,17	21.53	5,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.44	7.79	-4,88	1.36	5,43
12	Real Estate	5.51	4.96	4,65	1.04	2,93
13	Jasa Perusahaan	5.87	5.05	2,58	7.90	6,97
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.35	3.42	-3,26	-1.96	2,89
15	Jasa Pendidikan	5.49	4.56	1,24	4.36	1,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.67	5.61	18,27	4.29	4,56
17	Jasa Lainnya	5.98	6.56	-16,28	16.22	13,94

	Produk Domestik Regional Bruto	10.84	13.49	-4,06	4.33	6,57
--	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

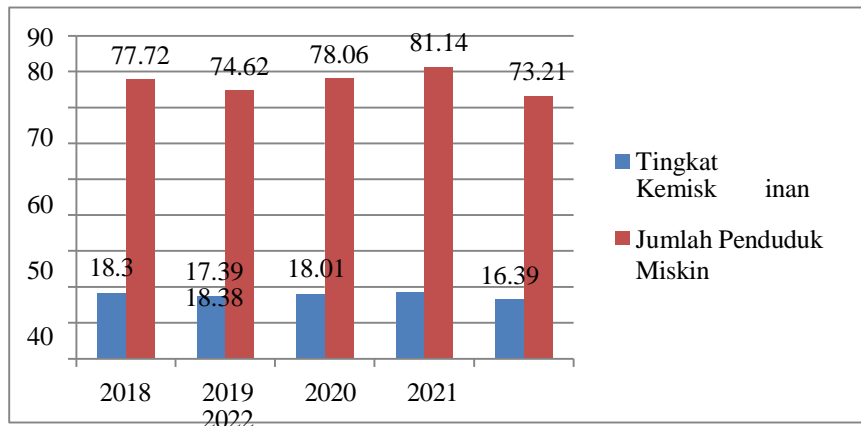
Sumber data: Tabel Statistik BPS, 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024 (*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara)

4. Kondisi kemiskinan

a. Dimensi ekonomi

1) Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan

Ilustrasi mengenai perubahan jumlah penduduk miskin serta persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dapat diamati melalui visualisasi pada gambar berikut.



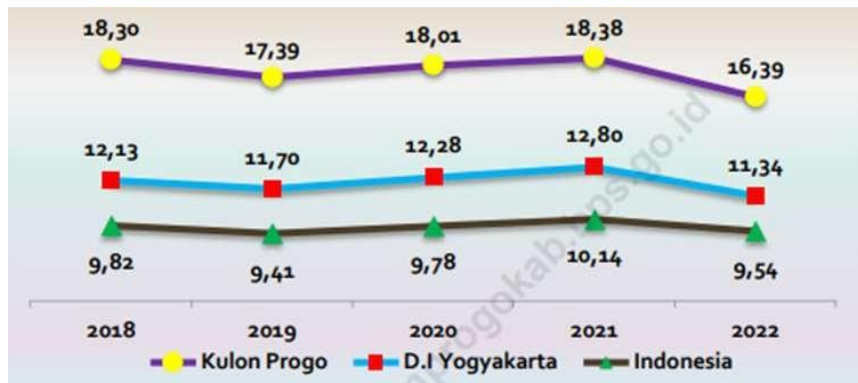
Gambar 3. 4 Grafik Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) Kab Kulon Progo Th 2018-2022
Sumber data: BPS 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Jumlah penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, yaitu dari 77.720 menjadi 74.620 jiwa. Penurunan ini juga

tercermin pada persentase penduduk miskin yang berkurang sebesar 0,91 persen, menjadi 17,39% pada tahun 2019. Namun demikian, tren ini berbalik pada periode 2020 hingga 2021, ketika angka kemiskinan kembali meningkat dari 18,01% menjadi 18,38%, dengan jumlah penduduk miskin bertambah dari 78.060 menjadi 81.140 jiwa. Kenaikan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Memasuki tahun 2022, tingkat kemiskinan kembali menurun secara signifikan menjadi 16,39%, mencatatkan penurunan tertinggi di antara kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Perbandingan antar wilayah

Jika dibandingkan dengan empat kabupaten dan satu kota lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Namun, apabila dilihat dari sisi jumlah absolut penduduk miskin, Kabupaten Kulon Progo justru berada di urutan kedua terendah di antara seluruh kabupaten/kota di DIY. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 5 Grafik Tingkat Kemiskinan Kab. Kulon Progo, DIY, dan Indonesia Tahun 2018-2022

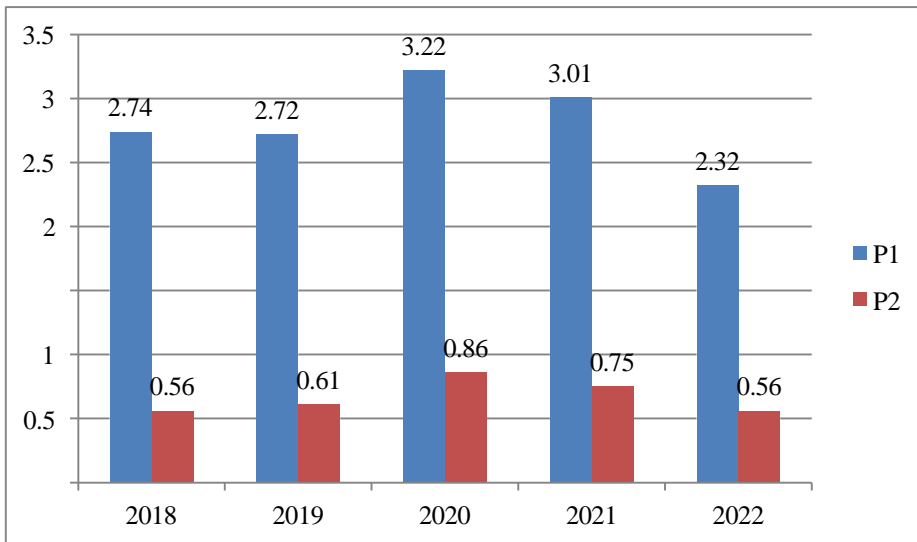
Sumber data: Susenas 2022, diolah dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

3) Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

Permasalahan kemiskinan tidak semata-mata dilihat dari jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat aspek penting lainnya yang juga perlu menjadi perhatian, yaitu kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P1) serta tingkat keparahannya (*poverty severity*, P2). Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan idealnya juga diarahkan untuk menurunkan kedua indikator tersebut.

Tahun 2022 mencatat penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,69 poin hingga mencapai angka 2,32. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kondisi kesejahteraan, ditandai dengan semakin kecilnya jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya, tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang membaik.

Sementara itu, tingkat keparahan kemiskinan di wilayah yang sama selama periode 2018 hingga 2022 berkisar di angka 0,56. Meskipun secara umum mengalami tren kenaikan pada kurun waktu tersebut yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin namun pada tahun 2021 dan 2022, indeks ini mengalami penurunan kembali. Pada 2022, angka keparahan turun ke level 0,56, yang mencerminkan terjadinya perbaikan dalam hal pemerataan pengeluaran di kalangan penduduk miskin.



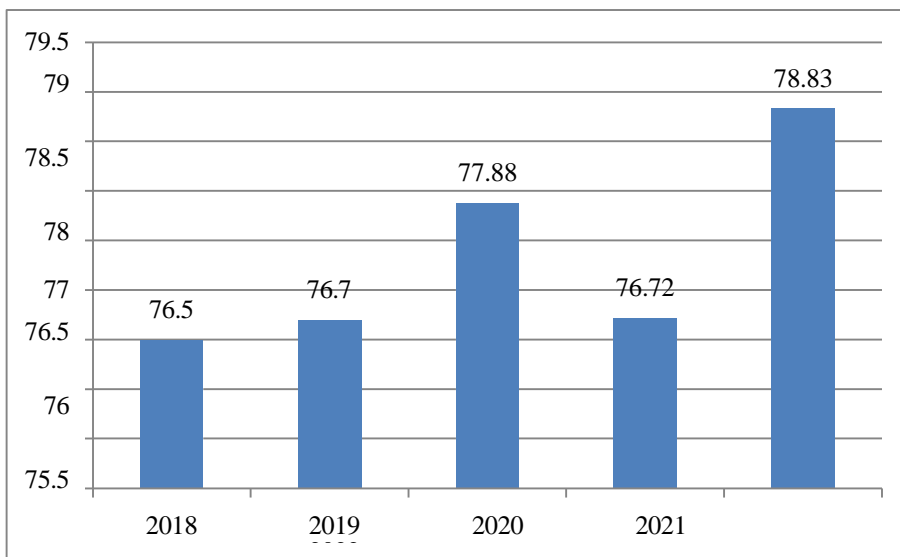
Gambar 3. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2022

Sumber data: BPS 2023, diolah dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

b. Dimensi ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo dapat ditinjau melalui sejauh mana penduduk terlibat dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam hal kontribusi mereka sebagai tenaga kerja dalam proses produksi barang dan jasa. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk melihat aspek ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, dinamika sektor ketenagakerjaan juga tercermin melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase penduduk berusia 15 hingga 55 tahun yang secara aktif mencari pekerjaan dalam periode waktu tertentu terhadap keseluruhan jumlah angkatan kerja.

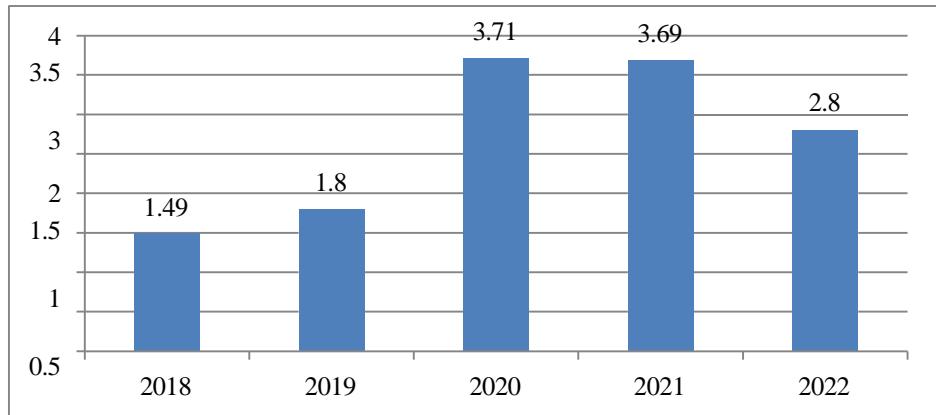
Pada rentang tahun 2018 hingga 2020, TPAK di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Meskipun sempat menurun pada tahun 2021, angka tersebut kembali naik di tahun 2022, dari sebelumnya 76,72 menjadi 78,83.



Gambar 3. 7 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022

Sumber data: Dokumen BPS 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kabupaten Kulon Progo mencatat adanya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode 2018 hingga 2020. Namun, tren tersebut berbalik arah mulai tahun 2020 hingga 2022, di mana terjadi penurunan TPT. Penurunan tersebut tercatat sebesar 0,02% dari tahun 2020 ke 2021, dan sebesar 1,01% dari 2021 ke 2022.



Gambar 3. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2018-2022

Sumber data: Dokumen BPS 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

c. Dimensi pendidikan

Kondisi dimensi pendidikan pada kurun waktu 2018-2022, penduduk Kabupaten Kulon Progo umumnya didominasi yang berstatus pendidikan SMA/ sederajat, diikuti dengan yang berstatus pendidikan SD/ sederajat.

Tabel 3. 8 Penduduk Kabupaten Kulon Progo Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022

No.	Status Pendidikan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tidak/belum sekolah	82.908	79.914	76.976	76.495	75.477
2.	Tidak tamat SD/ sederajat	43.105	42.809	41.732	40.850	39.867
3.	SD/ sederajat	99.860	97.458	93.041	90.722	88.575
4.	SMP/ sederajat	72.150	72.448	72.688	73.272	73.688
5.	SMA/ sederajat	120.305	124.059	126.870	128.848	131.934
6.	Diploma I/II	2.645	2547	2.475	2.405	2.405
7.	Diploma III/ Sarjana Muda	6.641	6.918	7.114	7.282	7.519
8.	S-1	18.581	20.101	21.022	21.828	22.864
9.	S-2	817	947	1038	1.123	1.210
10.	S-3	45	45	47	49	52

Sumber data : Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, Tahun 2022 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

d. Dimensi kesehatan

Dimensi kesehatan dapat dilihat dari capaian indikator-indikator berikut:

Tabel 3. 9 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan tahun 2018-2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,12	75,20	75,24	75,27	75,28
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	58,99	102,99	63,61	222,17	194,69
	<i>Kematian Ibu</i>	<i>Kasus</i>	3	5	3	10	8
	<i>Kelahiran hidup</i>	<i>Kali</i>	5.086	4.855	4.716	4.501	4.109
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	8,45	9,68	11,07	12,00	10,71
	<i>Kematian Bayi</i>	<i>Kasus</i>	42	47	38	54	44
	<i>Kelahiran hidup</i>	<i>Kali</i>	5.086	4.855	4.716	4.501	4.109

Sumber data: Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo, 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 3.9 menggambarkan 2 indikator yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi tahun 2022 mengalami penurunan, dan Angka Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

e. Dimensi ketahanan pangan

Kinerja ketahanan pangan diukur dengan capaian pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Keadaan Produksi Beras

No.	Jenis/Macam	2021	2022
1	Produksi Padi (ton)	125.990,63	130.112,00
2	Produksi Beras (ton)	72.190	74.397,43
3	Kebutuhan Beras (ton)	36.428	36.182
4	Surplus Beras (ton)	35.762	80.632
5	Ketersediaan pangan energi (kalori/kapita/tahun)	3.264	3.418
6	Jumlah Jiwa	459.949	443.591
7	Kebutuhan Beras/Kapita/Tahun	79,20	79,20
8	Pola Pangan Harapan (standar: 2.200 kk/kapita/th)	92,6	92,3

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan pada produksi padi, produksi beras, surplus beras, serta ketersediaan pangan energi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai Pola Pangan Harapan (PPH) justru menunjukkan penurunan, seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk di tahun yang sama. Informasi mengenai ketersediaan pangan berdasarkan kelompok bahan makanan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 11 Ketersediaan Pangan Berdasarkan Jenis Bahan
Makanan Untuk Konsumsi Penduduk Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022 Per Kapita

No.	Jenis Bahan Makanan	Energi (kkal/hari)	Protein (gr/hari)	Lemak (gr/hari)
1	Padi-padian	276,85	48,26	11,07
2	Makanan berpati	380,07	4,74	0,85
3	Gula	28,00	0,01	0,04
4	Buah/Biji berminyak	503,10	12,89	9,38
5	Buah-buahan	171,66	2,39	1,76
6	Sayur-sayuran	180,48	14,14	3,54
7	Daging	50,55	3,61	3,11
8	Telur	8,93	0,40	0,43
9	Susu	1,24	0,06	0,07
10	Ikan	56,20	14,63	1,26
11	Minyak/Lemak	66,48	0,45	45,89
12	Lemak	2,93	1,05	0,41

Sumber data : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kapanewon rawan pangan sudah tidak ada di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2021, selengkapnya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 12 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022

No.	Kapanewon	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1.	Temon	0	0	0	0	0	Aman
2.	Wates	0	0	0	0	0	Aman
3.	Panjatan	0	0	0	0	0	Aman
4.	Galur	0	0	0	0	0	Aman
5.	Lendah	0	0	0	0	0	Aman
6.	Sentolo	0	0	0	0	0	Aman
7.	Pengasih	0	0	0	0	0	Aman
8.	Kokap	1	1	1	0	0	Aman
9.	Girimulyo	0	0	0	0	0	Aman
10.	Nanggulan	0	0	0	0	0	Aman
11.	Kalibawang	0	0	0	0	0	Aman
12.	Samigaluh	2	2	2	0	0	Aman
	Jumlah	3	3	3	0	0	Aman

Sumber data: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, 2023 dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

B. Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

1. Kondisi umum daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pusat administrasinya berada di kota Pangkalan Bun. Daerah ini memiliki luas sekitar 10.759 km², yang mencakup kurang lebih 6,2% dari keseluruhan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, kabupaten ini terdiri atas enam kecamatan.

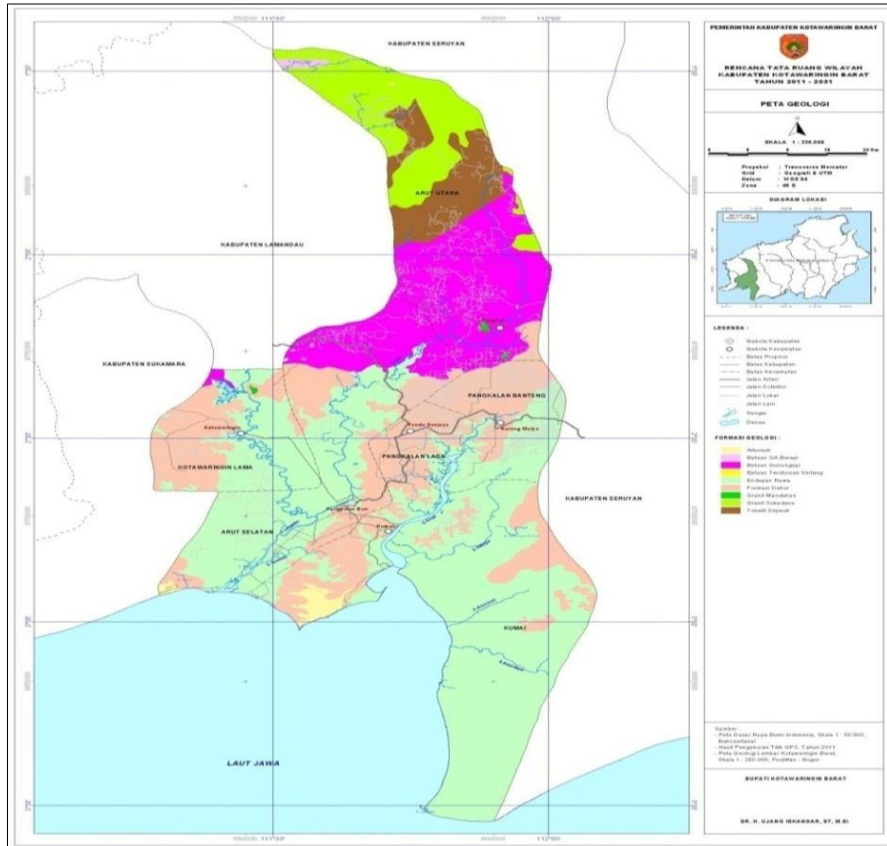
Tabel 3. 13 Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
2. Arut Selatan	2.400	22,31
3. Kumai	2.921	27,15
4. Pangkalan Banteng	1.306	12,14
5. Pangkalan Lada	229	2,13
6. Arut Utara	2.685	24,96
Jumlah	10.759	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotawaringin Barat tahun 2017–2037, wilayah ini secara geografis terletak di antara 1°26' hingga 3°33' Lintang Selatan dan 111°20' sampai 112°6' Bujur Timur. Dalam konteks administrasi kewilayahan, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki batas-batas sebagai berikut: bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamandau, sisi selatan berbatasan dengan perairan Laut

Jawa, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Seruyan dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.



Gambar 3. 9 Peta Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau memiliki karakteristik mudah tergenang, berawa, serta merupakan kawasan dengan endapan tanah yang bersifat organik dan cenderung asam. Berdasarkan tingkat kemiringan lahan, sebagian besar wilayah ini

cocok untuk kegiatan pertanian apabila ditunjang oleh faktor-faktor lainnya.

Secara umum, sungai memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian tetapi juga sebagai jalur transportasi. Hal yang sama berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat, di mana sungai menjadi infrastruktur vital dalam mendukung mobilitas masyarakat.

Tabel 3. 14 Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

2. Demografi

Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebanyak 263.786 jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 9,99% dari total populasi Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah 2.669.969 jiwa. Berdasarkan persentase tersebut, Kotawaringin Barat berada di posisi keempat sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi ini, setelah Kota Palangka Raya. Rincian mengenai dinamika pertumbuhan penduduk wilayah ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 15 Jumlah Penduduk Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021

No .	Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuh an 2017- 2021
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	KUMAI	47.900	48.249	49.552	49.906	52.489	2,31
2	ARUT SELAT AN	106.77 9	109.11 8	111.24 8	112.02 5	116.17 5	2,13
3	KTW LAMA	16.966	17.294	17.283	17.318	18.636	2,37
4	ARUT UTAR A	9.117	7.769	7.811	7.800	8.363	-2,13
5	P.LADA	33.085	34.278	34.443	34.545	35.402	1,71
6	P.BANTEN G	32.679	33.333	33.544	33.752	35.714	2,25
		246.52 6	250.04 1	253.88 1	255.34 6	266.77 9	1,99

Sumber : Data Agregat Kependudukan 2017,2018,2019, 2020, 2021

Pada pertengahan tahun 2021, di Kabupaten Kotawaringin Barat jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,99%, yaitu dari 246.526 jiwa pada tahun 2017 menjadi 266.779 jiwa di tahun 2021. Dalam periode 2017 hingga 2021, Kecamatan Kotawaringin Lama mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 2,37%. Sebaliknya, Kecamatan Arut Utara justru mengalami penurunan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan negatif sebesar 2,13%. Informasi terkait rasio jenis kelamin dan total jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio
Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		laki- laki	perempuan	total	
1	KUMAI	26.966	25.523	52.489	106
2	ARUT SELATAN	59.164	57.011	116.175	104
3	KOTAWARINGIN LAMA	9.636	9.000	18.636	107
4	ARUT UTARA	4.430	3.933	8.363	113
5	PANGKALAN LADA	18.310	17.092	35.402	107
6	PANGKALAN BANTENG	18.718	16.996	35.714	110
KOTAWARINGIN BARAT		137.224	129.555	266.779	106

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021

Secara umum, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kondisi ini tercermin dari nilai Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) yang konsisten menunjukkan angka di atas 100. Pada tahun 2021, misalnya, terdapat 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Angka rasio tertinggi ditemukan di Kecamatan Arut Utara, yang mencatat 113 laki-laki per 100 perempuan, mengindikasikan ketimpangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang cukup mencolok di wilayah tersebut.

Sementara itu, data mengenai distribusi penduduk menurut kelompok umur serta tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 17 Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021

No. Urut	Umur	Kabupaten Kotawaringin Barat			Rasio Jenis Kelamin	Prosentase terhadap jumlah penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	0-4 Th	9.717	9.134	18.851	106	7,07
2	5-9 Th	13.338	12.491	25.829	107	9,68
3	10-14 Th	13.676	12.550	26.226	109	9,83
4	15-19 Th	9.346	8.886	18.232	105	6,83
5	20-24 Th	11.507	11.062	22.569	104	8,46
6	25-29 Th	10.626	10.697	21.323	99	7,99
7	30-34 Th	10.457	10.816	21.273	97	7,97
8	35-39 Th	11.622	12.155	23.777	96	8,91
9	40-44 Th	11.788	11.055	22.843	107	8,56
10	45-49 Th	10.459	9.471	19.930	110	7,47
11	50-54 Th	8.384	7.259	15.643	115	5,86
12	55-59 Th	6.247	5.605	11.852	111	4,44
13	60-64 Th	4.403	3.653	8.056	121	3,02
14	65-69 Th	2.721	2.198	4.919	124	1,84
15	70-74 Th	1.480	1.202	2.682	123	1,01
16	>74 Th	1.453	1.321	2.774	110	1,04
JUMLAH		137.224	129.555	266.779	106	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

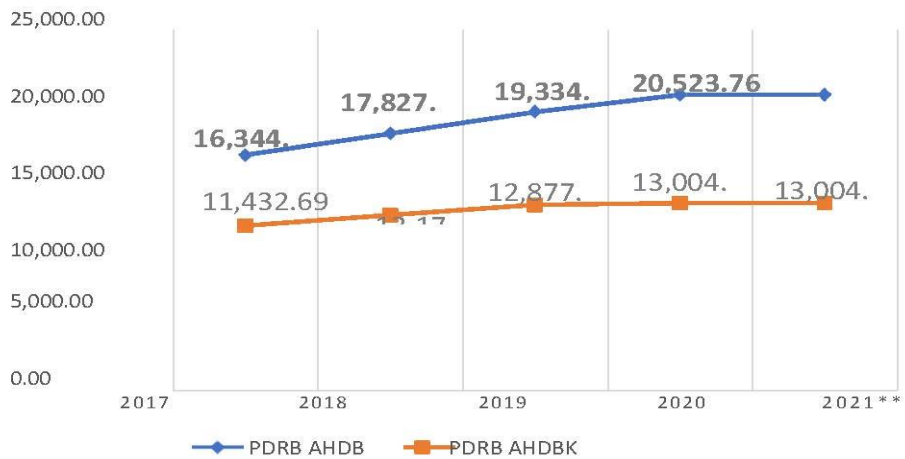
Pada semester I tahun 2021, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kotawaringin Barat secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan perempuan. Kelompok usia 65–69 tahun mencatat

rasio jenis kelamin tertinggi, yakni terdapat 124 laki-laki untuk setiap 100 perempuan dalam kelompok usia tersebut.

3. Aspek kesejahteraan masyarakat

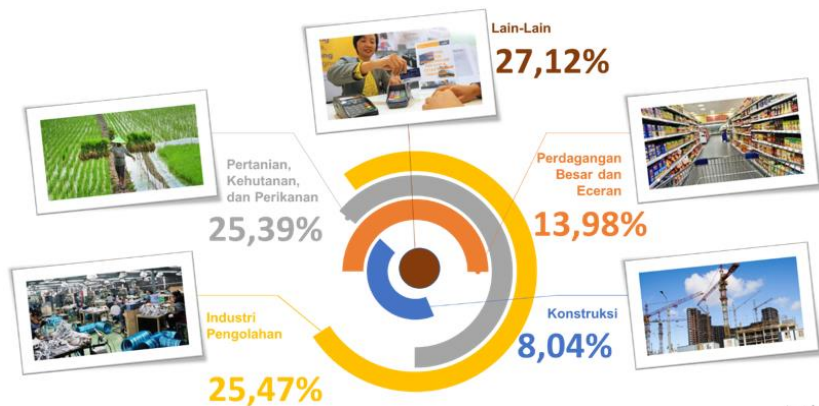
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan harga berlaku (ADHB) dengan acuan Seri Tahun Dasar 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Berdasarkan struktur sektoralnya, pada tahun 2021 sektor Industri Pengolahan tercatat sebagai kontributor utama terhadap total PDRB, dengan andil sebesar 25,47%. Posisi selanjutnya ditempati oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 25,39%. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan Bermotor berada di peringkat ketiga dengan sumbangan 13,98%. Adapun data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) memperlihatkan adanya tren pertumbuhan yang stabil dan positif dari tahun ke tahun.



Gambar 3. 10 PDRB kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017 – 2021

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021



Gambar 3. 11 Empat Besar PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kontribusi terbesar tahun 2021

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021

b. Struktur perekonomian daerah

Struktur perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengalami perubahan yang cukup mencolok, dari dominasi sektor pertanian ke arah peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan. Saat ini, penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah ini adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor perdagangan besar dan eceran termasuk layanan perbaikan kendaraan. Besarnya peran ketiga sektor tersebut tidak terlepas dari pemanfaatan lahan kelapa sawit yang cukup luas, baik oleh masyarakat setempat maupun perusahaan-perusahaan swasta berskala besar. Keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar turut mendorong pertumbuhan industri pengolahan, khususnya sawit, meskipun hasil produksinya saat ini masih terbatas pada produk dasar seperti minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng. Selain itu, daerah ini juga dikenal memiliki sejarah panjang dalam pengolahan hasil hutan, yang hingga kini tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

c. Laju pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan kegiatan fiskal di suatu wilayah, yang terlihat dari peningkatan jumlah industri, pertumbuhan output pada berbagai sektor ekonomi, serta bertambahnya infrastruktur seperti sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, juga mencakup peningkatan hasil dari aktivitas ekonomi yang sudah ada maupun perkembangan lain yang terjadi di daerah tersebut.

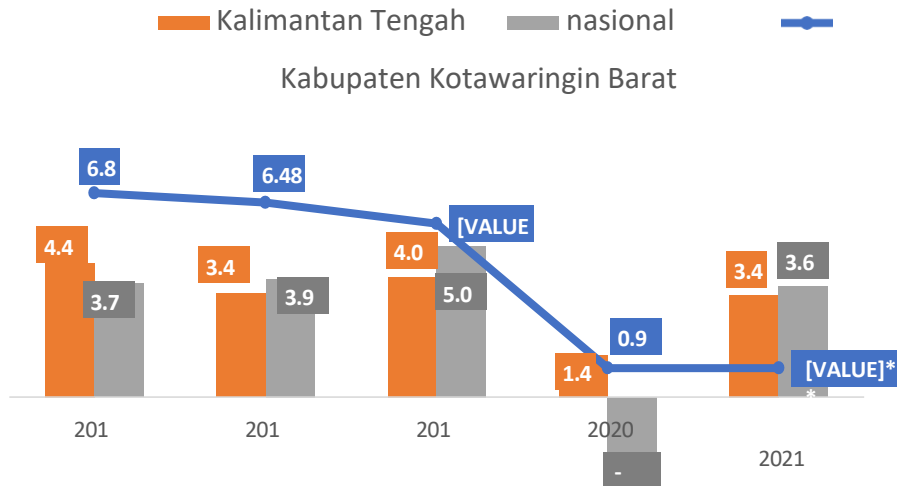
Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencerminkan rata-rata pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang dihitung secara tertimbang. Dengan demikian, jika sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB mengalami perlambatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dapat ikut melambat. Sebaliknya, pertumbuhan pesat pada sektor utama akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, perubahan kecil sekalipun dalam sektor-sektor kunci akan berdampak besar terhadap total pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Kinerja ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat dapat ditelusuri melalui laju pertumbuhan pada tiap kategori usaha. Dalam lima tahun terakhir, sektor-sektor pembentuk PDRB di kabupaten ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup beragam.

Secara garis besar, dinamika pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Pertama, sejumlah sektor berhasil menunjukkan kinerja positif meskipun dihadapkan pada tantangan krisis global dan pandemi Covid-19. Sektor-sektor tersebut mencakup konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan termasuk pertahanan serta program jaminan sosial; dan layanan kesehatan beserta kegiatan sosial. Kedua, terdapat sektor-sektor yang mengalami perlambatan namun tetap tumbuh secara positif selama masa krisis dan pandemi, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri manufaktur; distribusi listrik

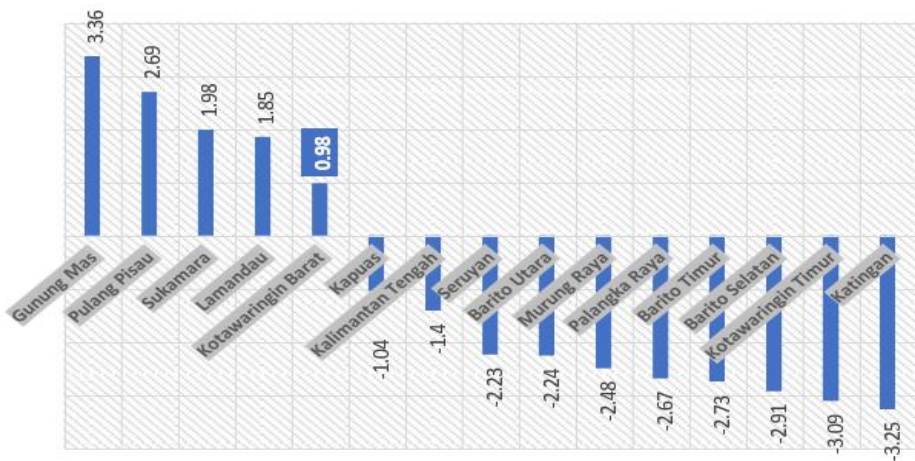
dan gas; perdagangan grosir maupun eceran; serta sektor properti. Ketiga, beberapa sektor justru mengalami kontraksi dengan laju pertumbuhan negatif sebagai dampak langsung dari krisis dan pandemi, antara lain sektor pertambangan dan penggalian; layanan air bersih, pengelolaan limbah, serta daur ulang; sektor transportasi dan logistik; usaha akomodasi serta makanan dan minuman; sektor teknologi informasi dan komunikasi; jasa profesional; sektor pendidikan; dan layanan sosial lainnya.

Walaupun menghadapi tekanan akibat krisis dan pandemi, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama rentang waktu 2017 hingga 2021 tetap mencatatkan nilai positif sebesar 0,98%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, tumbuh sebesar 26,67%, dipicu oleh kebutuhan layanan kesehatan selama pandemi. Sebaliknya, sektor dengan pertumbuhan paling rendah adalah jasa lainnya, yang mengalami kontraksi sebesar -32,36%. Perlu dicatat bahwa kondisi perekonomian daerah pada tahun 2019 hingga 2021 dianggap tidak mewakili keadaan normal, sehingga kurang tepat jika dijadikan dasar proyeksi pertumbuhan untuk tahun-tahun selanjutnya karena adanya pengaruh luar biasa dari pandemi Covid-19.



Gambar 3. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat berbanding Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021 (*) Angka sementara **) Angka sangat sementara)



Gambar 3. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, 2021 (*) Angka sementara **) Angka sangat sementara)

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2017. Pada tahun tersebut, pertumbuhan tercatat sebesar 6,8 persen, namun turun menjadi 6,48 persen pada tahun 2018. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2019 dengan angka 5,79 persen, dan mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2021 menjadi hanya 0,98 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2021, Kabupaten Kotawaringin Barat masih menduduki posisi kelima dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan Tengah dan berada di atas rata-rata provinsi. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya kinerja sektor-sektor utama penyumbang ekonomi, khususnya saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 yang menjadi faktor dominan dalam kontraksi ekonomi tersebut.

4. Kondisi kemiskinan

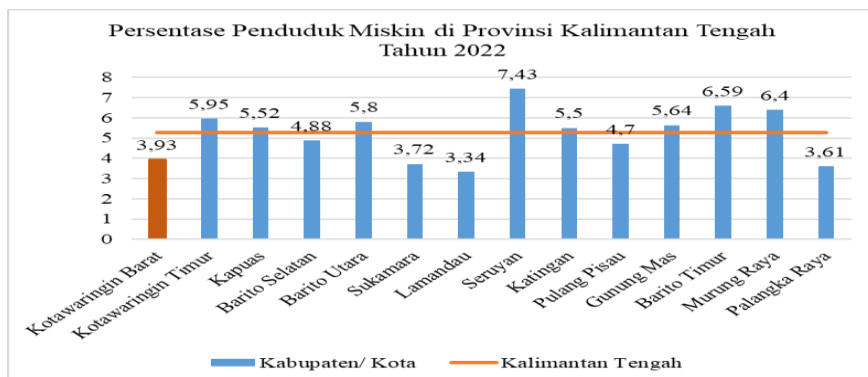
a. Dimensi ekonomi

1) Jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulannya berada di bawah batas Garis Kemiskinan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, ambang batas tersebut ditetapkan sebesar Rp. 476.297,00 per orang per bulan pada tahun 2022.

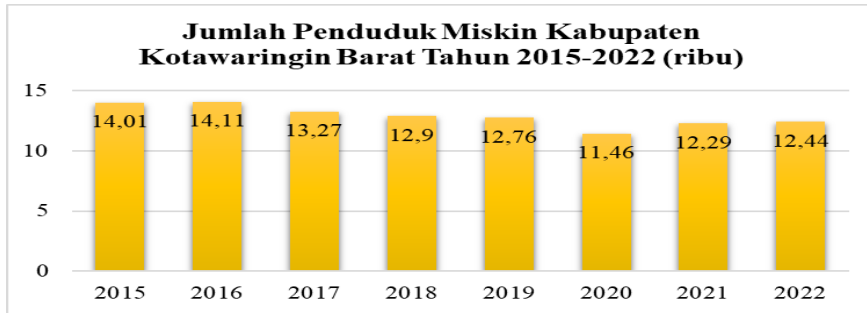
Jika merujuk pada grafik yang tersedia, terlihat bahwa pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dalam angka persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Kotawaringin

Barat, yakni turun sebesar 0,02 persen—dari 3,95 persen di tahun 2021 menjadi 3,93 persen di tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun yang sama, angka tersebut menempatkan Kabupaten Kotawaringin Barat di bawah rata-rata provinsi, atau berada di peringkat ke-11 dari total 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.



Gambar 3. 14 Persentase Penduduk Miskin (P0) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028



Gambar 3. 15 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Berdasarkan data BPS tersebut diatas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat hingga 12,29 ribu jiwa dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 12,44 ribu jiwa.

2) Perbandingan antar wilayah

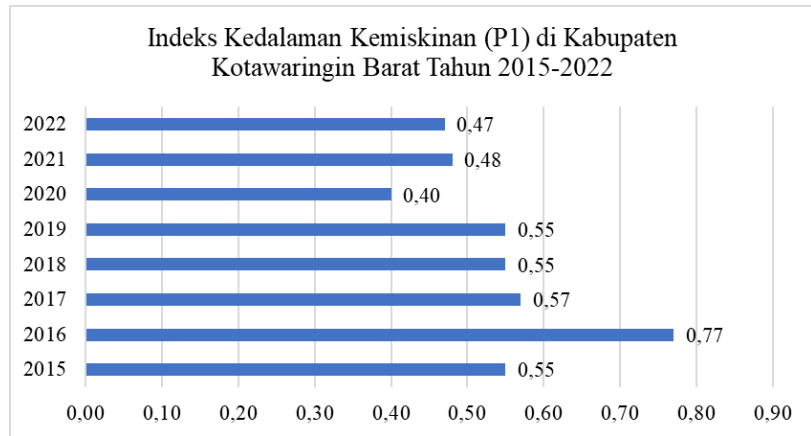
Tabel 3. 18 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021- 2022

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		
		2021	2022	D (selisih)
1	Kotawaringin Barat	12,3	12,4	0,1
2	Kotawaringin Timur	27,1	27,6	0,5
3	Kapuas	19,4	20,2	0,8
4	Barito Selatan	6,4	6,8	0,4
5	Barito Utara	7,4	7,7	0,3
6	Sukamara	2,4	2,5	0,1
7	Lamandau	2,9	2,8	-0,1
8	Seruyan	15,1	16,0	0,9
9	Katingan	9,2	9,7	0,5
10	Pulang Pisau	5,4	6,0	0,6
11	Gunung Mas	6,3	6,7	0,4
12	Barito Timur	8,0	8,4	0,4
13	Murung Raya	7,3	7,7	0,4
14	Palangka Raya	10,9	10,6	- 0,3
	Kalimantan Tengah	140,1	145,1	5,0

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Jika dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari tahun 2021-2022. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri berada di posisi keempat dengan jumlah penduduk miskin mencapai 12,4 ribu jiwa pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 12,3 ribu jiwa penduduk miskin.

3) Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

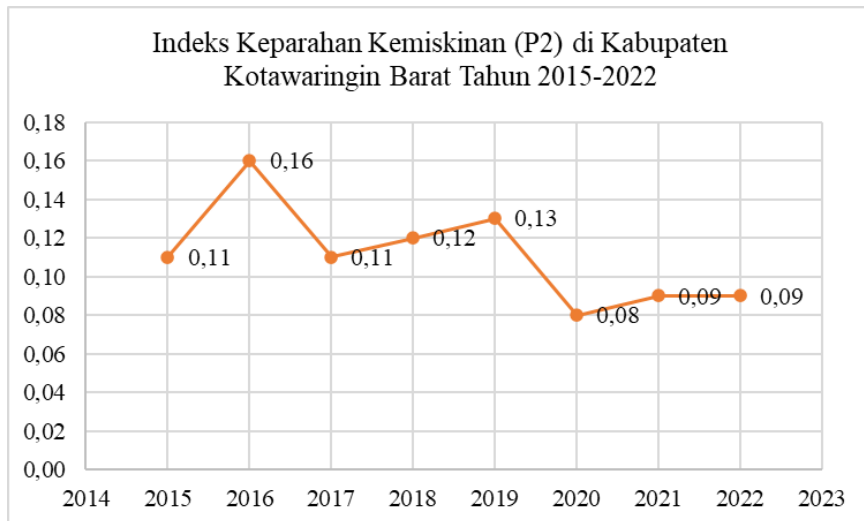


Gambar 3. 16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa fluktuasi nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2015 hingga 2022 cukup signifikan. Pada tahun 2016, indeks menunjukkan peningkatan hingga mencapai angka 0,77, namun kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun berikutnya. Selama tahun 2018 hingga 2019, nilai indeks tersebut cenderung stabil di angka 0,55. Penurunan kembali terjadi secara signifikan pada tahun 2020, ketika nilai indeks turun menjadi 0,40. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi peningkatan, meskipun pada tahun 2022 kembali turun menjadi 0,47. Hal ini mencerminkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat

Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mendekati batas garis kemiskinan.



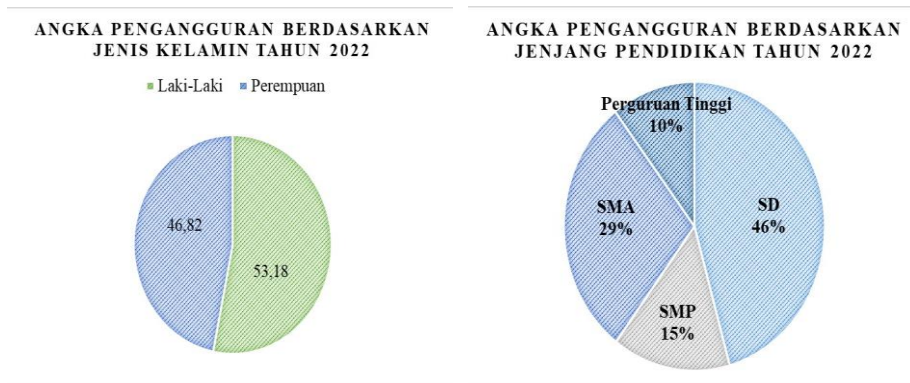
Gambar 3. 17 Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Berdasarkan informasi dari BPS, tingkat keparahan kemiskinan (Indeks P2) di Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2015 hingga 2022 menunjukkan pola yang tidak stabil. Penurunan signifikan terjadi antara tahun 2018 dan 2019, di mana indeks turun menjadi 0,08. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan nilai indeks menjadi 0,09, dan kondisi tersebut tidak mengalami perubahan pada tahun berikutnya.

b. Dimensi ketenagakerjaan

Angka Pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diketahui berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Berdasarkan BPS Tahun 2022, berikut adalah Angka Pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



Gambar 3. 18 Angka Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kotawaringin Barat Tahun 2022
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa angka pengangguran perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Angka pengangguran laki-laki sebesar 46,82% atau sebanyak 3.528 jiwa dan angka pengangguran perempuan sebesar 53,18% atau sebanyak 4.007 jiwa. Sedangkan, jika dinilai berdasarkan jenjang pendidikan, angka pengangguran terbanyak adalah pada jenjang SD sebesar 46% atau sebanyak 3.439 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh jenjang SMA sebesar 29% atau sebanyak 2.212 jiwa, jenjang SMP sebesar 15% atau sebanyak 1.101 jiwa, dan

jenjang perguruan tinggi sebesar 10% atau sebanyak 783 jiwa. Jika ditotal, angka pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 mencapai 7.535 jiwa.

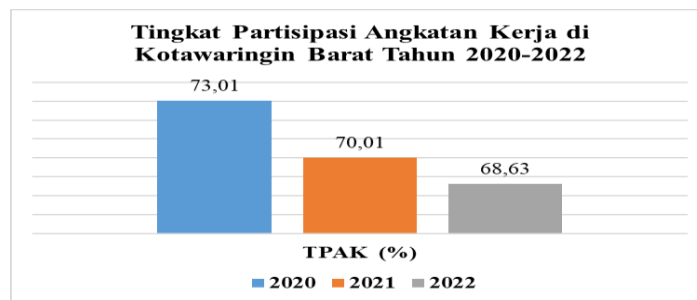
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 mencapai 167.162 jiwa (95,49%) yang mencakup jenjang pendidikan terakhir SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan jumlah bukan angkatan kerja mencapai 76.414 jiwa atau sebesar 68,63%. Dari data tersebut dapat diketahui jumlah pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 mencapai 7.535 jiwa atau 4,5% terhadap jumlah angkatan kerja. Meskipun hanya sebagian kecil penduduk yang menganggur, namun angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, karena tanpa pekerjaan seseorang tidak mampu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang akhirnya akan jatuh pada jurang kemiskinan.

Tabel 3. 19 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		Angkatan Kerja		Persentase terhadap Angkatan Kerja			Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
			Jumlah Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	
	Bekerja	Pengangguran					
SD	62.457	3.439	65.896	94,78	34.385	100.281	65,71
SMP	24.518	1.101	25.619	95,70	23.071	48.690	52,62
SMA	55.715	2.212	57.927	96,18	17.203	75.130	77,10
Perguruan Tinggi	16.937	783	17.720	95,58	1.755	19.475	90,99
Jumlah	159.627	7.535	167.162	95,49	76.414	243.576	68,63

Sumber: BPS, 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

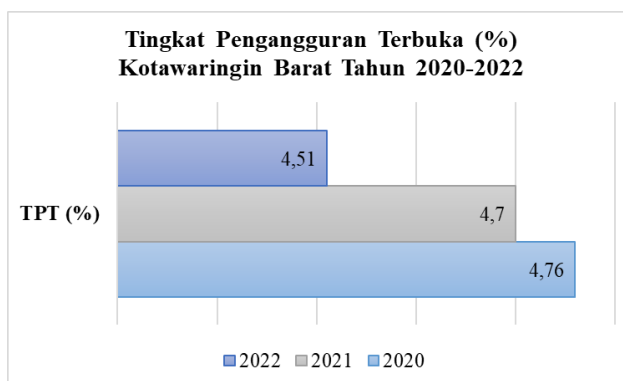
Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebanyak 4,38%. Pada tahun 2020, TPAK di Kotawaringin Barat mencapai 73,01%. Sedangkan pada tahun 2022, nilai TPAK Kotawaringin Barat sebesar 68,63%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan partisipasi penduduk usia 15 tahun ke atas pada kegiatan ekonomi dari tahun 2020- 2022.



Gambar 3. 19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022

Sumber: BPS, 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Salah satu indikator penting dalam menilai tingkat pengangguran di suatu daerah adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berikut adalah TPT pada Tahun 2020-2022 dan TPT menurut Tingkat Pendidikan pada tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat.



Gambar 3. 20 Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%) di Kotawaringin Barat Tahun 2020-2022

Sumber: BPS, 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa TPT di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sepanjang tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 4,76% dan angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2022 mencapai 4,51%. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, angka TPT di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebanyak 0,25%.

Selain itu, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, angka TPT di Kotawaringin Barat tertinggi berada di tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 32,54%. Sedangkan pada tingkat SMP sebesar 24,32%, SMA sebesar 24,35%, SMK sebesar 11,71%, dan universitas sebesar 5,09%. Hal tersebut tentunya menjadi ironi melihat pendidikan yang tinggi ternyata bukan jaminan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Namun hal tersebut juga bisa dikarenakan lulusan universitas tersebut belum menemukan pekerjaan yang sesuai/cocok dengan pendidikannya.

c. Dimensi pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang seharusnya menempuh pendidikan di jenjang tersebut. Berikut ini adalah APK di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 3. 20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022

Tahun	SD/ MI	Jenjang Pendidikan	
		SMP/ MTs/ Sederajat	SMA/ SMK/ MA/ Sederajat
2019	105,43	84,33	73,79
2020	104,16	85,24	74,81
2021	104,70	83,92	79,83
2022	103,22	87,07	81,51

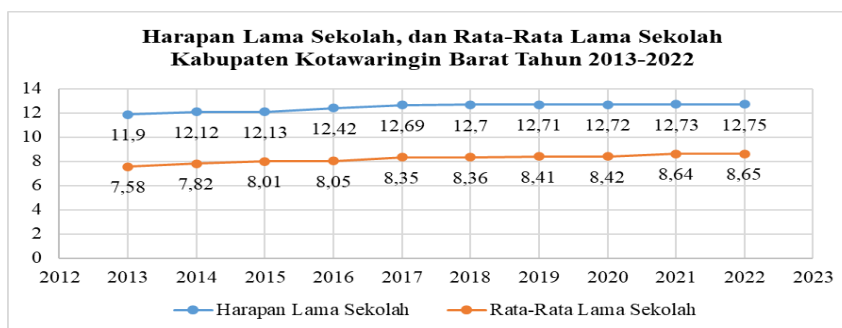
Sumber data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI mengalami penurunan antara tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, APK SD/MI tercatat sebesar 104,70, namun menurun menjadi 103,22 di tahun berikutnya. Artinya, jumlah anak usia sekolah dasar yang terdaftar di jenjang SD/MI mengalami penurunan pada periode tersebut. Sebaliknya, APK jenjang SMP/MTs dan sederajat justru mengalami peningkatan, dari 83,92 pada tahun 2021 menjadi 87,70 pada tahun 2022, setelah sebelumnya sempat turun pada tahun 2020. Kenaikan ini mencerminkan adanya

peningkatan jumlah siswa usia SMP yang melanjutkan pendidikan di tingkat tersebut pada tahun 2022.

Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan sederajat, angka APK menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun, yakni dari 73,79 pada tahun 2019 menjadi 81,51 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak remaja usia sekolah yang mengenyam pendidikan di tingkat menengah atas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sementara itu, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di wilayah tersebut menunjukkan peningkatan secara terus menerus sejak tahun 2013 hingga 2022. Pada tahun 2022, nilai HLS mencapai 12,75 tahun, yang berarti bahwa anak usia 7 tahun yang mulai sekolah pada tahun tersebut diperkirakan memiliki kesempatan menempuh pendidikan selama rata-rata 12,75 tahun—setara dengan pendidikan hingga jenjang Diploma 1.



Gambar 3. 21 Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013-2022
Sumber data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Selain itu, selama periode 2013 hingga 2022, terjadi peningkatan konsisten dalam Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2022, angka tersebut mencapai 8,65 tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah ini umumnya telah menuntaskan jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

d. Dimensi kesehatan

Tabel 3. 21 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan tahun 2018-2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,51	70,59	70,68	70,98
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	276	119	212	346	-
	<i>Kematian Ibu</i>	<i>Kasus</i>	-	7	12	18	-
	<i>Kelahiran hidup</i>	<i>Kali</i>	-	-	-	-	-
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	6,00	5,00	7,51	6,16	-
	<i>Kematian Bayi</i>	<i>Kasus</i>	31	28	-	-	-
	<i>Kelahiran hidup</i>	<i>Kali</i>	4,0	6,0	6,77	7,56	8,4

Sumber data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028, diolah

Tabel 3.21 menunjukkan bahwa usia harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap berada pada kisaran 70 tahun tanpa mengalami peningkatan signifikan. Sementara itu, dalam tiga tahun terakhir, tren angka kematian ibu menunjukkan peningkatan, dan tingkat kematian bayi masih tergolong tinggi.

e. Dimensi ketahanan pangan

Pada tahun 2020, produktivitas tanaman padi (baik sawah maupun ladang) di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebesar 3,95 ton per hektar dalam bentuk gabah kering. Sementara itu, data mengenai produksi tanaman serelia lainnya dapat diketahui melalui tabel luas panen di masing-masing kecamatan.

Tabel 3. 22 Luas Panen Serelia di Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Padi	Sorgum	Jagung	Jagung Muda
Kotawaringin Lama	153,5	1,5	36,2	0,7
Arut Selatan	306,8	0,1	237,9	45,0
Kumai	699,6	-	236,5	-
Pangkalan Banteng	416,9	-	153,9	19,5
Pangkalan Lada	69,3	9,0	141,1	-
Arut Utara	922,3	-	87,4	-
Jumlah	2.568,4	10,6	893,0	65,2

Sumber data: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Tabel 3. 23 Perkembangan Luas Panen Serelia (ton/ha) di Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020

No	Nama Tanaman Pangan	Satuan	Realisasi Tahunan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah (ATAP)	Ton/ Ha	3,57	3,43	3,22	3,11	3,96
2	Padi Ladang (ATAP)	Ton/ Ha	2,01	2,01	3,50	3,60	3,38
3	Padi (ATAP)	Ton/ Ha	3,24	3,20	3,22	3,11	3,95
4	Jagung (ATAP)	Ton/ Ha	3,73	3,92	5,48	5,71	4,42
	Kotawaringin Barat	Ton/ Ha	37,55	41,28	61,15	59,15	56,43

Sumber data: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2020 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Tabel 3. 33 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	2.458 kkal/ kap/ Hr	2.501 kkal/ka p/Hr	2.369 kkal/ka p/Hr	2.528 kkal/ ka p/ Hr	2.512 kkal/ka p/Hr
2	Penguatan Cadangan Pangan	60 ton	60 ton	60 ton	60 ton	60 ton
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Gejolak harga< 25% (100%)	Gejolak harga< 25% (100%)	Gejolak harga< 25% (100%)	Gejolak harga< 25% (100%)	Gejolak harga< 25% (100%)
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	97,3	96,8	97.04	96.5	97.1
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	77,5%	78%	78%	78%	78%
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	10 Desa	5 Desa	3 Desa	2 Desa	2 Desa

Sumber data: RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2028

Tabel tersebut memuat data mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas tujuh indikator utama. Selama empat tahun terakhir, seluruh indikator mengalami tren peningkatan yang positif. Sebagian besar bahkan telah mencapai, bahkan melampaui, target SPM yang ditentukan. Kendati demikian, dua indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) serta Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan masih belum memenuhi target. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf yang menangani urusan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di lingkup Pemerintah Daerah baik di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

- a. Nama : Drs. Jazil Ambar Was'an
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo
- b. Nama : Restu Dewandaru, SE, MM
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo
- c. Nama : Heri Kurniawan, S.IP
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

- Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo
- d. Nama : Muhammad Nur, A.Md
 Jenis kelamin : Pria
 Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Jabatan : Ahli Teknik Bangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
- e. Nama : Andini
 Jenis kelamin : Wanita
 Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Jabatan : Staf Pelaksana Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo
- f. Nama : Dani Pristiawan, M.IP
 Jenis kelamin : Pria
 Status pekerjaan : -
 Jabatan : Kepala Desa/Lurah Salam Rejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
- g. Nama : Muji
 Jenis kelamin : Pria
 Status pekerjaan : -
 Jabatan : Kepala Seksi Kesra Desa Salam Rejo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
- h. Nama : Muhyadi, S.Ag

Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : -
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Desa Banjarsari
Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon
Progo

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

- a. Nama : H. Rody Iskandar, S.Sos, M.Si
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat
- b. Nama : H. Moehammad Daoed, S.Sos
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Barat
- c. Nama : Piet Dono, SE
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Penyuluh Sosia Ahli Muda Dinas Sosial
Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. Nama : Citra Romantika, SE
Jenis kelamin : Wanita
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (BAPPEDALITBANG)
Kabupaten Kotawaringin Barat

- e. Nama : Rabul
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : -
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa
Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten
Kotawaringin Barat
- f. Nama : Ramadhana Sahida, S.STP
Jenis kelamin : Pria
Status pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Lurah Sidorejo Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Formulasi Strategi

Penyusunan strategi melibatkan perumusan visi dan misi, pengkajian terhadap peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal, analisis terhadap kekuatan serta kelemahan dari dalam organisasi, pengembangan berbagai alternatif strategi, serta penetapan strategi tertentu yang akan diimplementasikan. (David & David, 2017). Dalam penelitian ini formulasi strategi dilihat dari pernyataan visi dan misi, pengukuran eksternal, pengukuran internal, serta analisis dan pilihan strategi.

1. Pernyataan Visi dan Misi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pernyataan visi dan misi yang dirancang secara tepat memiliki peran penting dalam merumuskan, menjalankan, dan menilai strategi organisasi. Jika visi dan misi tidak dinyatakan dengan jelas, maka langkah-langkah jangka pendek yang diambil organisasi bisa saja

bertentangan dengan tujuan jangka panjangnya (David & David, 2017). Dalam penelitian ini pernyataan visi dan misi dilihat dari komitmen kepala daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan esktrm.

a. Komitmen Pimpinan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo untuk periode 2017–2022 secara resmi berakhir pada 22 Mei 2022. Pada awal periode tersebut, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menduduki jabatan Bupati didampingi oleh Drs. H. Sutedjo sebagai Wakil Bupati. Namun, pada tahun 2019, Hasto Wardoyo ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengemban tugas sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Menyusul hal tersebut, Sutedjo kemudian ditetapkan sebagai Bupati Kulon Progo untuk sisa masa jabatan hingga 2022, dan pada tahun 2020, Fajar Gegana dipilih untuk mendampingi sebagai Wakil Bupati.

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dinyatakan bahwa jabatan kepala daerah yang habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan 2023 akan diisi oleh penjabat sementara hingga dilaksanakannya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dalam penjelasan Pasal 201 Ayat (9) disebutkan bahwa masa tugas Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah selama satu tahun, dan dapat diperpanjang satu tahun lagi, baik oleh individu yang sama maupun oleh orang yang berbeda.

Mengacu pada regulasi yang berlaku serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34-1177 Tahun 2022 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo, maka untuk mengisi kekosongan kepemimpinan daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022, Drs. Tri Saktiyana, M.Si. ditunjuk sebagai Penjabat Bupati. Sebelumnya, beliau mengemban tugas sebagai Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam acara pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan harapannya agar pejabat yang baru dapat mendorong terciptanya Kulon Progo sebagai wilayah percontohan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang berfokus pada pengurangan angka kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan yang berkualitas di lingkungan pemerintah daerah. Harapan ini sejalan dengan keterlibatan Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 dalam proyek percontohan Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Setelah menjalankan masa tugas selama 1 (satu) tahun, Tri Saktiyana diganti oleh Ni Made Dwipanti Indrayanti pada tahun 2023 sebagai Penjabat Bupati Kulon Progo. Ni Made Dwipanti Indrayanti sebelumnya adalah Kepala Dinas Perhubungan DIY.

Kemudian untuk periode tahun 2024 ini Penjabat Bupati Kulon Progo dijabat oleh Ir. Srie Nurkyatsiwi MMA yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Komitmen Pj. Bupati Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Data yang sudah ada harus menjadi pegangan. Kemiskinan bisa dari usia, lokasi, dan lain lain. Untuk itu penanganan yang tepat harus didasarkan pada data yang ada, penanganan kemiskinan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan untuk segera dituntaskan secara bersama-sama. Untuk itu kerja sama lintas sektor di di Kulon Progo sangat dibutuhkan.” (rri.co.id, 2024)



Gambar 4. 1 Dokumentasi foto penyampaian komitmen penanganan kemiskinan oleh Pj. Bupati Kulon Progo Ir. Srie Nurkyatsiwi MMA setelah pelantikan di Bangsal Kepatihan, Rabu (22/5/2024)

Sumber foto: rri.co.id, 2024

Selain itu, hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Drs. Jazil Ambar Was'an, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menunjukkan komitmen serius dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

“Kemiskinan ekstrem menjadi nawacita dari Presiden dan ini ditargetkan di Tahun 2024 sudah habis, tentu kita Pemerintah Daerah juga harus mensikapi itu. Oleh karena itu Pemerintah Daerah inipun juga sudah memetakan dan juga sudah mensikapi terhadap kondisi itu. Saya lupa jumlahnya berapa, itu kemudian kita intervensi mereka itu dengan beberapa kegiatan termasuk juga karena ini namanya ekstrem bantuan-bantuan untuk hidup ini sudah kita alokasikan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo”.
(Wawancara, 24 September 2024)

Pengentasan kemiskinan juga telah tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 dengan Visi Kabupaten Kulon Progo adalah “*Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin*“. Sedangkan misi untuk pengentasan kemiskinan adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan yang diturunkan dalam sasaran pokok RPJP yaitu **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin**. Hal tersebut tercermin dari terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana pendapatan per kapita pada tahun 2025 berada pada level kesejahteraan yang sebanding dengan wilayah-wilayah maju lainnya, dengan tingkat

pengangguran terbuka tidak melebihi 5 persen serta persentase penduduk miskin yang juga berada di bawah 5 persen.

Berdasarkan pernyataan pimpinan daerah dan visi serta misi yang tertuang didalam dokumen RPJP Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2025, maka agenda pengentasan kemiskinan telah menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

b. Komitmen Pimpinan Daerah Kotawaringin Barat

Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat periode 2017 sampai dengan 2022 berakhir pada tanggal 22 Mei 2022. Pada periode ini pasangan Hj. Nurhidayah sebagai Bupati dan Ahmadi Riansyah sebagai Wakil Bupati. Masa jabatan ini sama dengan Kabupaten Kulon Progo yang juga berakhir pada tahun 2022. Akan tetapi perbedaan adalah pasangan Hj. Nurhidayah dan Ahmadi Riansyah tetap berpasangan hingga akhir masa jabatannya.

Dalam Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Desa se-Kecamatan Kumai pada tanggal 22 September 2021, Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang harus segera mendapat perhatian adalah penguatan program penanggulangan kemiskinan.

“Penanggulangan kemiskinan menjadi target yang paling utama yang harus diperhatikan secara serius, peningkatan aksesibilitas daerah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah terutama wilayah pedesaan, peningkatan aksesibilitas daerah dengan berfokus pada sektor peningkatan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat,

peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta konsolidasi dan reformasi birokrasi demi mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” (Prokom Kobar, 2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1170 Tahun 2022, ditetapkan bahwa Anang Dirjo diangkat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Kotawaringin Barat untuk masa jabatan selama satu tahun. Sebelum menjabat posisi tersebut, Anang Dirjo diketahui menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Komitmen Penjabat Bupati Kotawaringin Barat Anang Dirjo terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem disampaikan pada acara penandatanganan *MoU* dan *Focus Group Discussion* (FGD), dengan pihak manajemen Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan perusahaan lainnya, dalam kerjasama perencanaan pembangunan kolaboratif (*Collaborative Governance*), di Aula BAPPEDA Kobar, Senin, (12/9/2022). Anang Dirjo menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kontribusi dan kerja sama melalui pendekatan *Collaborative Governance* secara berkelanjutan, dengan cakupan yang semakin luas. Upaya ini ditujukan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, serta memperbaiki nilai tukar petani dan indikator pembangunan lainnya (Info PBun, 2022).

Merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1217 Tahun 2023 tertanggal 20 Mei 2023 mengenai pengakhiran masa tugas dan pengangkatan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, disampaikan bahwa Anang Dirjo telah digantikan oleh Budi Santosa. Sebelumnya, Budi Santosa menjabat sebagai Direktur BUMD, BLUD, dan BMD pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Setda Kalteng, 2023).

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kotawaringin Barat pada Selasa, 22 Oktober 2024, saat menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2025, Penjabat Bupati Kotawaringin Barat, Budi Santosa, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten tetap konsisten dalam mengupayakan pengurangan kemiskinan ekstrem serta menekan angka stunting di wilayah tersebut.

“Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus merata di seluruh wilayah Kobar. Ini menjadi prioritas utama kami. Kami menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem dan menekan angka stunting sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat”. (kalteng.tribunnews.com, 2024)



Gambar 4. 2 Dokumentasi foto penyerahan dokumen Ranperda APBD Tahun 2025 kepada Ketua DPRD oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat Budi Santosa di Aula DPRD (22/10/2024)
Sumber foto: kalteng.tribunnews.com, 2024

Selain itu, saat sesi wawancara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, H. Rody Iskandar, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

“Pertama, keputusan Menko Kobar tidak merupakan bagian dari 202 tahap pertama untuk penanganan kemiskinan ekstrem tapi untuk perluasan oke. Yang jelas kita kemiskinan ekstrem ini kan seperti teori lingkaran setan. Jadi berkaitan dengan stunting berkaitan dengan kemiskinan berkaitan dengan yang lain-lain masalah didalam masyarakat. Pemerintah Daerah tetap komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah awal perlu kita akan melakukan validasi kemudian verifikasi yang paling penting dari jumlah data yang di publish.” (Wawancara, 12 Juli 2024)

Pengentasan kemiskinan juga telah tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 -2025 yaitu *Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis, Dan Berkeadilan*. Adapun misi pengentasan kemiskinan adalah “Meningkatkan Kondusifitas Daerah dan Pengurangan Kemiskinan Masyarakat” dengan tujuan diantaranya Peningkatan kemampuan mandiri bagi individu yang tergolong dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penurunan angka pengangguran, serta terciptanya kondisi masyarakat yang semakin tertib dan tenteram.

Berdasarkan pernyataan pimpinan daerah dan visi serta misi yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2006 – 2025, maka agenda pengentasan kemiskinan telah menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pengukuran eksternal

Analisis eksternal membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan utama yang dihadapi organisasi, sehingga memungkinkan perumusan strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang tersebut serta menghindari atau meminimalkan dampak dari tantangan yang ada. Kekuatan eksternal dapat dibagi sebagai berikut: kekuatan ekonomi, kekuatan budaya, sosial, demografi dan lingkungan serta kekuatan politik, hukum dan pemerintah (David & David, 2017). Dalam penelitian ini kekuatan ekonomi dilihat dari potensi ekonomi

daerah, kekuatan budaya, sosial, demografi dan lingkungan dilihat dari demografi, kesehatan dan pendidikan. Serta kekuatan politik, hukum dan pemerintah dilihat dari dukungan legislatif daerah.

a. Kekuatan ekonomi

Faktor-faktor dalam bidang ekonomi turut menentukan potensi ketertarikan terhadap strategi tertentu (David & David, 2017). Dalam penelitian ini kekuatan ekonomi yang dilihat adalah potensi ekonomi daerah.

1) Potensi Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kulon Progo, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pada tahun 2018, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010, tercatat sebesar 10,84%. Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peningkatan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yang tumbuh hingga 59,73%, yang erat kaitannya dengan maraknya kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Salah satu faktor utama pendorongnya adalah pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta yang berdampak besar terhadap perekonomian setempat. Selain itu, terdapat pula berbagai proyek lain seperti pembangunan jalur jalan lintas selatan, underpass bandara, Jogja Agro Park (JAP) di Kapanewon Nanggulan, jalan Bedah Menoreh, Program penanganan banjir di wilayah selatan, pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kalibawang–Samigaluh,

serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan di koridor Sentolo menuju Klangon, serta pengembangan wilayah pendukung destinasi wisata prioritas nasional Borobudur (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dicatatkan Kabupaten Kulon Progo, mencapai 13,49%. Angka ini tergolong signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota lainnya, bahkan melampaui rata-rata provinsi maupun nasional. Bila ditelusuri lebih dalam, sektor konstruksi menjadi penyumbang utama pertumbuhan tersebut, dengan kenaikan sebesar 68,64%, meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2018. Lonjakan ini berkaitan erat dengan percepatan pembangunan proyek strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) serta penyelesaian pembangunan underpass Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang rampung pada tahun 2019. Selain konstruksi, sektor-sektor lain seperti penyediaan listrik dan gas, transportasi, serta perdagangan juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup mencolok. (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membawa dampak besar terhadap kondisi perekonomian global, termasuk di Kulon Progo. Berdasarkan analisis awal, pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami penurunan tajam hingga mencapai -3,45%. Hampir semua sektor mengalami kontraksi, bahkan beberapa seperti sektor

konstruksi—yang sebelumnya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi—mengalami pertumbuhan negatif. Namun, di tengah situasi tersebut, beberapa sektor justru mencatatkan pertumbuhan signifikan, antara lain layanan kesehatan, sektor komunikasi dan informasi, serta transportasi dan perdagangan. Pertumbuhan ini berkaitan erat dengan kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan layanan kesehatan, bekerja dari rumah yang membutuhkan dukungan teknologi komunikasi, serta meningkatnya transaksi belanja daring yang mendorong aktivitas logistik dan distribusi barang (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Tahun 2021, kondisi perekonomian mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang bangkit dari kontraksi sebesar -3,45% pada tahun 2020 menjadi tumbuh positif sebesar 4,37%. Sektor informasi dan komunikasi menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Kulon Progo kembali mencatat peningkatan yang lebih tinggi, yakni sebesar 6,57%, di mana sektor transportasi dan perdagangan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 31,76% (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024).

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dianalisis melalui arahan struktur ruang dalam dokumen RTRW yang telah direvisi. Dalam revisi RTRW tersebut, terdapat berbagai dinamika perubahan signifikan dalam struktur ruang dibandingkan dengan versi sebelumnya. Salah satu faktor pendorong utama pengembangan wilayah adalah keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, arah kebijakan penataan ruang awalnya menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian sebagai sektor utama, dengan dukungan dari sektor pariwisata, pertambangan, dan industri kelautan. Namun, dengan hadirnya BIY serta potensi yang menyertainya, orientasi penataan ruang mengalami pergeseran, di mana pertanian dan pariwisata menjadi unggulan yang diperkuat oleh sektor kelautan, kebudayaan, pertambangan, perdagangan dan jasa, serta industri. Keberadaan BIY juga memicu munculnya pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis baru di wilayah Kulon Progo (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024).

a) Pengembangan Kawasan Aerotropolis

Keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di wilayah Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam arah

pembangunan wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Area di sekitar bandara tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan dirancang dengan pendekatan pengembangan berbasis aerotropolis. Batas-batas kawasan aerotropolis ini telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 422/A/2020, sebagai berikut: Kapanewon Temon: seluruh Kalurahan Jangkaran, Sindutan, Kalidengen, Glagah, Kedundang, Plumbon, Demen, Palihan, Janten, Karangwuluh, sebagian Kalurahan Kebonrejo, Temon Kulon, Temon Wetan, Kaligintung, serta Kulur, Kapanewon Kokap: sebagian Kalurahan Hargomulyo dan Hargorejo, Kapanewon Wates: sebagian Kalurahan Karangwuni, Kulwaru, Sogan, Ngestiharjo, Triharjo dan Wates, dan Kapanewon Pengasih: sebagian Kalurahan Tawang Sari dan Karangsari.

Wilayah di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat transportasi udara bertaraf internasional. Potensi ini membuka peluang terbentuknya pusat-pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Sebagai bandara internasional yang baru beroperasi, BIY diharapkan berfungsi sebagai pintu gerbang utama bagi arus mobilitas barang dan manusia ke dan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Gagasan pengembangan kawasan ini dengan konsep aerotropolis yang terstruktur dan

terintegrasi diarahkan untuk mendorong peningkatan potensi ekonomi lokal secara optimal. Namun demikian, perencanaan dan pembangunan kawasan sekitar bandara harus senantiasa mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, serta pelestarian lingkungan, dan juga memperhatikan upaya mitigasi risiko bencana secara menyeluruh.

Infrastruktur pendukung keberadaan BIY dan kawasan Aerotropolis juga terus dikembangkan antara lain dengan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang berstandar internasional dalam rangka menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, pengembangan sarana prasarana transportasi darat juga dilakukan dengan pembangunan jalur kereta api Bandara baru yang memudahkan dan mempercepat para penumpang tujuan Bandara untuk langsung menuju Bandara. Dengan dibangunnya jalur kereta api baru tersebut, stasiun Kedundang yang semula non aktif saat ini direaktivasi untuk mendukung operasional kereta tersebut.

Ke depan, seiring dengan kemajuan sistem transportasi massal yang semakin terintegrasi, dirancang pengembangan kawasan yang mengusung konsep *Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar Stasiun Wates dan Stasiun Kedundang. Di samping itu, guna mempermudah mobilitas penumpang menuju Bandara Internasional Yogyakarta (BIY), direncanakan

pembangunan jalan tol sebagai bagian dari proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta - NYIA Kulon Progo. Tidak hanya transportasi, pembangunan sarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih, juga dilakukan melalui proyek Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAMReg) Kamijoro.



Gambar 4. 3 Bandara Internasional Yogyakarta yang berada di Kabupaten Kulon Progo (27/09/2021)
Sumber foto : myedisi.com (2021)

b) Pengembangan Kawasan Penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur

Penetapan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sekaligus Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), dengan target kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Kulon Progo yang secara geografis berdekatan untuk turut memanfaatkan dampak positif dari kebijakan tersebut.

Kawasan perbukitan Menoreh sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur memiliki potensi daya tarik pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan agar dapat bersinergi dengan pengembangan pariwisata Borobudur. Rencana pembangunan Jalur Temon – Borobudur atau Jalur Bedah Menoreh merupakan salah satu strategi daerah dalam rangka menyediakan akses transportasi dari BIY menuju kawasan Borobudur.



Gambar 4. 4 Pembangunan Ikon KSPN Borobudur
Gerbang Klangon (19/03/2020)
Sumber foto : topbusiness.id, 2020

c) Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, upaya pengembangan tata ruang di wilayah tersebut dilakukan melalui identifikasi dan penetapan kawasan strategis, yang dikenal sebagai Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten. Langkah ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal

serta tatanan sosial masyarakat, mendukung peningkatan kesejahteraan warga, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo, terdapat empat lokasi yang termasuk dalam kategori Satuan Ruang Strategis tersebut, yaitu: 1) kawasan Perbukitan Menoreh, 2) kompleks Makam Girigondo, 3) area Pusat Kota Wates, dan 4) wilayah Pantai Selatan Kulon Progo (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024).



Gambar 4. 5 Kawasan Wisata Tumpeng Menoreh

Sumber foto : wisata.app, 2022

2) Potensi Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

Dilihat dari struktur sektoralnya, pada tahun 2021 sektor Industri Pengolahan menempati posisi teratas sebagai kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan peran sebesar 25,47%. Di posisi berikutnya terdapat sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan yang menyumbang sekitar 25,39%. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Kendaraan Bermotor menyusul dengan kontribusi mencapai 13,98%. Secara umum, perkembangan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan harga konstan (ADHK) menunjukkan pola peningkatan dari tahun ke tahun (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024).

Komposisi ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan, dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian secara umum, kini mulai bergeser ke arah sektor industri pengolahan. Perekonomian daerah ini terutama ditopang oleh beberapa sektor kunci, yaitu industri manufaktur; bidang pertanian, kehutanan, serta perikanan; dan sektor perdagangan baik grosir maupun eceran, termasuk jasa reparasi kendaraan bermotor. Kontribusi besar dari sektor-sektor tersebut tidak terlepas dari luasnya perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh masyarakat dan korporasi skala besar. Industri pengolahan kelapa sawit mengalami perkembangan seiring dengan kehadiran sejumlah perusahaan besar di sektor perkebunan, meskipun capaian produksinya masih belum maksimal. Produk yang dihasilkan utamanya mencakup crude palm oil (CPO) serta minyak goreng. Di samping itu, aktivitas pengolahan hasil hutan telah lama menjadi salah satu sektor ekonomi yang signifikan di daerah ini. (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024).



Gambar 4. 6 Industri CPO PT. Citra Borneo Utama

Sumber foto : newneraca.neraca.co.id, 2025

b. Kekuatan kondisi sosial, budaya, demografis dan lingkungan

Perubahan dalam aspek sosial, budaya, demografi, dan lingkungan turut memengaruhi pola hidup, cara bekerja, proses produksi, serta perilaku konsumsi masyarakat (David & David, 2017). Dalam penelitian ini yang dilihat adalah demografi, pendidikan dan kesehatan.

1) Kabupaten Kulon Progo

a) Demografi

Pada tahun 2022, total populasi Kabupaten Kulon Progo mencapai 443.591 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 219.776 merupakan penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 223.815 jiwa. Seluruh penduduk tersebut tersebar dalam 155.219 kepala keluarga. Selama lima tahun terakhir, laju

pertumbuhan penduduk di wilayah ini umumnya menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan sebesar 0,47% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah keluarga tahun 2016 tercatat sebanyak 146.414 dan mengalami kenaikan menjadi 149.172 di tahun 2017. Kemudian naik lagi menjadi 150.954 pada 2018, namun mengalami penurunan menjadi 149.976 di tahun 2019. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 152.251 pada tahun 2020 dan 153.404 pada tahun 2021.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, jumlah balita (usia 0-4 tahun) di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, dari 25.506 menjadi 19.970 jiwa. Sementara itu, populasi usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 300.743 jiwa di tahun 2021 menjadi 303.633 jiwa pada tahun 2022.

b) Pendidikan

Tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas, yang mencerminkan kemampuan membaca dan menulis, sempat mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang pada usia tersebut belum mampu membaca, serta belum diperbaruinya data kependudukan yang masih mencantumkan status sebagai pelajar, belum mengenyam pendidikan, atau baru mengikuti PAUD, sehingga

dianggap belum melek huruf. Namun demikian, sejak tahun 2020 angka literasi mulai menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tingkat melek huruf pada tahun 2022 mencapai 95,89%.

Di Kabupaten Kulon Progo, tren rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada 2018 angkanya berada di kisaran 8,65 tahun, maka pada 2022 naik menjadi 9,17 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum, penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun telah menempuh pendidikan setara jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik melalui pendidikan formal maupun alternatif nonformal.

Tingkat kelulusan siswa di Kulon Progo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Variasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti standar kelulusan yang berlaku, pencapaian akademik siswa, penerapan sistem dan kurikulum pendidikan, serta kualitas tenaga pendidik. Untuk meningkatkan angka kelulusan, dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap siswa selama proses ujian, serta memperkuat sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Berkat upaya tersebut, dalam dua tahun terakhir, tingkat kelulusan siswa SD dan SMP di Kulon Progo telah mencapai 100%.

c) Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan estimasi rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir di suatu wilayah. Selama periode 2018 hingga 2022, UHH terus menunjukkan tren peningkatan, yang mencerminkan membaiknya kualitas hidup penduduk. Pada tahun 2022, Kabupaten Kulon Progo mencatatkan angka UHH tertinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu sebesar 75,28 tahun. Sementara itu, rata-rata UHH DIY secara keseluruhan berada pada angka 75,08 tahun.

2) Kabupaten Kotawaringin Barat

a) Demografi

Pada tahun 2021, total penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sebanyak 263.786 jiwa. Jumlah ini mencerminkan sekitar 9,99% dari keseluruhan populasi Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 2.669.969 jiwa, menempatkan Kotawaringin Barat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Kota Palangka Raya.

b) Pendidikan

Masih terdapat masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat yang belum menempuh pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini bukan disebabkan oleh minimnya keberadaan

SMP/MTs-yang sebagian besar memang terpusat di ibu kota kecamatan dan belum sepenuhnya terjangkau oleh lulusan SD/MI dari wilayah terpencil-melainkan karena banyak siswa lulusan SD/MI memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di luar daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata lama sekolah menunjukkan total tahun pendidikan formal yang diselesaikan oleh individu berusia 15 tahun ke atas, tanpa menghitung tahun-tahun yang diulang dalam jenjang pendidikan tersebut.

Di sisi lain, Harapan Lama Sekolah (HLS) merepresentasikan perkiraan durasi pendidikan formal yang dapat ditempuh oleh anak berusia 7 tahun ke atas apabila mengikuti kondisi pendidikan yang berlaku saat ini. Pada tahun 2021, HLS di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai angka 12,73 tahun. Artinya, seorang anak yang memulai sekolah pada usia 7 tahun diperkirakan akan menempuh pendidikan selama 12,73 tahun, atau setara dengan jenjang pendidikan Diploma I.

c) Kesehatan

Angka harapan hidup Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 mencapai 70,68 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2021 secara rata-rata akan mampu bertahan hidup sampai sekitar umur 70 hingga 71 tahun. Angka tersebut selalu mengalami kenaikan setiap

tahunnya. Pada tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki nilai AHH sebesar 70,34 artinya dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan AHH sebesar 0,61 tahun. Semakin tingginya angka harapan hidup mengindikasikan makin tingginya kualitas sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

c. Kekuatan politik, hukum dan pemerintah

Pemerintah—baik di tingkat pusat, daerah, maupun luar negeri—memiliki peran sebagai pengatur, penghapus regulasi, penyedia subsidi, pemberi lapangan kerja, serta konsumen utama bagi berbagai organisasi. Karena itu, aspek politik, tata kelola, dan hukum dapat menjadi sumber utama peluang strategis (David & David, 2017). Dalam penelitian yang dilihat adalah dukungan legislatif daerah.

1) Dukungan DPRD Kabupaten Kulon Progo

Dukungan terhadap penanganan kemiskinan disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulonprogo Suryanta menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan berbagai terobosan pembangunan guna menurunkan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di kisaran 16,92 persen. Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan, terutama kategori kemiskinan ekstrem, adalah belum memadainya infrastruktur khususnya akses jalan yang sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas

ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya. Menurutnya, dengan memperluas pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi, seperti pembangunan jalan usaha tani, pelaksanaan program padat karya, serta fokus pada pembangunan jalan kabupaten yang memang sangat dibutuhkan, maka secara perlahan angka kemiskinan dapat ditekan (Harian Jogja, 2024).

Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati mengimbau pemerintah daerah untuk mengevaluasi secara menyeluruh data terkait kemiskinan, guna memastikan program perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

"Persoalan kemiskinan di Kulon Progo saat ini, adalah mental miskin saja. Sehingga hal yang perlu dilakukan dalam percepatan pengentasan kemiskinan adalah audit kemiskinan itu sendiri. Kalau miskin karena tidak memiliki pekerjaan jangan diberikan bantuan langsung tunai, tapi lapangan pekerjaan. Atau kemiskinannya disebabkan tidak bisa membiayai sekolah, ya tentu diberikan bantuan biaya sekolah." (Antara News, 2022)

Selain itu, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo tanggal 24 April 2024, anggota DPRD Suryanto yang sekaligus Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kulon Progo juga menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dikarenakan masih kurangnya infrastruktur. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Angka tingkat kemiskinan di Kulon Progo masih tinggi, bahkan banyak kalurahan yang berpredikat miskin ekstrim. Hal ini segera ada penanganan khusus dan serius. Menurut pandangan kami miskin ekstrim ini ada salah faktor penyebabnya, diantaranya dengan tidak layaknya infrastruktur terutama berupa akses jalan yang layak guna mendukung kegiatan ekonomi, Pendidikan, layanan Kesehatan dan sarana sosial lainnya serta sarana prasarana publik dari sektor Pendidikan, Kesehatan, dan sosial, sehingga hal ini berakibat fatal terhadap psikologi (mental) masyarakat dalam melakukan usaha usaha ataupun kehidupan secara umum. Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah konkrit mencari terobosan agar hal tersebut segera bisa teratasi”. (suarapasar.com, 2024)



Gambar 4. 7 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo
(24/04/2024)

Sumber foto : suarapasar.com, 2024

2) Dukungan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pengurangan angka kemiskinan di wilayahnya. Komitmen ini ditegaskan oleh Ketua Sementara DPRD Kobar, Siti Mukaromah, saat menghadiri Rapat

Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2024, yang diselenggarakan di Kantor Bappedalitbang Kobar pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Siti menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai sesuai target yang telah dirancang (Radar Sampit, 2024a).

Upaya menekan angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus mendapat dukungan. Wakil Ketua I DPRD Kobar, H. Rudi Imam Gunawan, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap program-program prioritas Pemkab Kobar yang bertujuan untuk mengatasi stunting dan kemiskinan, dua masalah nasional yang juga menjadi fokus utama di daerah.

“Dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Pemkab Kobar, terdapat sembilan poin program prioritas. Salah dua di antaranya adalah penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan. Ini adalah program nasional yang penting, dan kita semua harus mendukung hingga realisasinya tercapai seperti yang kita harapkan. Penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini adalah upaya besar yang membutuhkan sinergi dan kerja sama lintas sektor. Kami berharap Pemkab Kobar makin gencar dalam menanggulangi masalah ini. Kolaborasi yang kuat dari stakeholder lainnya juga sangat diperlukan. Jika semua pihak bergotong royong dan konsisten, target yang diharapkan dapat dicapai”. (Kotawaringinnews, 2024)



Gambar 4. 8 Kegiatan koordinasi dan pengawasan pembangunan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di kantor Bappedalitbang Kobar, Rabu (28/8/2024)

Sumber foto : radarsampit.jawapos.com, 2024

3. Pengukuran internal

Aspek kekuatan dan kelemahan internal sering kali berkaitan erat dengan budaya organisasi, namun tidak selalu tampak secara jelas karena sifatnya yang melibatkan berbagai fungsi secara lintas sektoral. Salah satu tantangan utama dalam manajemen strategis saat ini adalah mendorong terjadinya perubahan pada budaya organisasi serta pola pikir individu, agar selaras dengan proses perumusan, pelaksanaan, dan penilaian strategi. Dalam melakukan evaluasi internal, fokus diarahkan pada kegiatan inti dari fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan sumber daya manusia, serta pengendalian (David & David, 2017). Dalam penelitian ini pengukuran internal dilihat dari perencanaan, pengorganisasian dan pemotivasian.

a. Perencanaan

Melalui perencanaan, kita dapat menentukan secara jelas apa yang perlu dicapai, sekaligus merinci siapa yang terlibat, Tindakan apa yang perlu diambil, waktu dan lokasi pelaksanaannya, beserta alasan serta strategi untuk mewujudkannya. Perencanaan juga membantu menilai sejauh mana upaya, pengeluaran, dan konsekuensi yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut (David & David, 2017). Dalam penelitian ini perencanaan diambil dari wawancara langsung dengan Instansi Perencanaan di daerah dalam hal ini BAPPEDA serta untuk menganalisis lebih lanjut juga dilihat dari dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1) Perencanaan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo

Di Kabupaten Kulon Progo, penggunaan data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK tidak serta merta dipakai oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru bahwa data P3KE terlebih dahulu diverifikasi dengan DTKS dari Kemensos.

“Jadi data yang kita gunakan, kita punya data P3KE dari Kemenko PMK lalu yang kedua dengan DTKS lalu yang ketiga dengan REGSOSEK hanya dengan REGSOSEK ini kita masih menunggu persetujuan dari BAPPENAS untuk bisa mendapatkan akun dan mengakses data itu. Namun yang kita lakukan untuk

pemadanan data selalu kita lakukan, jadi dari P3KE kita padankan kita verifikasi dengan data DTKS karena data di DTKS kan tidak ada desilnya, yang ada desil di P3KE, nanti kita padankan disitu. walaupun memang selisihnya agak lumayan signifikan karena updatenya P3KE itu setahun sekali, DTKS kan 3 bulan sekali”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Pemadanan data P3KE dengan data DTKS menjadi persoalan tersendiri dikarenakan perbedaan update data diantara kedua data tersebut. Akan tetapi Pemerintah Daerah tetap mencoba menggabungkan kedua data tersebut sehingga nantinya muncullah data kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kulon Progo. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut.

“Kemiskinan ekstrem itu di tahun 2020 awal/ 2021 kita ada 5,2 %, 14.688, lalu di 2022 ada 10.418, lalu di 2023 kita ada di 9.816 kalo ga salah jadi berkurang tapi pengurangannya tidak terlalu signifikan. Jadi pemadanan data sudah kita lakukan sejak muncul INPRES karena kita harus memilah menggolongkan menjadi kemiskinan ekstrem kita libatkan pamong kalurahan dan PKPD yang di Dinas Sosial untuk membantu memverifikasi, memvalidasi, sesudah muncul data fix kita SK kan, Cuma di 2023 kita tidak meng-SK-kan karena turunnya tidak signifikan, di 2024 ini kita SK kan lagi yang 9.000 sekian”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Persoalan validitas data kemiskinan ekstrem menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA bahwa masih ada 165

jiwa miskin ekstrem yang tidak masuk kedalam SK, sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut tidak mendapat intervensi program dan kegiatan. Sehingga BAPPEDA meminta bantuan kepada Kalurahan KPKD untuk mengawal dan memverifikasi data kemiskinan ekstrem.

“Nanti untuk di teman-teman kalurahan juga kita koordinasikan dengan tim dari dinas pemberdayaan masyarakat untuk mengawal dan dinas sosialnya mengawal melalui KPKD nya untuk data yang sudah kita SK kan tapi memang tidak menafikan bahwa data itu di bawah memang masih belum *clean* masih ada satu dua yang menjadi ganjalan belum menjadi data yang sempurna”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dari sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menurun secara signifikan dari sebelumnya berjumlah 14.688 jiwa menjadi 9.000. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan atau penajaman program kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah data kemiskinan ekstrem ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo, selanjutnya data tersebut digunakan bagi OPD untuk mengintervensi dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing OPD. Selain program Bantuan Sosial yang telah menjadi program perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mendorong program dan kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan

dan Pemangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru.

“Pertama dari hasil SK itu, kita kan punya TKPK tingkat kabupaten kita undang teman-teman tim untuk mengintervensi data yang sudah di SK kan. Lalu yang kedua itu data yang dari teman-teman OPD nanti akan diintervensi melalui program kegiatan yang sekiranya bisa mem-*push* atau mendorong di strategi nomor 2 (peningkatan pendapatan masyarakat) karena untuk bansos tidak dulu karena bansos sudah ada banyak sekali”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Fokus Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang sebelumnya bersifat rutin dan masih tersebar di masing-masing OPD dengan sasaran penerima manfaat yang belum berhubungan dengan data kemiskinan ekstrem, akhirnya setelah ditetapkan dengan SK Bupati, maka program dan kegiatan OPD mesti menyasar *by name by address* warga miskin ekstrem yang telah ditetapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru.

“Jadi itu kegiatan yang sudah rutin di lakukan di teman-teman OPD Cuma fokus sasarannya sekarang kita minta menyesuaikan dengan SK biasanya selama ini teman-teman OPD yang data mereka punya tetapi setelah kita verifikasi dengan TKPK ini lho yang harus menjadi lokus dan fokus kegiatan. OPD selama ini dalam menerjemahkan yang menjadi alur untuk penanganan kemiskinan sudah berjalan hanya memang kendalanya OPD kadang-kadang tidak tau persis tidak menyadari bahwa saya sudah melakukan ini untuk ini, jadi sebenarnya sudah rutin. Kedua untuk fokus dan lokus melalui program pengendalian. Jadi kalau untuk penanggulangan kemiskinan kan setiap tahun kita

punya rencana aksi tahunan atau RAT. Kami berpikir bahwa ketika kita mengintervensi ekstrem otomatis kemiskinan yang biasa itu kan akan tergradasi juga lalu yang kedua kita punya RPKD (rencana penanggulangan kemiskinan daerah) yang lima tahun sekali yang itu harus disemilirkan dengan RPJMD. Itu bahasan teman-teman di OPD ketika akan menuangkan DPA kedalam RKA”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Sebagaimana disampaikan diatas, bahwa sebenarnya program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan oleh OPD. Akan tetapi, OPD terkait masih belum menyadari bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan langsung dengan penanganan kemiskinan ekstrem, dan yang lebih penting lagi adalah program dan kegiatan tersebut belum mengintervensi data warga miskin ekstrem.



Gambar 4. 9 Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Adikarta Sekretariat Daerah Kulon Progo pada Rabu (31/01/2024)
Sumber foto : jogja.tribunnews.com, 2024

Dalam rangka mendukung penelitian ini, peneliti juga tertarik melihat keseriusan Pemerintah Daerah dari segi dokumen perencanaan daerah yang merupakan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yakni Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan tahap awal yang krusial dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, dinyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem masuk kedalam dokumen perencanaan daerah sebagai isu prioritas, dengan fokus pembangunan tahun 2024, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Perwujudan Kawasan Aerotropolis sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023b).

Pada tahun 2024, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023–2026. Salah satu tantangan utama yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di tahun ini berkaitan erat dengan prioritas dan target pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem serta pengembangan sektor ekonomi kreatif. Sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% pada tahun 2024, pemerintah daerah menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Meskipun

demikian, terdapat berbagai persoalan yang masih perlu diatasi dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya:

- a. Data penerima bansos perlu perbaikan secara mandiri
- b. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, pengetahuan, dan motivasi berwirausaha
- c. Akses dan kemampuan pemasaran UMKM masih terbatas
- d. Belum optimalnya kegiatan ekspor kerajinan
- e. Usaha pemberdayaan ekonomi perempuan belum optimal
- f. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah pada kegiatan industri ekspor
- g. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMD dan lembaga keuangan
- h. Kurangnya daya tarik objek wisata yang mampu menarik wisatawan secara signifikan
- i. Pemasaran pariwisata yang belum optimal
- j. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata
- k. Masih kurangnya usaha jasa pariwisata yang bersertifikat
- l. Kemampuan pengelolaan BUMDes masih di bawah standar
- m. Belum optimalnya daya saing produk *industry*
- n. Masih banyaknya petani yang belum menjadi anggota kelompok tani
- o. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
- p. Rendahnya adopsi teknologi oleh petani. (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023b)

Berdasarkan uraian dari RKPD Tahun 2024 tersebut diatas, disebutkan bahwa permasalahan internal Pemerintah Daerah dari penanganan kemiskinan ekstrem adalah data yang masih perlu perbaikan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Penguatan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa data warga miskin ekstrem menjadi salah satu kendala dalam penyusunan perencanaan penanganan kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut dalam RKPD Tahun 2024 disebutkan prioritas pembangunan salah satunya Penanganan kemiskinan ekstrem. Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan pendapatan warga sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Program penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan secara kolaboratif dengan berbasis lokus, yaitu Kalurahan yang menjadi kantong kemiskinan. (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023b)

Apabila dilihat dari dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, maka penanganan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah. Hal ini tentu menjadi landasan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan serta anggaran kedalam Rencana Kerja Anggaran masing-masing OPD di Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, sebagaimana

tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dokumen ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merancang anggaran program dan kegiatan pada tahun tersebut, dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem tetap menjadi fokus utama Pemerintah Daerah.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang merupakan acuan bagi perencanaan anggaran 2025 Hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023 menunjukkan adanya beberapa indikator tujuan dan sasaran daerah yang memerlukan perhatian serius. Persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang akan diselesaikan Pemerintah Kabupaten. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan 0,75 persen poin dari 16,39% pada tahun 2022 menjadi 15,64% pada tahun 2023, namun Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di DIY. Persoalan lain adalah pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan gini ratio yang melebar dari 0,367 menjadi 0,402. Persoalan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga harus menjadi perhatian khusus. Walaupun indikator indeks pembangunan manusia mampu mencapai target yang ditetapkan namun masih di bawah rata-rata DIY, sehingga prioritas pembangunan SDM juga harus selalu ditingkatkan. (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024)

Terkait dengan permasalahan kebijakan belanja daerah, DPRD Kulon Progo merekomendasikan pentingnya sistem pengalokasian dana pembangunan yang menjunjung prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Penganggaran diarahkan untuk mengikuti prinsip *money follow program* yang berbasis pada *money follow function*, di mana penentuan anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, demi mendukung pencapaian target dalam RPJMD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendekatan ini juga menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, perencanaan program dan kegiatan disarankan menggunakan pendekatan prioritas program yang difokuskan secara strategis, sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi masyarakat dipercepat bersamaan dengan penguatan sistem perlindungan sosial melalui pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan ekonomi kreatif.
- b. Pemantapan pembangunan infrastruktur melalui program perwujudan kawasan aerotropolis dan program peningkatan kelestarian lingkungan hidup
- c. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah

- d. Optimalisasi tata kelola pelayanan publik melalui program peningkatan tata kelola pelayanan publik.(BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024)

Pada dokumen RKPD, fokus pembangunan pada tahun 2025 yang salah satunya adalah permasalahan daerah kemiskinan dan pemerataan ekonomi yakni dengan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang disertai dengan makin melebarnya ketimpangan pendapatan antar warga yang ditandai dengan semakin tingginya koefisien gini pada tahun 2023. Hal tersebut seiring dengan kualitas penanganan kemiskinan yang belum akurat seperti data kemiskinan yang perlu diperbaiki, rendahnya produktivitas tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi yang belum optimal serta optimalisasi sumber daya dan akses ekonomi yang belum signifikan.(BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024)



Gambar 4. 10 Sampul depan dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025
Sumber : diolah, 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen perencanaan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan 2025, terlihat bahwa dari segi perencanaan, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Akan tetapi memang dalam penyusunan perencanaan penanganan kemiskinan ekstrem, masih ada persoalan yang diungkapkan baik dari hasil wawancara maupun yang tercantum dalam RKPD yaitu perlunya perbaikan data warga miskin ekstrem agar program dan kegiatan serta anggaran dapat tepat sasaran.

2) Perencanaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat

Perencanaan strategi penanganan kemiskinan ekstrem juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi pertama kali adalah persoalan data warga miskin ekstrem yang belum tervalidasi oleh OPD terkait. Dalam hal ini data P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK diserahkan atau divalidasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait data miskin ekstrem dari Desa, sedangkan Dinas Sosial untuk data miskin ekstrem dari Kelurahan. Kemudian data tersebut dicocokkan dengan DTKS yang nantinya ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat. Sebagaimana diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kotawaringin Barat Citra Romantika sebagai berikut:

“Kami ini kan koordinator ya, data itu hasil validasi kalo desa dari DPMD kemudian kelurahan dari dinsos. Terus kami sandingkan juga dengan DTKS. Provinsi kan setiap tahun juga mengeluarkan data kemiskinan ekstrem (dari pusat/kemenko/P3KE). Kita harus mengirimkan data balikan, data yang sudah di SK kan”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan informasi bahwa untuk nama warga miskin ekstrem *by name by address* belum ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan masih belum selesainya validasi oleh OPD teknis terkait. Persoalan data yang masih belum ditetapkan ini juga menjadi permasalahan bagi perencanaan strategi

penanganan kemiskinan ekstrem. Sebagaimana diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kotawaringin Barat Citra sebagai berikut:

“Setelah ini ada SK kita kumpulkan desa/kelurahan kita buat seperti stunting (intervensi). Jadi arahnya 2025 kesini lho. Ini sudah setengah jalan RPJPD sudah jadi. (data) 3.151 itu hasil dari maret 2024 kan kita nanti rencananya tiap tahun di update”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Terkait dengan belum validnya data kemiskinan ekstrem ini, peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada OPD teknis terkait yakni Dinas Sosial. Menurut Piet Dono, Ahli Muda Penyuluh Sosial menyebutkan bahwa memang persoalan data warga miskin ekstrem masih belum selesai dikarenakan masih belum adanya kesepakatan penetapan data warga miskin ekstrem. Sebagaimana diungkapkan oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda Piet Dono sebagai berikut:

“Sekarang ada Tim Penanganan kemiskinan daerah yang sekretariatnya ada di BAPPEDA. Kita tim aja PMD, DINSOS BAPPEDA. Kita belum ada kejelasan kesepakatan memang di hasil kami koordinasi mengikuti BIMTEK kemaren di Jakarta. Memang di beberapa daerah data P3KE ini diserahkan ke Dinas Sosial dibuat data kemiskinan daerah. Dari 13.000 itu kita sandingkan dengan DTKS Cuma kita dapat 3.151 jiwa. Itulah yang mau kita SK kan, jadi SK bupati sebagai bahan laporan triwulan”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Dari hasil konfirmasi tersebut, terlihat bahwa data warga miskin ekstrem belum secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi angka warga miskin ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat telah disepakati berjumlah

3.151 jiwa. Sehingga harus diakui bahwa perencanaan penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memang belum terlihat sampai dengan tahun 2024, akan tetapi penanganan kemiskinan reguler telah menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah, sehingga diharapkan dari penyelesaian penanganan kemiskinan reguler yang secara tidak langsung juga penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kotawaringin Barat Citra Romantika sebagai berikut:

“Kemiskinan itu kan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan reguler bisa jadi kemiskinan ekstremnya turun kemiskinan regulernya naik. Data dari BPS dipakai yang digunakan untuk IKU daerah. IKU daerah itu ga masuk kemiskinan ekstrem tetapi kemiskinan aja”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Terlepas dari persoalan data warga miskin ekstrem yang belum tervalidasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Upaya perencanaan juga telah dilakukan oleh pihak BAPPEDA dengan cara mengirimkan format Rencana Aksi Daerah penanganan kemiskinan ekstrem kepada OPD teknis untuk diinput sesuai TUPOKSI OPD masing-masing walaupun masih ada kendala. Hal ini sebagaimana diungkapkan Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kotawaringin Barat Citra Romantika sebagai berikut:

“RAD nya sebenarnya ada cuman belum terkompilasi dengan baik karena gini OPD ini sudah dikasih template, tapi pakai template sendiri, sudah dievaluasi berkali-kali, kadang kami kemaren ada rapat khusus untuk RFK RB kemiskinan, itu RB sudah aplikasinya,

sudah kami wanti bahwa ini akan selesai diisi tanggal ini tapi juga masih banyak OPD yang belum ngisi”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Sebagai bagian untuk melihat lebih jauh keseriusan Pemerintah Daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem, dalam dokumen RKPD Tahun 2024 yang mengambil tema “Penguatan Stabilitas Sosial dan Ekonomi Melalui Harmonisasi Sosial & Politik, Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kolaborasi dan Inovasi”, terlihat Prioritas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: Pengendalian Inflasi, Menurunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting; Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kotawaringin barat termasuk rendah, data menunjukkan bahwa tahun 2020 tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin barat adalah 0,74%, tentu angka ini ditargetkan dapat di entaskan tahun 2024. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada angka 23,4%, namun angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 21,1% pada tahun 2022. Namun tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin barat merupakan wilayah terendah kedua di Kalimantan tengah dalam hal stunting, rata-rata prevalensi stunting Kalimantan tengah adalah 27,4% di tahun 2021 (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023a). Apabila melihat narasi yang dicantumkan dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 terlihat optimisme penyelesaian target kemiskinan ekstrem 0 % di tahun 2024.

Sedangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 disebutkan bahwa Arah Kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 adalah Mendorong Ekosistem Ekonomi Produktif dan Kolaborasi Aktor Pembangunan dalam Rangka Pertumbuhan *Green Economy*. Arah kebijakan tahun 2025 memang difokuskan pada Ekonomi produktif dan kolaborasi aktor pembangunan, mengingat tahun 2025 telah diperoleh hasil Pemilihan Umum 2024 yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada sektor ekonomi dan kolaborasi aktor pembangunan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan RPD Tahun 2023 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kondisi damai dan tertib masyarakat usai berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara serentak;
2. pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang merata;
3. harmonisasi dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan Stunting;
4. Pembangunan dan pemantapan Infrastruktur yang merata;
5. Meningkatkan produktivitas sektor unggulan;
6. Penguatan keberdayaan perempuan, tokoh masyarakat dan swasta dalam partisipasi pembangunan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;

8. Reorientasi reformasi birokrasi sebagai landasan transformasi tata kelola (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024).

Mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dan 2025, penanganan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan program serta kegiatan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut. Dokumen itu menegaskan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

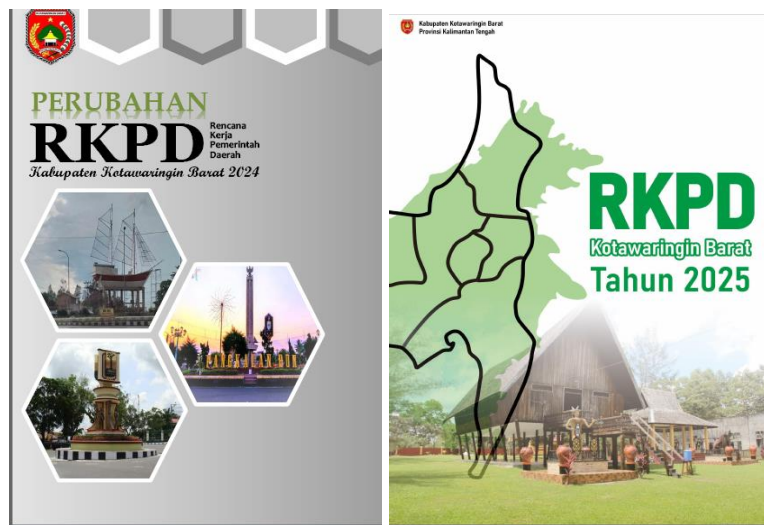
Upaya ini diwujudkan melalui beragam kebijakan, program, serta kegiatan yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat, pendampingan langsung, dan pemberian bantuan guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh penduduk. Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dijalankan secara sistematis dengan menerapkan kebijakan strategis yang mencakup beragam metode pendekatan, meliputi:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga (Klaster I). Kelompok pertama terdiri dari sejumlah program pengentasan kemiskinan yang ditujukan langsung kepada individu atau keluarga. Program-program ini mencakup bantuan bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai tanpa

syarat, serta bantuan dalam bentuk barang seperti penyaluran beras untuk keluarga kurang mampu (raskin). Selain itu, terdapat juga imbauan untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak yatim/piatu, dan kelompok sejenis lainnya.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Komunitas (Klaster II). Kelompok kedua terdiri dari berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada pemberdayaan komunitas. Pelaksanaannya menitikberatkan pada pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, atau yang dikenal dengan Community Driven Development (CDD). Salah satu contoh program yang mengusung pendekatan ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III). Kelompok program yang ketiga difokuskan pada penanganan kemiskinan dengan target utama pelaku usaha mikro dan kecil. Tujuannya ialah membuka akses serta memperkuat kemampuan ekonomi bagi sektor usaha berskala kecil dan mikro.
4. Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat (Klaster IV). Kelompok program keempat mencakup inisiatif penanggulangan kemiskinan yang difokuskan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar serta meningkatkan taraf hidup penduduk miskin.

Berbagai kegiatan dalam kelompok ini mencakup program-program kemiskinan lainnya yang memiliki potensi untuk mendorong aktivitas ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2023b)



Gambar 4. 11 Sampul depan dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 dan 2025
Sumber foto : diolah, 2024

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penetapan pihak yang bertanggung jawab atas tugas tertentu serta penetapan jalur pelaporan antara individu atau kelompok dalam suatu struktur kerja.

1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 disebutkan bahwa urusan penanganan kemiskinan ekstrem diarahkan kepada OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Pembentukan serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrem, yakni:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak-anak;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di sektor kesehatan masyarakat;
3. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, yang diberi mandat untuk mengelola urusan terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tipe A, yang menangani urusan pemerintahan yang mencakup infrastruktur, perumahan rakyat, dan pengembangan permukiman.

2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, disebutkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab utama Dinas Sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam regulasi tersebut, Dinas Sosial memiliki peran untuk mendukung Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain Dinas Sosial, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga turut berkontribusi dalam program penanggulangan kemiskinan.

c. Pemotivasian

Merupakan suatu upaya dalam membimbing individu agar dapat mencapai sasaran tertentu.

1) Motivasi Pimpinan Daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo

Sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda bahwa Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo terus mengakselerasi penanganan kemiskinan ekstrem di Tahun 2024 yang ditargetkan kemiskinan ekstrem 0 %.

“Sampai dengan akhir tahun inipun kita kondisikan agar itupun bisa lebih dipercepat. Itu yang kita lakukan di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami sangat berharap dengan beberapa intervensi itu juga bisa menurunkan kemiskinan ekstrem”. (Wawancara, 24 September 2024)

Lebih lanjut, Asisten Pemerintahan dan Kesra juga menyampaikan bahwa program kegiatan di OPD terus berjalan walaupun angka kemiskinan ekstrem belum dikeluarkan oleh pihak BPS.

“Mereka (BPS) ngambil data itu mulai januari ini, sehingga seolah olah ini ga ada pergerakan apa2. Jadi kalau begitu intervensi bantuan kita mulai januari saya kira nanti bisa kelihatan, program kegiatan di OPD tetap jalan”. (Wawancara, 24 September 2024)

2) Motivasi Pimpinan Daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Sekretaris Daerah, telah memberikan dorongan semangat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Meskipun data terkait warga miskin ekstrem masih membutuhkan proses validasi lebih lanjut, berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang ditujukan untuk menangani persoalan tersebut.

“Kalau kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem sudah beririsan, karena tadi orang yang miskin ekstrem tadi ada keluarganya stunting kemudian dia masuk keluarga yang tidak mampu. Jadi yang masuk kedalam miskin ekstrem itu adalah keluarga tidak mampu, DTKS nya pasti masuk, Bansosnya pasti masuk. Tinggal kita membersihkan dari orang tidak mampu ini, yang sangat tidak mampu atau yang sangat miskin itu masuk yang miskin ekstrem”. (Wawancara, 12 Juli 2024)

4. Analisis dan pilihan strategi

Proses analisis dan pemilihan strategi bertujuan untuk mengidentifikasi opsi tindakan yang paling realistis dan efektif, guna membantu organisasi mencapai tujuan serta mewujudkan misinya (David & David, 2017), dalam hal ini tujuannya adalah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem Di kawasan administratif Kabupaten Kulon Progo yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta serta wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebelum membahas strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Inpres No. 4 Tahun 2022, terlebih dahulu penelitian ini akan menyajikan Matriks SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman dari penanganan kemiskinan ekstrem di kedua wilayah tersebut yang telah diuraikan sebelumnya.

a. Analisis SWOT strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Pernyataan visi dan misi dalam hal ini komitmen Pimpinan Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Dukungan lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten yang dalam hal ini tentu akan mendorong dari segi anggaran penanganan kemiskinan ekstrem;
- c. Motivasi pimpinan daerah kepada bawahan dalam hal ini OPD teknis untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem;
- d. Data warga miskin *by name by address* telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Data warga miskin ekstrem masih perlu divalidasi secara up to date;
- b. Perencanaan program dan kegiatan OPD yang belum terintegrasi atau ketidakpaduan program dan kegiatan OPD untuk penanganan kemiskinan ekstrem, terkesan OPD bekerja masing-masing;
- c. Terbatasnya anggaran penanganan kemiskinan ekstrem.

3. Kesempatan (*Oppurtunity*)

- a. Potensi ekonomi daerah dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo memiliki peluang ekonomi yang cukup besar dikarenakan pembangunan Bandara Internasional DIY

dan pembangunan pariwisata kawasan pendukung Candi Borobudur;

- b. Jumlah masyarakat usia produktif yang cukup tinggi dan Angka Harapan Hidup (AHH) yang cukup tinggi sebesar 75 Tahun.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Masih rendahnya Angka Lama Sekolah (ALS) yang masih sebesar 9,17 tahun;
- b. Faktor ekonomi yang fluktuatif salah satunya adalah inflasi yang mengakibatkan barang-barang konsumsi atau kebutuhan bahan pokok menjadi naik sehingga semakin menyulitkan warga miskin ekstrem;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya warga miskin ekstrem untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya.

Tabel 4. 1 Matriks SWOT Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kulon Progo

	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan visi dan misi dalam hal ini komitmen Pimpinan Daerah 2. Dukungan lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten 3. Motivasi pimpinan daerah kepada bawahan 4. Data warga miskin yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data warga miskin ekstrem yang perlu di <i>update</i> 2. Perencanaan program dan kegiatan OPD yang belum terintegrasi 3. Terbatasnya anggaran penanganan kemiskinan ekstrem

	Daerah	
Kesempatan	Strategi SO	Strategi WO
1. Potensi ekonomi daerah yang terbuka 2. Jumlah masyarakat usia produktif yang tinggi dan Angka Harapan Hidup (AHH) yang cukup tinggi	1. Inovasi daerah yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama peningkatan pendapatan 2. Insentif bagi usia produktif untuk berwirausaha dan mendorong pembukaan lapangan pekerjaan	1. <i>update</i> data warga miskin ekstrem 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
1. Masih rendahnya Angka Lama Sekolah (ALS) 2. Faktor ekonomi yang fluktuatif salah satunya adalah inflasi 3. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya warga miskin ekstrem	1. Meningkatkan layanan pendidikan dan keterampilan 2. Memberikan perlindungan ekonomi masyarakat contohnya pasar murah 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai sosialisasi oleh OPD terkait	1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan 2. Memberikan perlindungan sosial kepada warga miskin ekstrem (bansos) 3. Penanganan kemiskinan ekstrem <i>by name by address</i> agar lebih efisien dan efektif

Dari penjelasan Matriks SWOT diatas, terlihat bahwa strategi WO yaitu perbaikan data miskin ekstrem dan sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD menjadi prioritas agar penanganan kemiskinan ekstrem dapat efektif dan efisien. Pendekatan strategi WO ini juga diakui oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kulon Progo terus dilakukan walaupun SK tentang warga miskin ekstrem telah ditetapkan dan program serta kegiatan OPD telah berjalan.

“Kemudian saya ga tau, data itu kadangkala dengan BPS kurang terbuka, sementara BPS melakukan data hanya dengan survey, sementara itu kan kita harus dengan data penduduk, kalau dengan data itu kan kelihatan siapa dimana, tapi kalau itu survey kita itu kan ibarat, bermain kucing dalam karung. Disana ada sekian persen nanti kita intervensi ternyata sudah banyak ternyata sasaran bukan itu, ini susahnya begitu. Ada yang perlu untuk disinkronkan”. (Wawancara, 24 September 2024)

b. Analisis SWOT strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Pernyataan visi dan misi dalam hal ini komitmen Pimpinan Daerah dalam upaya mempercepat hilangnya bentuk kemiskinan paling ekstrem di masyarakat;
- b. Dukungan lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten yang dalam hal ini tentu akan mendorong dari segi anggaran penanganan kemiskinan ekstrem;
- c. Motivasi pimpinan daerah kepada bawahan dalam hal ini OPD teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Data warga miskin ekstrem masih perlu divalidasi dan belum ditetapkan.

- b. Perencanaan program dan kegiatan OPD yang belum terintegrasi atau ketidakpaduan program dan kegiatan OPD untuk penanganan kemiskinan ekstrem, terkesan OPD bekerja masing-masing;
 - c. Terbatasnya anggaran penanganan kemiskinan ekstrem.
3. Kesempatan (*Oppurtunity*)
- a. Potensi ekonomi daerah dalam hal ini Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peluang ekonomi dalam pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit.
 - b. Jumlah masyarakat usia produktif yang cukup tinggi, angka rata-rata sekolah atau lama sekolah yang terus mengalami penambahan setiap tahunnya.
4. Ancaman (*Threats*)
- a. Faktor ekonomi yang fluktuatif salah satunya adalah inflasi yang mengakibatkan barang-barang konsumsi atau kebutuhan bahan pokok menjadi naik sehingga semakin menyulitkan warga miskin ekstrem.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya warga miskin ekstrem untuk berusaha meningkatkan kesejahteraannya.

Tabel 4. 2 Matriks SWOT Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat

	Kekuatan	Kelemahan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan visi dan misi dalam hal ini komitmen Pimpinan Daerah 2. Dukungan lembaga legislatif atau DPRD Kabupaten 3. Motivasi pimpinan daerah kepada bawahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data warga miskin ekstrem yang belum terverifikasi dan valid 2. Perencanaan program dan kegiatan OPD yang belum terintegrasi 3. Terbatasnya anggaran penanganan kemiskinan ekstrem
Kesempatan	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ekonomi daerah yang terbuka 2. Jumlah masyarakat usia produktif yang tinggi, angka rata-rata sekolah dan angka harapan hidup yang tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi daerah yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama peningkatan pendapatan 2. Insentif bagi usia produktif untuk berwirausaha dan mendorong pembukaan lapangan pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan data warga miskin ekstrem 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD
Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor ekonomi yang fluktuatif salah satunya adalah inflasi 2. Kurangnya kesadaran masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan ekonomi masyarakat contohnya pasar murah 2. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan perlindungan sosial kepada warga miskin ekstrem (bansos) 2. Penanganan kemiskinan ekstrem

khususnya warga miskin ekstrem	kesadaran masyarakat melalui berbagai sosialisasi oleh OPD terkait	<i>by name by address</i> agar lebih efisien dan efektif
--------------------------------	--	--

Bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perbaikan data miskin ekstrem yang belum selesai sampai dengan Tahun 2024 menjadi prioritas utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem walaupun diakui program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem telah berjalan di OPD masing-masing. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Sekda Kotawaringin Barat.

“Terkait data, pertama pengkolek datanya, kedua sinkronisasi, validasi dan verifikasi, data yang kita temukan diverifikasi oleh satu lembaga yang menjadi bagian dari RPJPD kurang lebih 3500 makanya kita kaget. Pertanyaan kita apakah indikator ataupun kriteria kemiskinan ekstrem itu sama yang diungkapkan. Karena kalau kita berkaca dari kasus stunting di Kobar berdasarkan hasil intervensi serentak itu kan 422 anak stunting sebagian besarnya ada di perkotaan, kecamatan arut selatan termasuk yang paling besar itu Desa Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng artinya kantong-kantong stunting itu masih berada di wilayah perkotaan dalam hal ini kelurahan. data belum divalidasi dan verifikasi kalo kita telusuri kembali ada 2 kemungkinan, kemungkinan pertama menggunakan kriteria yang ketat kemiskinan ekstrem sesuai kriteria pemerintah bisa jadi kemiskinan ekstrem itu tidak ada tapi yang kita khawatirkan justru lebih besar dari data yang belum divalidasi walaupun kita berharap data itu sebenarnya valid supaya penanganannya”. (Wawancara, 12 Juli 2024)

Berkaitan dengan Strategi SO, ST dan WT, dapat dilihat strategi tersebut sangat sesuai dengan strategi yang tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam instruksi presiden tersebut, Bupati diminta untuk mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan yang tepat sasaran. Strategi yang diterapkan mencakup antara lain:

- a. Menekan pengeluaran masyarakat agar lebih ringan,
- b. Menumbuhkan dan meningkatkan sumber pendapatan warga, serta
- c. Mengurangi jumlah wilayah yang menjadi pusat konsentrasi kemiskinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan formulasi strategi penanganan kemiskinan ekstrem belum dilakukan secara efektif dikarenakan masih ada persoalan data warga miskin ekstrem yang valid terutama di Kabupaten Kotawaringin Barat dan masih tidak terpadunya program dan kegiatan antar OPD, sehingga mengakibatkan penyusunan strategi penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran dan tindak lanjut target 0 % kemiskinan ekstrem di Tahun 2024 sulit tercapai di kedua daerah tersebut.

5. Analisis komparasi formulasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek formulasi strategi di kedua daerah yang telah disampaikan diatas, Berdasarkan hal tersebut, beberapa poin dapat dikaji sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya kedua daerah baik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki komitmen dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di

daerahnya masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan atau dukungan dari Kepala Daerah atau yang mewakili Pejabat dilingkup Pemerintah Daerah. Komitmen ini tentu menjadi bagian penting dari pernyataan visi dan misi yang merupakan arahan untuk semua aktivitas perencanaan (David & David, 2017).

b. Pengukuran Eksternal

1) Kekuatan ekonomi : Potensi ekonomi daerah

Potensi ekonomi daerah di kedua Kabupaten tersebut sangatlah besar. Berdasarkan hasil penelitian data sekunder berupa Rencana Kerja (Renja) di masing-masing Pemerintah Daerah terlihat bahwa keunggulan ekonomi Kabupaten Kulon Progo saat ini terpusat pada pengembangan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), hasil komoditas pertanian (sawah) serta pengembangan pariwisata khususnya pengembangan penunjang Kawasan Candi Borobudur. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peluang ekonomi yang signifikan, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan kelapa sawit, yang didukung dengan keberadaan industri pengolahannya secara lokal di daerah tersebut. Usaha perkebunan kelapa sawit ini sendiri telah berhasil menarik banyak tenaga kerja dan pemberdayaan kebun plasma oleh masyarakat. Kedua potensi ekonomi daerah tersebut tentu dapat dimanfaatkan sebagai alternatif strategi penghapusan kemiskinan ekstrem.

2) Kondisi sosial, budaya, demografis dan lingkungan :
demografi, pendidikan dan kesehatan

Ditinjau dari aspek demografi, terdapat perbedaan mencolok dalam jumlah penduduk antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Kulon Progo dihuni oleh sekitar 443.591 jiwa, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki populasi sekitar 263.786 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk di Kulon Progo tercatat sekitar 80% lebih banyak dibandingkan dengan Kotawaringin Barat. Selisih jumlah ini tentunya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam perbandingan tingkat kemiskinan antara kedua wilayah tersebut.

Dari segi pendidikan, angka lama sekolah kedua daerah sangat berbeda dimana Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka 9,17 memiliki rata-rata lama sekolah 9,17 tahun atau sudah menyelesaikan sekolahnya sampai dengan tingkat SMP, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Sedangkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 12,73 tahun. Artinya, memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,73 tahun atau setara dengan Diploma I. Aspek pendidikan ini juga kemungkinan besar berpengaruh terhadap angka kemiskinan dimana Kabupaten Kotawaringin Barat dengan angka yang lebih besar memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Kulon Progo. Aspek pendidikan dan sumber daya manusia ini pula menurut penelitian Nurul

Bariyah (2022) dan Willya Achmad dkk (2023) memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi sesuai dengan teori Demokrasi Sosial, dimana kemiskinan terjadi karena tidak meratanya akses pendidikan.

Dari segi kesehatan, realita yang menarik dapat dilihat dari angka harapan hidup dimana Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,28 tahun, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 70,68 tahun. Hal tersebut tentu menjadi catatan tersendiri dalam perspektif derajat hidup masyarakat yang seringkali dilihat dari angka harapan hidup.

3) Kekuatan politik, hukum dan pemerintah : Dukungan legislatif daerah

Seperti yang kita bersama bahwa lembaga legislatif daerah atau DPRD memiliki kewenangan didalam *budgeting*, legislasi dan pengawasan. Menurut hasil data sekunder penelitian yang telah diuraikan diatas, bahwa DPRD di kedua daerah memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah atau eksekutif untuk menangani kemiskinan. Dukungan ini dapat dimanfaatkan dalam membahas anggaran kemiskinan nantinya.

c. Pengukuran internal

1) Perencanaan

Perencanaan memberikan dasar untuk mengevaluasi sejauh mana upaya, pengeluaran, dan dampak yang muncul sejalan dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (David & David, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa

perencanaan merupakan kegiatan yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan, dalam hal ini adalah penghapusan kemiskinan ekstrem. Beberapa catatan terkait dengan perencanaan penghapusan kemiskinan ekstrem di kedua daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Database warga miskin ekstrem

Kedua Pemerintah Daerah masih menghadapi kendala validitas warga miskin *by name by address* yang semestinya *clear* dalam rangka penetapan program dan kegiatan agar tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan data warga miskin ekstrem dengan Surat Keputusan Bupati, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap penentuan sasaran program dan kegiatan OPD. Sehingga dalam konteks perencanaan, dapat terlihat strategi apa yang tepat untuk dilaksanakan sesuai dengan data warga miskin yang telah ditetapkan. Walaupun di internal Pemerintah Daerah masih ada persoalan terkait dengan sinkronisasi data kemiskinan ekstrem dengan pihak BPS, tetapi inisiatif Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan *by name by address* merupakan langkah awal yang tepat.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih berupaya untuk melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin *by name by address*, kesulitan validasi data warga miskin ekstrem tersebut salah satunya dikaitkan dengan kurangnya kompetensi aparatur di tingkat bawah khususnya di tingkat desa untuk

mencocokkan/memverifikasi kriteria miskin ekstrem dengan data P3KE maupun DTKS. Disamping itu juga yang menjadi perhatian adalah kurangnya koordinasi antar OPD.

Validitas data warga miskin ekstrem dapat dikatakan menjadi kunci dari formulasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Yuanzhi Guo dkk (2022) yang menunjukkan bahwa keakuratan data warga miskin berdampak pada program yang akurat dan tepat sasaran.

b) Keterpaduan Perencanaan Program dan Kegiatan

Selain persoalan data warga miskin ekstrem, kedua Pemerintah Daerah juga sama-sama menghadapi permasalahan ketidakpaduan program dan kegiatan OPD dalam rangka menysasar penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyadari bahwa pelaksanaan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dalam hal ini Bantuan Sosial telah mengcover data warga miskin ekstrem yang ada, begitu pula dengan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan dalam hal ini perbaikan RTLH telah dilaksanakan cukup masif dengan dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan masyarakat yang sebenarnya menjadi inti dari penghapusan kemiskinan ekstrem masih belum terlaksana secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun sejumlah program dan aktivitas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah ada sebelumnya. Integrasi program dan kegiatan OPD ini baru dilaksanakan setelah INPRES No. 4 Tahun 2022 diterbitkan, sehingga perencanaan program kegiatan khususnya program peningkatan pendapatan masyarakat masih belum menjangkau warga miskin ekstrem.

Disamping itu dari segi dokumen perencanaan RKPD masing-masing Pemerintah Daerah secara implisit mencantumkan penanganan kemiskinan ekstrem sebagai program prioritas. Hal ini tentu menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem telah masuk kedalam aspek perencanaan OPD dilingkup Pemerintah Daerah.

2) Pengorganisasian

Terkait dengan pembagian tugas untuk penanganan kemiskinan ekstrem, baik dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencantumkannya didalam RKPD masing-masing. Beberapa OPD yang memang terlibat langsung dalam program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem seperti OPD yang memiliki urusan sosial, perumahan rakyat, pendapatan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan tenaga kerja. Sedangkan masing-masing Pemerintah Daerah sepakat untuk

koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem ada di BAPPEDA.

3) Pemotivasian

Kedua Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan kemiskinan bukan hanya sekedar menjalankan perintah INPRES No. 4 Tahun 2022, tetapi memang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menangani kemiskinan. Oleh karena itu, pimpinan daerah di kedua Pemerintah Daerah sebagaimana pernyataan visi dan misi mengarahkan kepada OPD terkait untuk melaksanakan strategi penanganan kemiskinan ekstrem secara maksimal.

d. Analisis dan pilihan strategi

Berdasarkan hasil penelitian pada kedua Pemerintah Daerah, terlihat bahwa pilihan strategi yang diambil sebelum INPRES No. 4 Tahun 2022 adalah penanganan kemiskinan yang tersebar di OPD teknis sebagaimana rutinitas program dan kegiatan yang telah ada. Akan tetapi setelah INPRES No. 4 Tahun 2022, masing-masing Pemerintah Daerah mulai berbenah terutama terkait dengan validasi data warga miskin ekstrem dan keterpaduan program dan kegiatan antar OPD.

Setelah melakukan pembenahan dari segi data dan keterpaduan program dan kegiatan, masing-masing Pemerintah Daerah mulai menganalisis terkait dengan efektivitas penanganan kemiskinan ekstrem, yang pada realitanya tidak sesuai yang diharapkan atau kurang signifikan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kedua Pemerintah Daerah mengakui bahwa upaya penghapusan kemiskinan ekstrem belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama karena belum maksimalnya implementasi program-program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu, langkah-langkah dalam mengurangi beban pengeluaran serta penanganan wilayah-wilayah dengan konsentrasi kemiskinan telah dijalankan secara cukup efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, Dengan demikian, langkah kebijakan yang diterapkan oleh kedua pemerintah daerah menunjukkan adanya pendekatan strategi tertentu, yaitu: pertama, perbaikan data warga miskin ekstrem secara berkala. Kedua, meningkatkan koordinasi untuk keterpaduan program dan kegiatan antar OPD. Ketiga, penguatan strategi peningkatan pendapatan. Keempat, memperkuat penanganan kemiskinan ekstrem melalui inovasi-inovasi daerah khususnya Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan layanan pendidikan dan keterampilan.

C. Implementasi Strategi

Pelaksanaan strategi mencakup keseluruhan langkah dan keputusan yang diperlukan untuk merealisasikan rencana strategis. Proses ini melibatkan transformasi berbagai strategi dan kebijakan menjadi aksi nyata melalui penyusunan program, alokasi anggaran, serta penetapan prosedur operasional (Hunger & Wheelen, 2003).

1. Program-Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Implementasi strategi berupa program dibuat untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan (*action-oriented*). Dalam penelitian ini implementasi program didapat dari hasil wawancara dan dokumen RKPD yang mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

a. Program Pengentasan Kemiskinan Esktrek di Kabupaten Kulon Progo

Dalam rangka mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah merumuskan sejumlah program yang difokuskan pada tiga arah kebijakan utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan warga, serta menurunkan jumlah wilayah yang tergolong sebagai kantong kemiskinan.

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menangani kemiskinan ekstrem menyesuaikan terhadap

INPRES Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.

“Terkait dengan pelaksanaan pengentasan kemiskinan khususnya ekstrem, kita mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah pusat yaitu menindaklanjuti INPRES No 4 Tahun 2022, dengan tiga strateginya yang mungkin juga dilakukan di seluruh kabupaten kota, yang satu adalah mengurangi beban masyarakat, kedua peningkatan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Kita untuk pelaksanaan yang terkait dengan pengurangan beban masyarakat itu kan banyak dilakukan melalui bansos yang dalam hal ini baik itu dari pemerintah pusat, kabupaten maupun dari pemerintah provinsi. Kalau dari pemerintah pusat itu ada BLT PKH dan sebagainya, ada PBI untuk jaminan kesehatannya”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Berdasarkan keterangan diatas dari ketiga strategi kebijakan yang telah ditetapkan, disampaikan bahwa Pemerintah Kulon Progo telah melaksanakan program-program strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dalam hal ini Bantuan tunai dan non-tunai yang disalurkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, mencakup program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan dari segi kesehatan telah difasilitasi dengan PBI.



Gambar 4. 12 Peluncuran Program Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang Didanai APBD Tahun 2025 (23/02/2025)
Sumber : dinsos.kulonprogokab.go.id, 2025

Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, dijelaskan bahwa bantuan sosial yang berasal dari pemerintah kabupaten berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memang tersedia, meskipun jumlah nominal yang diberikan tidak sebesar bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Heri, seorang Penyuluh Sosial Ahli Muda dari instansi tersebut, yang turut memberikan penjelasan terkait hal ini.

“Dari kita kabupaten, ada yang namanya BPNT bantuan pangan non tunai dari APBD sekitar 4.400 yang mendapatkan modelnya hampir sama dengan provinsi cuma nominalnya 200.000, orangnya beda tidak boleh sama dengan penerima bantuan provinsi. Jadi itu bukan penerima PKH bukan penerima BPNT bukan penerima BLT-DD”. (Wawancara, 26 September 2024)

Kebijakan pemberian Bantuan Sosial baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bahkan Pemerintah Desa melalui BLT-DD telah membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluarannya terutama dari aspek kebutuhan pangan. Penyediaan bantuan sosial ini seringkali dalam bentuk paket sembako yang berisi beras, minyak goreng dan gula.

Di level pemerintahan tingkat bawah, Pemerintah Desa telah merealisasikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Salam Rejo Kapanewon Sentolo yang menyampaikan bahwa Pemerintah Desa telah memberikan BLT-DD kepada warga miskin di wilayahnya. Sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Kesra Muji didampingi Lurah Salam Rejo Dani Pristiawan sebagai berikut:

“Kalo di kita BLT DD kan sedikit hanya 42 KK, sebenarnya untuk tahun depan akan kita potong lagi karena dananya untuk kegiatan yang lain, karena kalau kita melihat kelurahan yang lain jumlahnya sudah di bawah semua, kalau tahun besok kita kurangi lagi. Kalau untuk BLT DD memang benar-benar seleksi dari padukuhan habis itu di Muskalsus”. (Wawancara, 25 September 2024)



Gambar 4. 13 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD tahap ke II ini di salurkan melalui BUMDes Kalurahan salamrejo (15/02/2021)

Sumber : salamrejo-kulonprogo.desa.id, 2021

Pemberian bantuan sosial ini masih diperlukan untuk membantu meringankan warga masyarakat miskin ekstrem, karena perlu disadari bahwa warga miskin ekstrem adalah mereka yang sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan ketiadaan keterampilan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Kendalanya itu namanya ekstrem, mereka posisinya itu adalah mereka yang tidak bisa apa-apa. Artinya mereka itu hanya tinggal menunggu uluran, beda dengan kelasnya agak tinggi kan bisa kita berdayakan dengan intervensi pemberdayaan masyarakat diberikan keterampilan apa, sehingga dari stimulan yang kita berikan itu mereka nanti mereka akan bergerak sendiri, tapi kalau kemiskinan

ekstrem ini, mereka sudah ga bisa apa-apa, tinggal menunggu bantuan pemerintah”. (Wawancara, 24 September 2024)

Walaupun pemberian Bantuan Sosial masih diperlukan oleh warga miskin ekstrem, pemberian Bantuan Sosial ini juga mendapat evaluasi dari BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo yang menyatakan bahwa muncul konflik sosial dikarenakan tidak meratanya pembagian Bantuan Sosial di level bawah. Hal sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“Perlu diberikan pemahaman adalah masyarakat miskin sendiri jadi jangan sampai masyarakat ini terbuai dengan kondisi bantuan sosial yang selama ini menjadi koornya pemerintah, walaupun itu baik, tapi untuk jangka panjang itu akan sangat menyusahkan karena ternyata setelah kita evaluasi ditingkat bawah itu satu konflik sosial cukup karena bansos yang kedua ketidakmerataan yang ketiga ketidakadilan itu menjadi catatan kami kenapa kita akan push strateginya ke strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Setelah mencermati pelaksanaan strategi kebijakan yang berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, khususnya melalui program Bantuan Sosial yang dinilai cukup membantu rumah tangga miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar, perhatian selanjutnya tertuju pada strategi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini turut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo, Restu Dewandaru.

“Nah setelah kita evaluasi ternyata yang sebenarnya menjadi titik kunci dalam kemiskinan ekstrem adalah di strategi nomor 2 (dua) pemberdayaan masyarakat, nah ini yang baru kita upayakan untuk kita tingkatkan untuk kita dorong supaya masyarakat itu lebih berdaya”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Pendekatan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan fokus strategi kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat menjadi target dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mendorong agar OPD untuk mengintervensi program dan kegiatan ke arah strategi kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“Lalu yang kedua itu data yang dari teman-teman OPD nanti akan diintervensi melalui program kegiatan yang sekiranya bisa mempush atau mendorong di strategi nomor 2 karena untuk bansos tidak dulu karena bansos sudah ada banyak sekali”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Implementasi strategi kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat salah satunya melalui pembentukan kelompok difabel kalurahan atau KDK. Kelompok ini sebagai wadah bagi warga masyarakat miskin terutama anggota masyarakat yang menyandang disabilitas di Kabupaten Kulon Progo, yang diharapkan dengan terbentuknya kelompok ini dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh

Sosial Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Heri sebagai berikut:

“Di bidang rehabilitasi sosial, yang menangani disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan dan pengemis itu kan memang kemarin yang intervensi yang dilakukan mungkin ada yang hubungan dengan kemiskinan ekstrem kalau kita menyasarnya ke disabilitas itu kana da beberapa program untuk mengembalikan fungsi disabilitas dalam peningkatan ekonomi itu ada bantuan modal usaha ada yang personal ada yang kelompok, kalurahan sekarang yang sudah menginisiasi ada kelompok difabel kalurahan atau KDK. Itu kita berikan stimulasi berupa modal usaha sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan proposal yang mereka akan laksanakan”. (Wawancara, 26 September 2024)

Dalam pelaksanaan program KDK yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2022 ini dapat membantu menambah penghasilan bagi anggota penyandang disabilitas. Beberapa kelompok telah berhasil berwirausaha dengan unit usaha pembuatan makanan ringan dari sumberdaya lokal. Sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Heri sebagai berikut:

“Alhamdulillah itu ada beberapa yang bisa berhasil, kalo sampel itu KDK kali agung dengan produknya mengolah “bengu” atau semacam kedelai dibuat keripik. Itu pemasarannya sudah lumayan sudah memberikan manfaat kepada anggotanya penambahan penghasilannya, diberikan dalam bentuk bantuan sosial, bantuan uang tapi dengan proposal. Kebutuhan individu atau kelompok, dengan mekanisme H-1 tahun pengajuan. Jumlah kelompok KDK yang sudah dibantu sejak tahun 2022 sudah 25 kelompok tahun 2022 itu hanya 5 kelompok tahun 2023 nambah 20 kelompok”. (Wawancara, 26 September 2024)



Gambar 4. 14 Proses produksi keripik kara benguk di dapur Mucuna Chips KDK Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, Sabtu (10/8/2024)

Sumber foto : detik.com, 2024

Disamping kedua strategi kebijakan yang telah dilakukan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah melaksanakan strategi kebijakan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dalam hal ini berupa bantuan RTLH atau Rumah Tinggal Layak Huni. Dalam pelaksanaan program RTLH ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggunakan data rekapitulasi yang didapat dari laporan Pemerintah Kalurahan terkait dengan jumlah RTLH di wilayah masing-masing, sehingga didapat jumlah RTLH Tahun 2022 sebanyak 8.108 unit. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Andini Staf Pelaksana di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

“Waktu itu 2022 8108 jumlah RTLH dan itu kita SK kan, itu suratnya dari lurah-lurah itu kita SK kan Kepala Dinas. Karena kan disini PU juga menangani RTLH, Dinsos juga ada, makanya kita SK kepala Dinas aja. Nah itu yang

kemudian walaupun dia tidak serta merta kita gunakan tapi kita juga jadikan bahan kroscek juga gitu. Pelaksanaan sudah dilakukan sejak tahun 2017”. (Wawancara, 26 September 2024)



Gambar 4. 15 Penjabat Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, secara simbolis melakukan peletakan batu pertama sebagai awal pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Selasa (01/10/2024)

Sumber foto : jogja.tribunnews.com, 2024

Dalam pelaksanaannya program RTLH ini telah direalisasikan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 sekitar 2.000 unit dari berbagai sumber pembangunan dan juga swadaya masyarakat, sehingga masih sisa sekitar 6.000 unit RTLH yang belum direalisasikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Andini Staf Pelaksana di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

“Kemaren itu ga cuman dari APBD kita juga dapat angka sekitar 6.400 an sisanya, berarti sekitar 2.000-an yang sudah direalisasikan tapi dari berbagai sumber maksudnya mungkin ada yang dia ada yang swadaya dibangun sendiri karena kelamaan”. (Wawancara, 26 September 2024)

Sinergi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo. Selain memperoleh dukungan dari Kementerian Sosial dalam bentuk program bedah rumah, bantuan juga datang dari pihak eksternal, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulon Progo melalui inisiatif yang dikenal dengan nama Program ALADIN (Atap, Lantai, dan Dinding). Informasi ini disampaikan oleh Hery, seorang Penyuluh Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

“Kalo rumah itu memang di beberapa wilayah masih kurang layak, di kami ada beberapa program dari kemensos terkait, terutama bedah rumah, dan BAZNAS ada program ALADIN atap lantai dan dinding, jadi bagi warga kulon progo yang rumahnya kurang layak huni dapat dari BAZNAS kabupaten, jadi rumah ada intervensinya sendiri juga”. (Wawancara, 26 September 2024)



Gambar 4. 16 Dr. H. R. Agung Setyawan, ST, MSc, MM selaku Bupati Kulon Progo, menyerahkan bantuan Program Bedah Rumah yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kulon Progo kepada tujuh warga di Kalurahan Wates, Senin (19/05/2025)

Sumber foto : instagram Pemkab Kulon Progo, 2025

Program RTLH ini mendapat perhatian juga mendapat perhatian dari Pemerintah Kalurahan sebagaimana disampaikan oleh Lurah Desa Banjarsari Muhyadi yang menyatakan bahwa beberapa anggota masyarakat Banjarsari mendapatkan bantuan RTLH baik dari Pemerintah Daerah maupun organisasi lain seperti Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini sebagaimana disampaikan Muhyadi sebagai berikut:

“RTLH saya itu tahun 2022 itu membuat SK RTLH di Banjarsari itu jumlah rumah itu sekitar 120/130/120 rumah, 120 rumah itu di tahun 2022 dapat bantuan dari BPSD itu selesai 30 rumah terus kemudian dari APBD Kabupaten itu 2022/2023 itu sekitar 5/6 rumah kemudian dari BAZDA itu dari BAZDA itu yang pasti 2 rumah”. (Wawancara, 30 September 2024)

Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 adalah masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, terutama terkait keberadaan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni (RTLH). Wilayah perbukitan yang relatif tertinggal tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi geografis yang menyebabkan mahalannya pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh daya dukung ekonomi masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang masih rendah. Beberapa kawasan perbukitan seperti di Kapanewon Samigaluh (meliputi Kalurahan Banjarsari, Purwoharjo, dan Kebonharjo) serta di Kapanewon Kokap (Kalurahan Kalirejo, Hargowilis, dan Hargotirto) merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang perlu ditangani melalui pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan menggerakkan potensi

ekonomi lokal. Pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur, baik dalam aspek fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Di Kabupaten Kulon Progo, permasalahan infrastruktur terutama berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu mutu layanan infrastruktur yang tersedia saat ini dan keterbatasan jumlah sarana yang masih dibutuhkan. Persoalan tersebut mencakup sektor transportasi, sistem irigasi, perumahan, ketersediaan air bersih, pasokan energi listrik, serta fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023b).

Dari tabel yang diambil dari website satudata.kulonprogokab.go.id terlihat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 jumlah program pengentasan kemiskinan sebanyak 4 program, sedangkan dari segi kegiatan pengentasan kemiskinan cukup meningkat signifikan dari tahun 2023 sebanyak 40 kegiatan menjadi 116 kegiatan di lingkup OPD.

Tabel 4. 3 Jumlah Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan mulai Tahun 2021 – 2024

Nama Elemen	Satuan	2021	2022	2023	2024
Upaya Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan					
Target Penurunan Angka Kemiskinan	Persen	18,38	16,39	15,64	15,62
Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Program	4	4	4	4

Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan	37	34	40	116
--	----------	----	----	----	-----

Sumber data : www.satudata.kulonprogokab.go.id, 2024

Jika dikaitkan antara persentase kemiskinan pada tahun 2023 yang mencapai 15,64 persen dengan pelaksanaan 40 kegiatan, serta angka kemiskinan tahun 2024 yang sedikit menurun menjadi 15,62 persen meskipun jumlah kegiatan meningkat menjadi 116, maka hal ini mengindikasikan bahwa bertambahnya jumlah kegiatan belum memberikan dampak berarti terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.

Sementara jika dilihat dari angka kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah disampaikan oleh BAPPEDA bahwa sejak dikeluarkannya INPRES Nomor 4 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai memadankan data warga miskin ekstrem, sehingga pada tahun 2022 jumlah warga miskin ekstrem sebanyak 10.418 orang, kemudian di Tahun 2023 menjadi 9.816 orang dan di Tahun 2024 menjadi 9 ribu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“Kemiskinan ekstrem itu di tahun 2020 awal/ 2021 kita ada 5,2 %, 14. 688, lalu di 2022 ada 10.418, lalu di 2023 kita ada di 9.816 kalo ga salah jadi berkurang tapi pengurangannya tidak terlalu signifikan. Jadi pemadanan data sudah kita lakukan sejak muncul INPRES karena kita harus memilah menggolongkan menjadi kemiskinan ekstrem kita libatkan pamong kalurahan dan KPKD yang

di Dinas Sosial untuk membantu memverifikasi memvalidasi, sesudah muncul data fix kita SK kan, Cuma di 2023 kita tidak meng SK kan karena turunnya tidak signifikan, di 2024 ini kita SK kan lagi yang 9 ribu sekian”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Jika dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang terjadi tiap tahunnya, maka dapat dikatakan jumlah kegiatan OPD yang meningkat terutama dari tahun 2022 sampai dengan 2024, berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo.

Adapun nama-nama program penanggulangan kemiskinan yang lebih umum sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024, Program penanggulangan kemiskinan yang berupa program-program bersasaran terbagi dalam 4 kelompok/klaster yaitu :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

Program bantuan sosial terpadu yang berfokus pada keluarga bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kondisi miskin. Program ini memiliki ciri utama berupa pemberian bantuan tunai langsung yang disertai dengan persyaratan tertentu, ditujukan kepada keluarga sangat miskin, miskin, hingga yang hampir jatuh miskin.

Ruang lingkup dari program ini melibatkan berbagai bentuk intervensi dalam kategori bantuan sosial yang terintegrasi dan berorientasi pada keluarga. Intervensi tersebut mencakup:

- 1) Dukungan berupa Program Sembako yang dibiayai APBN, bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai yang direplikasi melalui dana APBD, serta bantuan khusus untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak yatim/piatu, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) Bantuan di bidang pendidikan, khususnya berupa beasiswa yang ditujukan bagi pelajar dari keluarga kurang mampu;
 - 3) Fasilitas layanan kesehatan bagi warga miskin melalui penyediaan jaminan kesehatan;
 - 4) Bantuan sanitasi berupa pembangunan jamban (program jambanisasi) untuk keluarga yang tergolong miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

Kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan difokuskan pada upaya mengoptimalkan potensi dan memperkuat kapasitas warga miskin agar mereka mampu mengambil peran dalam pembangunan, sesuai dengan nilai-nilai dasar pemberdayaan masyarakat.

Bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, sarana pengolahan hasil pertanian dan perikanan, fasilitasi pemanfaatan pekarangan, padat karya infrastruktur, dan beberapa upaya untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil

Program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil dirancang untuk memperluas akses serta memperkuat kapasitas ekonomi mereka, antara lain : bantuan modal usaha PKH graduasi, bantuan pengembangan KUBE, bantuan bibit tanaman dan ternak, dan beberapa kegiatan yang bersifat pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

4. Kelompok Program Pendukung

Kelompok program pendukung bertujuan menunjang upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan dasar, dengan memperluas cakupan program yang berpihak pada rakyat (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023a)

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dilakukan beberapa terobosan yang merupakan inisiatif daerah, antara lain :

1. Mengetuk kepedulian sosial masyarakat dan dunia usaha melalui beberapa program antara lain :
 - 1) Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengurangan kemiskinan.

- 2) Program Bedah Rumah dengan sumber dana non APBD dan APBN.
 - 3) Pengoptimalan zakat profesi (PNS) melalui BAZDA dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
 - 4) Pembentukan Kader Penanggulangan Kemiskinan (1 orang 1 desa), terdiri dari sarjana yang direkrut untuk memberikan informasi sekaligus mendampingi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Modifikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan produk lokal dan penyaluran oleh e-warong yang dikembangkan dari kelompok usaha bersama (KUBE) binaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Produk lokal seperti beras lokal diproduksi oleh petani lokal yang dikoordinir oleh gapoktan binaan Dinas Pertanian dan Pangan. Produk telur dan ikan lele menggunakan produk dari peternak lokal yang dikoordinir oleh kelompok peternak binaan Dinas Pertanian dan Pangan.
 3. Gerakan “bela dan beli” Kulon Progo dalam upaya pemberdayaan produk lokal dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, diimplementasikan melalui :
 - 1) Batik motif khas Kulon Progo “Gebleg Renteng” untuk Pelajar, PNS serta masyarakat. Motif gebleg renteng ini telah disertifikasi Hak Cipta dari Menteri Hukum dan HAM No. C22201200068 tgl. 1 Agustus

2012. Kemudian juga mendapat Sertifikasi Hak Desain Industri dari Menteri Hukum dan HAM No. IDD 0000035113 tgl 11 Desember 2013. sebagai acuan dalam penggunaan pakaian bermotif Gebleg Renteng untuk seragam pegawai dan pelajar, telah dikeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 025/2171 tertanggal 2 Juli 2012.

- 2) Optimalisasi peran BUMD dalam peningkatan produk lokal. PDAM Tirta Binangun Kulon Progo memproduksi air minum dalam kemasan dengan merek “AirKu”, tersedia dalam bentuk gelas dan galon. Produk ini secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 Oktober 2013. Nama "AirKu" merupakan akronim dari Air Kulon Progo, yang mencerminkan semangat untuk memajukan daerah Kulon Progo. Air minum ini telah mengantongi Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 serta sertifikasi mutu ISO 9001:2008. Dalam proses produksinya, kapasitas produksi untuk kemasan gelas mencapai 2.400 unit per jam, sedangkan untuk galon mencapai 30 unit per jam. Selain itu, telah dikembangkan pula prototipe kemasan botol berukuran 600 ml. Pada awalnya, tahun 2013, distribusi produk ini masih terbatas untuk kebutuhan internal. Namun, setelah memperoleh SNI dan izin edar, pemasarannya secara komersial baru dimulai pada tahun 2014.

- 3) Pengembangan Perumda Aneka Usaha dengan usaha perbengkelan.
- 4) Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam :
 - a) Penyediaan beras yang bekerjasama dengan Bulog untuk menyediakan beras “Sehat” bagi warga miskin (Raskin ke Rasda).
 - b) Pembelian beras “Sehat” oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
 - c) Penyediaan beras premium “Menor–Melati Menoreh” yang merupakan beras galur murni Kulon Progo.
- 5) Batu Andesit untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan pemerintahan. Kabupaten Kulon Progo menyimpan potensi sumber daya batu andesit yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Samigaluh, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Nanggulan, dan Pengasih. Potensi ini dimanfaatkan melalui pemberdayaan industri kecil dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk memproduksi produk olahan seperti batu potong atau paving block.
- 6) Membangun Koperasi & kelompok usaha bagi masyarakat miskin. Toko Jejaring Waralaba diambil alih Koperasi menjadi Tomira (Toko Milik Rakyat).
- 7) Peningkatan pengelolaan Pasar Tradisional dilakukan di Pasar Jagalan 2 oleh KUD Sido Tentrem

Kalibawang dan Pasar Cikli oleh Koperasi Cikli Mandiri, Temon.

- 8) Promosi produk Teh Suroloyo, Kopi Suroloyo, gula semut, teh dan coklat Pagagan.
- 9) Menghidupkan semangat seni dan budaya lokal Kulon Progo melalui Senam Angguk Ceria Seri I dan II, Widya Wisata untuk kelas IV SD dan Sendratari Sugriwa Subali di berbagai event/acara. (BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2023a)

Selain itu, Kulon Progo menggandeng perguruan tinggi melalui program “One Village One University” untuk mendampingi desa-desa dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi. Sepuluh perguruan tinggi di DIY dilibatkan untuk mendampingi sepuluh desa, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan penguatan kelembagaan desa. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa sekaligus mendorong kemandirian ekonomi (Antara News, 2023).

Salah satu implementasi kerja sama itu diwujudkan oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melakukan program pengabdian masyarakat di 11 kelurahan di Kulon Progo. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan teknologi informasi, pengembangan potensi wisata desa, pemberian alat produksi, pelatihan ekonomi kreatif, dan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Hasilnya, terjadi penurunan angka kemiskinan ekstrem di kelurahan sasaran

berkat peningkatan kapasitas dan akses ekonomi masyarakat (UGM, 2024).

Terkait dengan implementasi program penanganan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, diakui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra sangat kesulitan dalam menangani kemiskinan ekstrem yang menurutnya lebih dari sekedar kemiskinan biasa sebagai berikut:

“Kendalanya itu namanya ekstrem, mereka posisinya itu adalah mereka yang tidak bisa apa-apa. Artinya mereka itu hanya tinggal menunggu uluran, beda dengan kelasnya agak tinggi kan bisa kita berdayakan dengan intervensi pemberdayaan masyarakat diberikan keterampilan apa, sehingga dari stimulan yang kita berikan itu mereka nanti mereka akan bergerak sendiri, tapi kalau kemiskinan ekstrem ini, mereka sudah ga bisa apa-apa, tinggal menunggu bantuan pemerintah”. (Wawancara, 24 September 2024)

Restu Dewandaru, selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo, turut menegaskan bahwa pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan oleh OPD di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berjalan secara optimal dan masih kurang terarah dalam menjangkau kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

“Teman-teman OPD itu kurang konsen atau kurang total ketika harus melakukan program pemberdayaan jadi pemberdayaan yang dilakukan itu *business as usuall* aja, kelompoknya ya itu itu saja sementara kami pengen ada kelompok yang memang harus menjadi prioritas karena dia punya modal minimal punya modal keinginan untuk lepas”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Jika dilihat dari implementasi program yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah merealisasikan program-program dari ketiga strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh INPRES Nomor 4 Tahun 2022, akan tetapi memang masih ada perlu perhatian penanganan kemiskinan ekstrem dari aspek strategi kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat yang memiliki tantangan didalam aktualisasinya oleh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

b. Program Pengentasan Kemiskinan Esktrek Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan strategi kebijakan sebagaimana diamanatkan oleh INPRES Nomor 4 Tahun 2022, Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Sekda Kotawaringin Barat, H. Rody Iskandar, S.Sos., M.Si, terutama strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagai berikut:

“Kalau kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem sudah beririsan, karena tadi orang yang miskin ekstrem tadi ada keluarganya stunting kemudian dia masuk keluarga yang tidak mampu. Jadi yang masuk kedalam miskin ekstrem itu adalah keluarga tidak mampu, DTKS nya pasti masuk, Bansosnya pasti masuk. Tinggal kita membersihkan dari orang tidak mampu ini, yang sangat tidak mampu atau yang sangat miskin itu masuk yang miskin ekstrem”.
(Wawancara, 12 Juli 2024)

Implementasi program yang mendukung strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat ini diakui juga oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyebutkan bahwa walaupun data warga miskin ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat belum ditetapkan, akan tetapi program perlindungan sosial dalam hal ini Bantuan Sosial telah dilakukan khususnya bagi warga masyarakat miskin. Sebagaimana diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Citra sebagai berikut:

“Kemiskinan itu kan 3 strateginya mengurangi beban, meningkatkan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan, kalo bantuan yang mengurangi beban insyaallah tepat sasaran cuman yang kalau meningkatkan pendapatan ini yang susah mereka yang ada di lokusnya itu, tetapi belum tentu menyasar ke individunya”. (Wawancara, 16 Juli 2024)



Gambar 4. 17 Pendampingan penyaluran bantuan sosial BPNT dan PKH di Bank Himbara Cabang Sungai Rangit dilakukan oleh Dinsos Kotawaringin Barat (25/01/2024)
Sumber foto : mmc.kotawaringinbaratkab.go.id, 2024

Dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, beberapa program perlindungan sosial telah dilakukan diantaranya Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat dalam hal ini PKH dan BPNT, Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia sedangkan Pemerintah Desa melalui BLT-DD. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat, Muhammad Daoed sebagai berikut:

“Bantuan Sosial dari langsung dari kementerian melalui Bank HIMBARA. Kami cuma pemberitahuan. BANSOS pmda lewat APBD Bidang rehabilitasi sosial tapi itu untuk disabilitas, penyandang cacat, lansia tidak terurus”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Disamping itu juga, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan bantuan sosial dalam rangka antisipasi inflasi daerah dengan penerima manfaat menggunakan DTKS. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Penyuluh Sosial Ahli Muda, Piet Dono sebagai berikut:

“Terkait untuk daerah kita ada, kemaren di akhir tahun (2023) ada untuk inflasi dari dana daerah, kami cuma menyiapkan datanya aja itu dari dana DBH DR dari Provinsi mengambil data dari DTKS”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Di level Pemerintah Desa juga telah melaksanakan penyaluran BLT-DD, dalam hal ini Pemerintah Desa Kubu Kecamatan Kumai. Mekanisme pemberian BLT-DD ini melalui Musyawarah Desa dimana dalam forum tersebut akan ditetapkan penerima BLT-DD yang diusulkan oleh masing-masing RT. Hal

tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Kesra Desa Kubu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Rabul sebagai berikut:

“Sesuai data per RT, Pak. Kami kan misalnya MUSDES, seluruh tahunnya musdis. Nah, nanti kami kumpulkan RT-nya. Di sini kan RT-nya kan 10 RT. Kami kumpulkan 10 RT. Kami minta datanya sesuai yang katanya tadi, Pak, yang ibarat data sakit penahun, rumah, janda, mata pencaharian, ketidakberdayaan, Pak. Nah, itu bisa kami masukkan dari RT-nya. Sesuai permintaan RT, Pak”. (Wawancara, 25 Juli 2024)

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, terdapat 11 Kelurahan yang menarik untuk dikonfirmasi terkait dengan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan konfirmasi kepada Lurah Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Ramadana Sahida menyampaikan bahwa pihak Kelurahan dalam Ibukota Kabupaten tidak memiliki program dan kegiatan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem dalam hal bentuk Bantuan Sosial, dikarenakan keterbatasan wewenang Kelurahan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Gak ada anggaran Kelurahan yang bisa diarahkan ke sana karena memenuhi Permendagri (Permendagri tentang Anggaran Kelurahan) ya. Sebenarnya kita yang mau, tapi Kelurahan yang membatasi kita”. (Wawancara, 18 Juli 2024)

Berkenaan dengan belum ditetapkannya data warga miskin ekstrem oleh Pemerintah Daerah, maka OPD terkait kesulitan untuk memberikan informasi terkait dengan program-program dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya mengambil data sekunder dari Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Nama Program Pemerintah Daerah dalam Strategi
Penghapusan Kemiskinan Eskترم

No.	Nama Program	OPD Pengampu
Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat		
1	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial	
3	Pemberdayaan Sosial	
4	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat		
1	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Penempatan Tenaga Kerja	
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
5	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Dinas Peridag dan UMKM
6	Pengembangan UMKM	
7	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
Strategi Pengurangan Kantong-kantong Kemiskinan		
1	Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Peningkatan Kerjasama Desa	
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
4	Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	

Sumber data : Laporan RFK Bappeda Kab. Ktw. Barat 2024, diolah

Dari data program yang disampaikan dalam laporan RFK penanganan kemiskinan ekstrem Tahun 2023 tersebut terlihat bahwa program-program telah disesuaikan dengan INPRES Nomor 4 Tahun 2022, yang membagi pemilahan program berdasarkan strategi kebijakan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Tabel 4. 5 Data Jumlah Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 – 2024

Nama Elemen	Satuan	2023	2024
Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Program	18	33
Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Kegiatan	34	42

Sumber data : Laporan RFK Bappeda Kab. Ktw. Barat 2024, diolah

Tinjauan terhadap data program yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah program dan kegiatan pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan integrasi berbagai program dan kegiatan lintas OPD sebagai bagian dari strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Akan tetapi memang masih memiliki kelemahan dalam menysasar warga miskin ekstrem *by name by addres*. Sebagaimana informasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyatakan bahwa selain bantuan sosial atau strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, program-program

lain masih bersifat mengumpulkan program dan kegiatan di OPD yang belum menysasar kepada data warga miskin ekstrem per individu. Hal sebagaimana diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Citra sebagai berikut:

“Kemiskinan itu kan 3 (tiga) strateginya mengurangi beban, meningkatkan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan, kalo bantuan yang mengurangi beban *insyaallah* tepat sasaran cuman yang kalau meningkatkan pendapatan ini yang susah mereka yang ada di lokusnya itu, tetapi belum tentu menysasar ke individunya. Apalagi kita taunya sudah di tagging itu kan di awal tahun 2024, kami sendiri tidak dapat soundingnya dari PUSDATIN juga tidak ada”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat turut menyampaikan pandangan yang sejalan terkait hal tersebut, implementasi program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilakukan dikarenakan program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang merupakan dasar dari kewajiban pemerintah daerah, akan tetapi memang untuk menysasar kemiskinan ekstrem perlu pendalaman data lebih lanjut.

“Kalau kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem sudah beririsan, karena tadi orang yang miskin ekstrem tadi ada keluarganya stunting kemudian dia masuk keluarga yang tidak mampu. Jadi yang masuk kedalam miskin ekstrem itu adalah keluarga tidak mampu, DTKS nya pasti masuk, Bansosnya pasti masuk. Tinggal kita membersihkan dari orang tidak mampu ini, yang sangat tidak mampu atau yang sangat miskin itu masuk yang miskin ekstrem”. (Wawancara, 12 Juli 2024)

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, tingkat kemiskinan secara umum di wilayah tersebut mengalami kenaikan. Pada Maret 2024, tercatat bahwa 5,17 persen dari total penduduk berada dalam kategori miskin, mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2023. Dari segi jumlah, penduduk miskin di bulan Maret 2024 mencapai sekitar 145,63 ribu jiwa, atau bertambah sekitar 3,46 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara jika dilihat dari angka kemiskinan ekstrem sebagaimana yang telah disampaikan oleh BAPPEDA di Tahun 2023 jumlah warga miskin ekstrem sebanyak 3.151 jiwa, walaupun data masih belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Sebagaimana disampaikan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Citra Romantika sebagai berikut:

“Kemaren ada provinsi datang minta data, saya bingung data yang mana ini. Kasihkan yang terbaru aja yang terupdate, yang 3.151, ini belum di SK kan. Kita mau pakai yang mana yang penting ada kejelasan, karena sasarannya harus jelas. Setelah ini ada SK kita kumpulkan desa/kelurahan kita buat seperti stunting (intervensi). Jadi arahnya 2025 kesini lho. Ini sudah setengah jalan RPJPD sudah jadi. Saya bingung. 3.151 itu hasil dari maret 2024 kan kita nanti rencananya tiap tahun di update”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Menurut Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Kotawaringin Barat yang dilaksanakan di BAPPEDA Kab. Ktw. Barat, jumlah Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat Per Desember 2024 berjumlah 2.520 jiwa

(BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2025). Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat ada penurunan angka warga miskin ekstrem yang sebelumnya sebanyak 3.151 di Tahun 2023 menjadi 2.520 di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan ada realisasi positif antara pelaksanaan program OPD dan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disamping itu, dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Daerah juga seringkali memfasilitasi aktivitas UMKM dalam berbagai even. Salah satu even yang menjadi inovasi daerah adalah Begoyap. Istilah "Begoyap" berasal dari bahasa daerah rumpun Kutaringin yang digunakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan merujuk pada kebiasaan berjalan-jalan di malam hari sebagai sarana untuk menghilangkan rasa lelah atau stres. Pemilihan istilah ini bertujuan agar lebih dekat dan dikenal masyarakat setempat serta memiliki daya tarik dalam strategi pemasaran. Kegiatan ini berupa ajang berkumpulnya para pelaku UMKM yang berjualan dalam sebuah event "Begoyap" sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pertama kali dilaksanakan pada 8 September 2019, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 120 pelaku UMKM dari Kelurahan Raja sebagai upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Seiring waktu, "Begoyap" mengalami pertumbuhan signifikan dan telah ditiru di berbagai kelurahan dan desa lainnya, hingga akhirnya dikenal luas di tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat. Program ini membuka peluang usaha bagi UMKM di tengah kondisi ekonomi yang

sulit, terlihat dari tingginya partisipasi baik dari sisi pedagang maupun pengunjung (BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat, 2022).



Gambar 4. 18 Hj. Nurhidayah selaku Bupati Kotawaringin Barat secara resmi memulai pelaksanaan Bazaar Begoyap yang digelar di kawasan Pangkalan Bun Park, Sabtu (19/3/2022)
Sumber foto : mmc.kotawaringinbaratkab.go.id, 2022

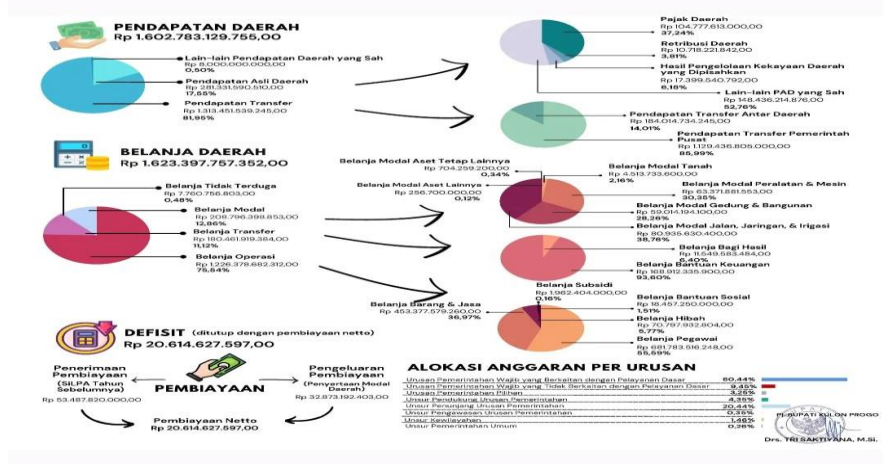
Dari penjelasan terkait implementasi program strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa program-program penanganan kemiskinan pada dasarnya telah dilaksanakan, akan tetapi memang program yang menyasar warga miskin ekstrem belum terlaksana dikarenakan data warga miskin ekstrem yang belum ditetapkan serta program-program OPD yang masih belum bersentuhan dengan warga miskin ekstrem kecuali program bantuan sosial yang diberikan secara masif dan telah meng-cover keseluruhan data DTKS.

2. Anggaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Setelah seluruh program dirancang dengan matang, langkah berikutnya adalah menyusun rencana anggaran. Proses penyusunan anggaran ini menjadi tahapan akhir bagi manajemen untuk menilai kembali kelayakan strategi yang telah ditetapkan. Melalui perhitungan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program tertentu, manajemen dapat mengidentifikasi apakah strategi yang tampak ideal secara teoritis ternyata memiliki kekurangan atau bahkan tidak dapat diwujudkan dalam praktik (Hunger & Wheelen, 2003). Implementasi anggaran pada penelitian ini dilihat dari struktur APBD terutama Bantuan Sosial dan data pada dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).

a. Anggaran Pengentasan Kemiskinan Esktrem di Kabupaten Kulon Progo

Sebelum penelitian ini menjelaskan tentang implementasi anggaran strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo, akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 dan 2024 sebagai gambaran struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.



Gambar 4. 19 Infografis APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023

Sumber : Instagram BKAD Kulon Progo, 2023

Dalam infografis APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 tersebut terlihat bahwa APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.656.270.949.755,00. Dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.602.783.129.755,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.623.397.757.352,00. Adapun Belanja Daerah yang perlu diperhatikan adalah Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 18.457.250.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 70.797.932.804,00.

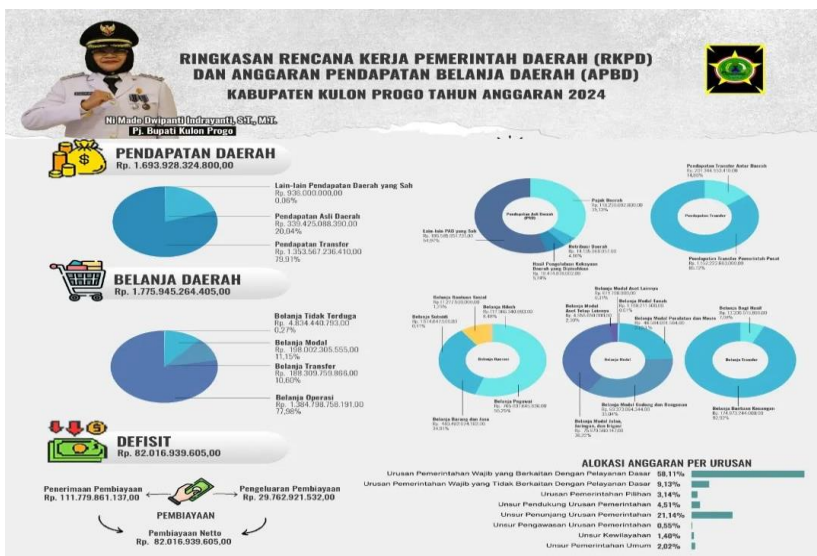
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya berjumlah Rp. 1.656.270.949.755,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 175.643.943.207,00, sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 1.831.914.892.962,00.

Rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah: Awalnya tercatat sebesar Rp1.602.783.129.755,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp63.857.528.378,00. Dengan demikian, total pendapatan setelah penyesuaian menjadi Rp1.666.640.658.133,00.
2. Belanja Daerah: Pada awalnya dialokasikan sebesar Rp1.623.397.757.352,00 dan kemudian naik sebesar Rp162.643.943.207,00. Setelah perubahan, total belanja daerah menjadi Rp1.786.041.700.559,00.
3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan Pembiayaan: Semula direncanakan sebesar Rp53.487.820.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp111.786.414.829,00.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan: Awalnya sebesar Rp32.873.192.403,00 dan bertambah Rp13.000.000.000,00, sehingga totalnya menjadi Rp45.873.192.403,00 setelah perubahan.
 - c. Pembiayaan Neto: Setelah perubahan, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp119.401.042.426,00.

Anggaran Belanja untuk Bantuan Sosial yang semula sebesar Rp. 18.457.250.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 418.200.000,00. Dengan demikian, total anggaran belanja bantuan sosial setelah perubahan menjadi Rp.

18.875.450.000,00. Sementara itu, alokasi Belanja Hibah yang sebelumnya berjumlah Rp. 70.797.932.804,00 meningkat sebesar Rp. 32.353.445.720,00, sehingga total Belanja Hibah setelah penyesuaian mencapai Rp. 103.151.378.524,00.



Gambar 4. 20 Infografis APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Sumber : Instagram BKAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

Menurut Infografis APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024, APBD Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.805.708.185.937,00. Dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.693.928.324.800,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.775.945.264.405,00. Adapun Belanja Daerah yang perlu diperhatikan adalah Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 17.277.500.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 117.366.340.893,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.805.708.185.937,00 bertambah sebesar Rp. 66.360.784.885,00 sehingga menjadi Rp. 1.872.068.970.822,00.

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah, semula Rp. 1.693.928.324.800,00 bertambah Rp. 47.672.913.890,28. Sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.741.601.238.690,28;
2. Belanja daerah, semula Rp1.775.945.264.405,00 bertambah Rp78.860.784.885,00. Sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.854.806.049.290,00;
3. Pembiayaan daerah, Penerimaan Pembiayaan semula Rp. 111.779.861.137,00 bertambah Rp. 18.687.870.994,72. Sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 130.467.732.131,72. Pengeluaran Pembiayaan semula Rp. 29.762.921.532,00 berkurang Rp. 12.500.000.000,00. Sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 17.262.921.532,00.

Nilai anggaran belanja untuk bantuan sosial awalnya sebesar Rp. 17.277.500.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 52.200.000,00, sehingga total anggaran belanja bantuan

sosial setelah revisi menjadi Rp. 17.329.700.000,00. Sementara itu, anggaran belanja hibah yang sebelumnya sebesar Rp. 117.366.340.893,00 bertambah Rp. 7.534.647.406,00, sehingga jumlah akhir belanja hibah setelah perubahan mencapai Rp. 124.900.988.299,00.

Apabila melihat data dari RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 di Kabupaten Kulon Progo bahwa anggaran yang diakomodir untuk penanggulangan kemiskinan sangatlah besar mencapai Rp. 220,3 Milyar pada dan realisasi sebesar Rp. 206,9 pada tahun 2022. Jumlah anggaran tersebut naik menjadi 306,8 Milyard pada Tahun 2023. Sedangkan untuk Tahun 2024 meningkat sebesar Rp. 343,3 Milyard.

Dari jumlah anggaran tersebut diatas, anggaran strategi pengurangan kanton-kantong kemiskinan mendapat porsi yang lebih besar. Artinya perbaikan RTLH mendapatkan prioritas dalam kebijakan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan kedua strategi lainnya. Sehingga wajar apabila kita melihat data dari anggaran belanja bantuan sosial pada struktur APBD cukup rendah dibandingkan anggarannya lainnya.

Tabel 4. 6 Rencana dan Realisasi Belanja untuk Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dan 2023

Kl as ter	Rincian	Anggaran (Rp)		Anggaran (Rp)	
		Rencana	Realisasi Tahun 2022	Rencana	Realisasi s.d semester 1 2023
1	Program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga	20.386.648. 308	19.290.487.8 57	128.259.368. 600	78.673.014.5 31
2	Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaa n masyarakat	20.878.006. 863	25.315.435.7 67	102.942.086. 250	39.229.694.7 13
3	Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaa n UMKM	12.689.327. 825	11.049.131.0 28	41.383.643.8 50	10.458.625.2 12
4	Program penanggula ngan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatk an akses terhadap	166.421.580. 078	151.271.666. 125	34.250.266.2 61	13.282.073.8 46

	ketersediaan pelayanan dasar dan kualitas hidup masyarakat miskin				
Jumlah		220.375.563.074	206.926.720.777	306.835.364.961	141.643.408.302

Sumber data : Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Tabel 4. 7 Rencana Belanja untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024

No	Rincian Program		Anggaran (Rp)
1	Menurunkan beban Pengeluaran	Program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga	28.914.339.500
2	Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan	a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	54.084.669.992
		b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil	52.994.219.390
3	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan	Program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan kualitas hidup masyarakat miskin	207.365.522.872
	Jumlah		343.358.751.754

Sumber data : Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2024

Terkait dengan implementasi anggaran penanganan kemiskinan ekstrem memang diakui oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru bahwa anggaran Pemerintah Daerah sangat terbatas untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi kendala untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo.

“Karena memang kondisinya di setiap kabupaten berbeda-beda. Mungkin ada yang dengan kemampuan keuangan yang tinggi bisa membuat intervensi yang lebih leluasa sedangkan kami dengan fiskal yang terbatas ya kami harus benar benar profitas.” (Wawancara, 1 Oktober 2024)

b. Anggaran Pengentasan Kemiskinan Esktrek di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebelum penelitian ini menjelaskan tentang implementasi anggaran strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat, akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dan 2024 sebagai gambaran struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, ditetapkan bahwa total APBD untuk tahun tersebut mencapai Rp. 1.559.572.915.000,-. Pendapatan Daerah dirinci sebesar Rp. 1.500.641.519.000,-, sedangkan Belanja Daerah mencapai Rp. 1.519.572.915.000,-. Dari Belanja Daerah

tersebut, yang menjadi perhatian khusus adalah Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.174.500.000,- dan Belanja Hibah yang berjumlah Rp. 50.503.588.290,-.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa jumlah awal APBD Tahun 2023 sebesar Rp 1.559.572.915.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp 178.213.451.954,-. Dengan penambahan tersebut, total anggaran menjadi Rp 1.737.786.366.954,-. Adapun detail perubahan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, Jumlah pendapatan daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp1.500.641.519.000 mengalami peningkatan sebesar Rp35.296.730.000. Dengan demikian, total pendapatan daerah setelah dilakukan perubahan mencapai Rp1.535.938.249.000.
2. Belanja Daerah, Awalnya, anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.519.572.915.000. Namun, terdapat tambahan belanja sebesar Rp148.625.181.600, sehingga total belanja setelah perubahan menjadi Rp1.668.198.096.600.
3. Pembiayaan Daerah, Pada sisi pembiayaan, penerimaan yang semula berjumlah Rp58.931.396.000 meningkat sebesar Rp142.916.721.954. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tetap berada di angka Rp40.000.000.000. Dengan kondisi

tersebut, pembiayaan neto setelah perubahan mencapai Rp161.848.117.954.

Anggaran Belanja untuk Bantuan Sosial yang awalnya sebesar Rp2.174.500.000,- mengalami penambahan sebesar Rp156.785.000,-, sehingga totalnya setelah perubahan menjadi Rp2.331.285.000,-. Sementara itu, alokasi Belanja Hibah yang semula sebesar Rp50.503.588.290,- turut mengalami peningkatan sebesar Rp26.369.759.330,-, menjadikan total Belanja Hibah pasca perubahan mencapai Rp76.873.347.620,-.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dijelaskan bahwa total APBD yang semula berjumlah Rp. 1.706.438.256.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 304.342.012.283,- sehingga total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 2.010.780.268.283,-.

Rincian perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan, dari sebelumnya sebesar Rp1.653.138.029.000,- menjadi Rp1.845.997.026.000,- setelah adanya penambahan sebesar Rp192.858.997.000,-.
2. Belanja Daerah juga mengalami penyesuaian ke atas, dari nilai awal sebesar Rp1.684.438.256.000,- bertambah

sebesar Rp283.283.198.000,-, sehingga total belanja setelah perubahan menjadi Rp1.967.721.454.000,-.

3. Pembiayaan Daerah menunjukkan adanya kenaikan pada sisi penerimaan, dari yang semula sebesar Rp53.300.227.000,- bertambah Rp111.483.015.283,-, sehingga total penerimaan pembiayaan menjadi Rp164.783.242.283,-. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada angka Rp22.000.000.000,-, sehingga selisih pembiayaan setelah perubahan mencapai Rp142.783.242.283,-.

Untuk pos Belanja Bantuan Sosial, anggaran awal yang sebesar Rp1.106.750.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp732.750.000,-, sehingga total anggaran setelah penyesuaian menjadi Rp1.839.500.000,-. Sementara itu, pada pos Belanja Hibah, semula dialokasikan dana sebesar Rp82.125.304.403,- dan mengalami penambahan sebesar Rp6.411.693.080,-. Dengan demikian, jumlah keseluruhan anggaran untuk Belanja Hibah setelah perubahan mencapai Rp88.536.997.483,-.

Berdasarkan data APBD tersebut diatas, terlihat bahwa tren Belanja Bantuan Sosial yang turun jumlahnya dari Tahun 2023 ke Tahun 2024, dimana jumlah Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar 2,3 Milyard menjadi 1,8 Milyard di Tahun 2024.

Berkenaan dengan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem, berdasarkan data dari Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023 terlihat bahwa jumlah anggaran penanganan kemiskinan ekstrem untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebesar Rp. 39.060.590.632,- dan realisasinya sebesar Rp. 39.408.217.772,-.

Tabel 4. 8 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat Tahun 2023

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)
1	3	5	6	7	8	9
1	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	13.712.400	APBD Kab/Kota	98.852.300
2			Penyediaan Permakanan	86.048.000	APBD Provinsi	98.852.300
3			Penyediaan Sandang	12.964.960	APBD Kab/Kota	216.495.000
4			Penyediaan Sandang	209.280.000	APBD Provinsi	216.495.000
5			Penyediaan Alat bantu	13.513.500	APBD Kab/Kota	53.324.400
6			Penyediaan Alat bantu	38.509.000	APBD Provinsi	53.324.400
7		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	205.807.000	APBD Provinsi	205.100.000
8			Pengelolaan Data	1.849.146.772	APBN	1.845.871.770

			Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
9			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.088.800.000	APBN	5.088.800.000
10		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	181.610.000	APBD Provinsi	181.610.000
11	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.835.699.000	APBD	30.825.129.602
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar	200.000.000	APBD	199.367.000

13			Pengadaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	APBD	199.496.000
14			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	50.000.000	APBD	50.000.000
15			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	75.500.000	APBD	75.500.000
Jumlah Total				39.060.590.632		39.408.217.772

Sumber data : Laporan RFK Bappeda Kab. Ktw. Barat 2024, diolah

Dari Tabel anggaran strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat tersebut, dapat terlihat bahwa anggaran untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas sangatlah besar dibandingkan dengan anggarannya lainnya yakni sebesar Rp. 30,8 Milyard, hal ini dalam rangka mendukung program iuran gratis BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kotawaringin Barat khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Disamping pendanaan anggaran yang bersumber dari APBD, terdapat juga program dengan anggaran dari APBD Provinsi dan APBN.

Anggaran strategi peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 5.354.552.243,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.342.687.149,-. Alokasi anggaran yang cukup besar di kegiatan pengadaan benih/bibit ternak pada Dinas Pertanian dengan sasaran kelompok ternak masyarakat. Disamping itu juga ada anggaran untuk fasilitasi UMKM dengan nominal yang cukup besar yang diharapkan dapat mengembangkan UMKM lokal.

Tabel 4. 9 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi peningkatan pendapatan Tahun
2023

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)
1	3	5	6	7	8	9
1	Dinas Sosial	Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	345.000.000	APBD Kab/Kota	345.000.000
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	352.996.032	APBD Kab/kab	350.822.710
3		Program Penempatan	Job Fair / Bursa Kerja	40.348.280	APBD Kab/kab	39.954.180

		Tenaga Kerja				
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	693.890.883	APBD Kab/kab	693.481.055
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	14.496.000	APBD Kab/kab	14.496.000
6		Program Pengembangan Umkm	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta design dan teknologi	712.613.524	APBD Kab/kab	703.725.680

7	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	400.200.000	APBD Kab/kab	400.200.000
8			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.795.007.524	APBD Kab/kab	2.795.007.524
Jumlah Total				5.354.552.243		5.342.687.149

Sumber data : Laporan RFK Bappeda Kab. Ktw. Barat 2024, diolah

Anggaran strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan jumlah total sebesar Rp. 4.229.819.960,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.184.927.307,-. Anggaran yang cukup besar di kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan jumlah sebesar Rp. 1,4 Milyar. Anggaran ini tentu sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin yang kesulitan dalam membangun atau memperbaiki rumahnya yang memang memiliki status kurang layak.

Tabel 4. 10 Jumlah anggaran Pemerintah Daerah dalam strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)
1	3	5	6	7	8	9
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	893.162.550	APBD Kab/Kota	849.867.017
2		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	44.999.810	APBD Kab/Kota	44.168.810
3		Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Pra MAD/MAD dan Rakor Kelembagaan BKAD	9.999.800	APBD Kab/Kota	9.999.800
4		Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	35.600.000	APBD Kab/Kota	35.280.000
5		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Permanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.980.650	APBD Kab/Kota	9.831.100

		dan Masyarakat Hukum Adat				
7		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa,Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	4.999.650	APBD Kab/Kota	4.799.650
8		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa, Adat Desa/Kel dan Masyarakat Hukum Adat	75.465.500	APBD Kab/Kota	75.368.930
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.400.000.000	APBD Kab/Kota	1.400.000.000

10	Dinas PUPR	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	551.612.000	APBD Kab	551.612.000
11		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.204.000.000	APBD Kab	1.204.000.000
Jumlah Total			4.229.819.960		4.184.927.307	

Sumber data : Laporan RFK Bappeda Kab. Ktw. Barat 2024, diolah

Sejumlah alokasi dana telah disiapkan guna mendukung pelaksanaan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022. Pada tahun 2023, total anggaran yang tersedia mencapai Rp48.644.962.835,-, sementara jumlah yang telah terealisasi bahkan sedikit melebihi, yaitu sebesar Rp48.935.832.228,-. Dari keseluruhan dana tersebut, proporsi terbesar-yakni sekitar 80 persen-dialokasikan untuk strategi yang berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan Citra Romantika, Perencana Ahli Muda dari BAPPEDA, yang menyoroti pentingnya keseimbangan dalam penggunaan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Masih di lokusnya atau tempatnya. Kemiskinan itu kan 3 strateginya mengurangi beban, meningkatkan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan, kalo bantuan yang mengurangi beban *insyaallah* tepat sasaran cuman yang kalau meningkatkan pendapatan ini yang susah mereka yang ada di lokusnya itu, tetapi belum tentu menasar ke individunya”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Kondisi ini menggambarkan bahwa keberpihakan anggaran masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan warga dan menanggulangi wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan.

3. Prosedur program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

SOP berisi rincian berbagai aktivitas yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah program. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada prosedur untuk strategi pengurangan kantong-kantong wilayah kemiskinan dalam hal ini adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Alasan fokus terhadap program ini dikarenakan untuk program Bantuan Sosial dapat dikatakan prosedur pelaksanaannya kemungkinan sama karena telah diatur oleh Pemerintah Pusat terutama Bantuan Sosial yang bersumber dari Kemensos. Sedangkan program RTLH sendiri diinisiasi oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

a. Prosedur Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kulon Progo

Program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kulon Progo diatur melalui Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2015 yang berisi pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi rumah-rumah yang tidak layak huni. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pengurangan angka kemiskinan. Dalam regulasi tersebut, RTLH diartikan sebagai tempat tinggal yang belum memenuhi standar kelayakan dari segi kesehatan, keamanan, serta aspek sosial.

Sementara itu, Rehabilitasi Sosial RTLH (RS RTLH) merupakan bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada warga yang dinilai memenuhi kriteria tertentu. Tujuannya adalah agar rumah tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai hunian yang layak, baik dari sisi fisik—yakni aman dan mendukung

kesehatan jasmani dan rohani—maupun dari sisi psikologis yang menciptakan kenyamanan, serta secara sosial mampu menjaga privasi dan menjadi tempat pembinaan serta pendidikan bagi keluarga.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam regulasi tersebut, rumah dikategorikan sebagai tidak layak huni apabila memenuhi sejumlah kondisi berikut:

- a. Luas lantai bangunan per individu kurang dari 8 meter persegi;
- b. Struktur dinding mengalami kerusakan atau dibangun menggunakan material yang bersifat sementara dan mudah rapuh;
- c. Bagian atap dalam keadaan rusak atau menggunakan bahan yang tidak awet dan rentan rusak;
- d. Lantai rumah terbuat dari tanah atau material lain yang telah mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan kesehatan penghuni;
- e. Tidak tersedia sarana dasar seperti kamar mandi, tempat mencuci, dan toilet; serta
- f. Secara keseluruhan, bangunan tidak memenuhi standar kelayakan sebagai hunian sehat.

Kriteria calon penerima bantuan Rumah Sehat RTLH adalah sebagai berikut:

- a. Warga yang berdomisili di daerah tersebut dan memiliki bukti berupa KTP;
- b. Merupakan warga Kabupaten Kulon Progo yang telah menikah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan berstatus

sebagai kepala keluarga dari keluarga miskin yang menghuni atau memiliki rumah yang tergolong tidak layak huni;

- c. Prioritas diberikan kepada keluarga yang kepala keluarganya telah berusia lanjut, atau yang masih berusia muda namun berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem;
- d. Diutamakan tercantum dalam daftar penduduk miskin yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati; serta
- e. Rumah yang akan diperbaiki berdiri di atas lahan milik pribadi atau lahan milik orang lain dengan disertai surat pernyataan kesediaan dari pemilik lahan tersebut. Sedangkan untuk penerima RS RTLH dengan kriteria sebagai berikut :

Adapun bantuan perbaikan RTLH di Kabupaten Kulon Progo adalah perbaikan rumah yang telah ada bentuknya bukan membangun bangunan baru. Bantuan rehabilitasi yang disediakan sebesar Rp. 20.000.000,- per rumah dengan ketentuan peruntukkan yang telah diatur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahli Teknik Bangunan Dinas PU Bidang Perkim Muhammad Nuur sebagai berikut:

“Jadi yang 20 juta APBD itu kan istilahnya peningkatan kualitas, jadikan perbaikan rumah, sudah ada rumahnya terus diperbaiki nanti kalau materialnya tergantung kebutuhan. tapi memang ada kriteria dia mendapat penerima bantuan. Rata rata sih karena strukturnya belum ada. Kalau skemanya kan bantuan uang/bansos”.
(Wawancara, 26 September 2024)

Lebih lanjut Bapak Muhammad Nuur menyampaikan bahwa nominal bantuan tersebut tidak diserahkan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk material bahan bangunan dan upah tukang. Mekanisme pencairannya adalah melalui pembelian bahan bangunan di toko material oleh penerima manfaat dalam hal ini pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah bekerjasama dengan BRI. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“Jadi tidak diterimakan langsung dalam bentuk uang kalau tahun ini kan ada bantuan upahnya baru uang. Selain yang bentuk upah itu, dalam bentuk material, lewat rekening penerima sudah masuk situ, habis itu si penerima menentukan toko material yang mau mengedrop bahan bangunan, si penerima itu meminta toko material untuk mengirim barang-barang yang dibutuhkan terus nanti kan toko material mengirimkan notanya, kalau kita kan 2 kali pencairan tahap pertama itu 9 juta tahap kedua itu 8,5 kalau toko material sudah menerbitkan notanya itu baru kita cairkan itu dibayar dari BRI ke toko material karena kita kerjasama dengan BRI. Untuk membuat rekom membuat pencairan dari bank ke material”. (Wawancara, 26 September 2024)

Sementara itu dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial RTLH ini juga diharapkan swadaya masyarakat dalam pengerjaan perbaikan rumahnya, akan tetapi memang ada beberapa kasus penerima manfaat yang kurang didukung swadaya masyarakat sekitar rumahnya sehingga harus mencari tukang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahli Teknik Bangunan Dinas PU Bidang Perkim Muhammad Nuur sebagai berikut:

“Jadi kan kadang si penerima itu kan diminta untuk swadaya tapi karena terbatas swadayanya sehingga upah tukang tapi juga kesulitan mencari tukang di satu lokasi ada beberapa yang masih menunggu tukang”. (Wawancara, 26 September 2024)

Dari sisi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati bahwa ada sedikit kelonggaran dari pembuktian kepemilikan rumah dimana cukup menyertakan letter C atau surat kerelaan dari pemilik tanah. Tentu hal ini sangat memudahkan warga miskin ekstrem yang kesulitan pendanaan untuk membuat sertifikat tanah di BPN. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ahli Teknik Bangunan Dinas PU Bidang Perkim Muhammad Nuur sebagai berikut:

“Jadi tidak harus sertifikat jadi kan misalnya letter c itu kan juga bisa, terus misalnya belum punya tanah tapi ada semacam kerelaan dari pemilik tanah juga bisa, kalau harus sertifikat kan kasihan harus mengurusnya lama dan biaya, kalau mengurus itu kesulitan”. (Wawancara, 26 September 2024)

Persoalan yang muncul terkait dengan program rehabilitasi sosial RTLH kebanyakan ketidaksesuaian rencana perbaikan awal dengan realita pembangunan yang dilaksanakan oleh warga sehingga memperlambat pembangunan RTLH. Seperti yang disampaikan Ahli Teknik Bangunan Dinas PU Bidang Perkim Muhammad Nuur sebagai berikut:

“Sama juga kan ini sebenarnya kita peningkatan kualitas cuma banyak bangun baru akhirnya biayanya membengkak itu agak lama gak selesai”. (Wawancara, 26 September 2024)

Dari penjelasan terkait dengan prosedur program Rehabilitasi Sosial RTLH tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi prosedur dalam rangka mendukung strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan telah jelas mekanismenya diatur melalui Peraturan Bupati, kemudian terkait dengan mekanisme pencairan bantuannya juga telah menggunakan pihak ketiga dalam hal ini BRI dan toko material bahan bangunan untuk menghindari penyalahgunaan bantuan. Terakhir yang perlu mendapat perhatian adalah kemudahan persyaratan yang tidak membebani warga miskin ekstrem yaitu cukup Letter C atau surat kerelaan pemilik tanah untuk mendapatkan bantuan RS RTLH.

b. Prosedur Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kotawaringin Barat

Strategi pengentasan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021. Aturan ini mengatur secara teknis pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas RTLH serta pembangunan rumah baru yang layak huni. Tujuannya adalah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan mendorong semangat gotong royong masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan hunian yang layak melalui dukungan dan bantuan yang disediakan pemerintah daerah.

Rumah Layak Huni (RLH) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan konstruksi, menjamin kesehatan penghuni, serta memiliki luas minimum yang sesuai. Sementara itu, kegiatan peningkatan kualitas RTLH merujuk pada upaya perbaikan rumah yang tidak memenuhi syarat kelayakan menjadi hunian yang layak, dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kolektif. Selain perbaikan, juga terdapat pembangunan rumah baru, yang dikenal dengan istilah Pembangunan Baru Rumah Layak Huni (PBRLH), yakni inisiatif masyarakat untuk membangun rumah baru yang memenuhi kriteria kelayakan secara perseorangan maupun berkelompok.

Berdasarkan ketentuan dalam regulasi yang berlaku, sasaran penerima program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Peningkatan Kualitas Rumah (PBR) ditujukan kepada individu atau keluarga yang tergolong kurang mampu secara ekonomi dan berpendapatan rendah, serta memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

- a. Merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah memiliki dokumen identitas resmi berupa e-KTP dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat;
- b. Memiliki hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat kepemilikan maupun surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan daerah sebagai bukti legalitas penguasaan lahan;

- c. Tidak memiliki hunian atau hanya menempati satu-satunya tempat tinggal yang berada dalam kondisi tidak layak huni;
- d. Belum pernah memperoleh jenis bantuan serupa, baik RTLH, PBR, maupun bantuan sejenis dari program pemerintah daerah yang berkaitan dengan perumahan;
- e. Mempunyai pendapatan yang tidak melebihi upah minimum provinsi (UMP); dan
- f. Siap berkontribusi secara swadaya dalam proses pembangunan serta bersedia membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan kesanggupan untuk menjalankan prinsip tanggung renteng.

Jumlah bantuan dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun berjalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan spesifik tiap unit rumah, dengan batas maksimal dana yang dapat diberikan berkisar antara Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap rumah. Adapun bantuan yang dialokasikan dalam skema Program Bantuan Rumah (PBR) sebagai bagian dari RTLH, juga disesuaikan menurut kondisi masing-masing unit, dengan plafon tertinggi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per unit hunian.

Proses pencairan dana dilaksanakan melalui toko penyedia material bangunan dengan pembagian menjadi dua tahap. Penyaluran dana tahap awal dilakukan ketika distribusi bahan bangunan telah mencapai minimal 50%. Sementara itu, pencairan tahap kedua dilaksanakan setelah seluruh material

tersalurkan dan progres fisik konstruksi mencapai sedikitnya 30%. Adapun pembayaran upah bagi para pekerja juga dibagi dalam dua sesi, yakni saat progres pembangunan telah mencapai 30% dan setelah seluruh pekerjaan konstruksi tuntas sepenuhnya.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Edy Rahman, program pemugaran RTLH ini bersifat stimulan saja. Oleh karena itu, ia mengharapkan agar masyarakat lebih mengutamakan kemampuan swadaya dan semangat gotong royong dalam proses perbaikan rumah mereka. Selain itu, Dinas Perkim juga menegaskan bahwa sebelum bantuan RTLH diberikan, pihaknya akan melakukan verifikasi langsung di lapangan. Edy Rahman menjelaskan bahwa tidak semua rumah akan mendapatkan bantuan ini karena ada kriteria khusus untuk menentukan rumah yang layak menerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan dengan menilai tingkat kerusakan rumah serta legalitas kepemilikan. Kriteria utama calon penerima bantuan meliputi status ekonomi yang rendah, kepemilikan tanah dan bangunan secara pribadi, rumah tersebut merupakan rumah pertama, serta beberapa persyaratan lainnya (Radar Sampit, 2024b).

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan implementasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terutama terkait dengan prosedur program RTLH di Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki ketentuan yang jelas. Program ini bukan hanya sekedar menysasar rehabilitasi RTLH saja tetapi juga program Pembangunan Bangunan Baru bagi

warga miskin yang belum memiliki rumah. Akan tetapi, dari sisi persyaratan yang harus menyertakan sertifikat tanah dirasa agak memberatkan bagi warga miskin ekstrem.

4. Analisis komparasi implementasi strategi penanganan kemiskinan ekstrem

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek implementasi strategi di kedua daerah yang telah disampaikan diatas, maka dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

a. Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian formulasi strategi, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan di kedua Pemerintah Daerah telah berjalan sebelum kebijakan INPRES No. 4 Tahun 2022, akan tetapi belum fokus dan kurang terpadu. Setelah INPRES No. 4 Tahun 2022 dikeluarkan, masing-masing Pemerintah Daerah mulai memperbaiki data warga miskin ekstrem dan menginventarisir program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kemiskinan ekstrem.

Adapun rincian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mengikuti strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah bantuan sosial berupa pertama urusan sosial berupa PKH, BPNT, BLT-DD dan kesehatan ada program Iuran PBI. Bantuan sosial ini merata dilaksanakan oleh kedua Pemerintah Daerah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa implementasi program strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat telah *mengcover* warga miskin ekstrem. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Nining Ailiyah (2023) yang

menyatakan bahwa pemberian BPNT atau bantuan sosial telah tepat sasaran.

Kemudian adapula program perbaikan RTLH yang merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dimana kedua Pemerintah Daerah juga turut memfasilitasi program tersebut. Pelaksanaan program ini juga ditunjang oleh dukungan dari pihak eksternal seperti Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Akan tetapi walaupun telah mendapat bantuan RTLH, warga miskin ekstrem masih belum dapat meningkatkan kesejahteraannya dikarenakan belum terbantu dari aspek peningkatan ekonomi sebagaimana hasil penelitian Fahmi Idris dkk (2023) yang menunjukkan bahwa sebagian penerima program RTH tidak merasakan perbaikan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, perlunya pendekatan strategi peningkatan pendapatan masyarakat.

Kendala dialami oleh pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan masyarakat, yang sebenarnya merupakan inti dari penghapusan kemiskinan ekstrem. Dimana kedua Pemerintah Daerah mengakui bahwa masih ada kelemahan untuk pelaksanaan program yang menasar peningkatan pendapatan bagi warga miskin ekstrem, ada beberapa kendala yang muncul, antara lain : belum tepatnya bantuan program kepada warga miskin *by name by addres* dan masih belum munculnya kolektivitas antar OPD untuk bersama-sama menasar warga miskin ekstrem dari segi pemberdayaan ekonominya.

Adapun komparasi daftar program yang menjadi penekanan penghapusan kemiskinan ekstrem di kedua daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Komparasi daftar program yang menjadi penekanan penghapusan kemiskinan ekstrem

Strategi	Program	
	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Bantuan Sosial (BPNT, BLT-DD, BPNT Kabupaten dan Iuran PBI)	Bantuan Sosial (BPNT, BLT-DD dan Iuran PBI)
Peningkatan pendapatan masyarakat	Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan (KDK)	Bantuan Modal Usaha Pemberdayaan Sosial
Pengurangan kantong-kantong kemiskinan	Perbaikan RTLH	Perbaikan RTLH dan Pembuatan Bangunan Baru

Sumber : diolah, 2024

b. Anggaran

Kedua Pemerintah Daerah memiliki angka APBD yang hampir sama, sehingga dari segi kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan memiliki porsi anggaran untuk pembiayaan pos-pos belanja yang kemungkinan tidak jauh berbeda. Akan tetapi yang patut menjadi perhatian adalah besarnya nilai belanja penanganan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, fokus anggaran Kabupaten Kulon Progo pada penguatan program strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Berkaitan dengan porsi anggaran untuk pelaksanaan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dapat dilihat bahwa anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di kedua daerah tersebut agak berbeda. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dominasi anggaran strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dengan penguatan anggaran strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Catatannya adalah masih belum fokusnya anggaran di strategi peningkatan pendapatan masyarakat yang diakui bersama adalah kunci dari strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hasil analisis pada aspek anggaran ini adalah kedua Pemerintah Daerah dapat dikatakan telah memiliki anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem bahkan angka anggarannya cukup besar. Akan tetapi, masih ada kelemahan dari segi sasaran penerima manfaat anggaran yang ada yaitu warga miskin ekstrem. Alhasil, penggunaan anggaran pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrem masih bersifat program dan kegiatan rutin masih belum menjangkau warga miskin ekstrem.

Adapun komparasi anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem di kedua daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Komparasi anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem

Strategi	Anggaran	
	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
	Tahun 2024	Tahun 2023
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	Rp. 28.914.339.500	Rp. 39.408.217.772
Peningkatan pendapatan masyarakat	Rp. 107.078.889.382	Rp. 5.342.687.149
Pengurangan kantong-kantong kemiskinan	Rp. 207.365.522.872	Rp. 4.184.927.307
Jumlah	Rp. 343.358.751.754	Rp. 48.935.832.228

Sumber : diolah, 2024

c. Prosedur

Dalam hasil penelitian telah ditentukan bahwa yang dilihat dari aspek prosedur adalah implementasi strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan dalam hal ini spesifik meneliti terkait dengan implementasi prosedur perbaikan RTLH. Kedua Pemerintah Daerah memiliki kebijakan untuk program perbaikan RTLH ini, dimana dari aspek dasar hukum atau petunjuk teknis telah tercantum di dalam Peraturan Bupati masing-masing daerah.

Didalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan kriteria penerima manfaat RTLH, mekanisme pengajuan serta mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pada prinsipnya kedua Pemerintah Daerah memiliki sasaran penerima manfaat yang sama yakni warga miskin. Perbedaannya terletak pada kebijakan dimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya untuk perbaikan rumah tidak layak, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selain perbaikan juga dapat untuk menangani pembuatan rumah layak huni yang baru.

Akan tetapi, kelebihan dari segi pelaksanaan prosedur perbaikan RTLH dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Dimana warga miskin yang menjadi penerima manfaat cukup melampirkan dokumen surat kerelaan tanah atau letter c. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus melampirkan sertifikat tanah yang hal ini tentu sangat sulit bagi warga miskin ekstrem.

D. Evaluasi Strategi

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), evaluasi strategi mencakup 3 (tiga) aktivitas utama yaitu:

1. Meninjau Kembali Dasar-dasar Strategi. Evaluasi dimulai dengan peninjauan ulang terhadap asumsi-asumsi strategis yang melandasi strategi, seperti visi, misi, tujuan jangka panjang, dan analisis lingkungan (baik internal maupun eksternal). Apakah asumsi tersebut masih valid? Apakah terjadi perubahan signifikan di lingkungan industri, pasar, atau sumber daya internal?

2. Mengukur Kinerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan menghasilkan hasil yang diharapkan.
3. Mengambil Tindakan Korektif. Jika ditemukan kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang diinginkan, maka manajer perlu mengambil tindakan korektif. Ini bisa berupa revisi strategi, penyesuaian kebijakan, atau bahkan perubahan struktur organisasi.

1. Evaluasi dasar-dasar strategi

a. Kabupaten Kulon Progo

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Formulasi Strategi bahwa persoalan mendasar dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem adalah pertama, masih belum *clean* dan *clear* data warga miskin ekstrem. Walaupun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri telah menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, namun data ini masih perlu divalidasi terus-menerus oleh stakeholder terkait, bahkan sempat ada data warga miskin ekstrem yang tidak masuk dalam SK Bupati yang telah ditetapkan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“Kendala, jelas pertama satu data, itu menjadi kendala kami yang paling besar karena setelah kami petakan pun kemaren ada lolos 165 jiwa yang tidak ada. Tidak mendapat intervensi sama sekali. Kita sudah padankan

satu data. Yang 165 sudah kita usulkan lagi”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Kedua, permasalahan mendasar dari pelaksanaan strategi penanganan kemiskinan ekstrem adalah masih kurangnya keterpaduan program terkait dengan strategi peningkatan pendapatan, yang sebenarnya menjadi fokus utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga miskin ekstrem. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“Kedua teman-teman OPD itu kurang konsen atau kurang total ketika harus melakukan program pemberdayaan jadi pemberdayaan yang dilakukan itu *business as usual* aja, kelompoknya ya itu itu saja sementara kami pengen ada kelompok yang memang harus menjadi prioritas karena dia punya modal minimal punya modal keinginan untuk lepas”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Ketiga, permasalahan dari penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo yang paling mendasar terutama dari lingkungan internal adalah kondisi warga masyarakat miskin ekstrem yang memang perlu bantuan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“Satu kondisinya sebagian besar adalah petani non lahan. Kedua, memang usia produktif, karena kemaren kan kita intervensinya di strategi nomor 2. Bekerjanya bekerja non formal, dia bekerja dalam tanda kutip buruh. Lebih terkait dengan geografis, itu lokus kemiskinan itu ada di sebelah utara kulonprogo, seperti samigaluh. Terus terang untuk mencapai 0 % kami sangat berat walaupun apabila

diberikan survey riil saya yakin juga tidak ada”.
(Wawancara, 1 Oktober 2024)

Kondisi warga miskin memang juga patut menjadi perhatian dari segi internal warga masyarakat sendiri. Hal ini sebagaimana penulis melakukan observasi langsung terhadap warga miskin ekstrem di Kalurahan Salam Rejo Kapanewon Sentolo ditemani bersama Lurah Salam Rejo Dani Pristiawan. Pemilik rumah atas nama Inisial I berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, pekerjaan sehari-hari menjadi buruh tani di sawah milik orang lain. Tentu dengan pekerjaan tersebut sangat sulit untuk meningkatkan pendapatan diatas garis kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyebab kemiskinan adalah kemiskinan natural dimana kemiskinan yang timbul akibat kondisi-kondisi yang bersifat alamiah, seperti adanya disabilitas, penyakit kronis, usia lanjut, maupun dampak dari bencana alam.



Gambar 4. 21 Dokumentasi Foto bersama Warga Miskin
Desa Salam Rejo

Dari evaluasi dasar-dasar strategi tersebut diatas, maka terlihat bahwa masih ada persoalan di level formulasi strategi yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Permasalahan data warga miskin adalah problem prioritas yang mesti diselesaikan terlebih dahulu, dikarenakan ketika data warga miskin ekstrem *clean* dan *clear*, maka pensasaran program dan kegiatan OPD maupun stakeholder lainnya menjadi tepat sasaran. Kedua, perlunya sinkronisasi program dan kegiatan OPD dalam mengarahkan sasarannya kepada warga miskin ekstrem. Ketiga dan terakhir adalah perlunya pemetaan lebih spesifik terkait kondisi warga miskin ekstrem, sehingga memudahkan memilah program dan kegiatan apa yang sesuai dengan kemampuan atau kondisi masing-masing warga miskin ekstrem.

b. Kabupaten Kotawaringin Barat

Permasalahan data warga miskin ekstrem menjadi persoalan prioritas yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama diantara OPD terkait dalam hal ini BAPPEDA, Dinas Sosial dan DPMD untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data miskin ekstrem. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat H. Rody Iskandar, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“Langkah awal validasi dan verifikasi dari jumlah data yang di publish, berarti kita masih bekerja keras supaya parameter atau kriteria masyarakat kategori miskin ekstrem dipahami keseluruhan oleh pihak-pihak yang melakukan validasi dan verifikasi, kalau dilaksanakan pemerintah desa maka perlu ada penguatan kapasitas pihak pemerintahan desa untuk penentuan kriteria atau

parameter warganya yang dikategorikan miskin ekstrem, karena kalau kita berbicara terminology ekstrem ini ada yang di bawah garis kemiskinan dia di bawah lagi. Kalau Bahasa sangat miskin, memang dari kasat mata di Kobar ini tidak kemiskinan ekstrem, itu dari kasat mata tapi kalau kita telisik lebih jauh bisa jadi ada”. (Wawancara, 12 Juli 2024)

Sekretaris Daerah selaku Pimpinan Tinggi dilingkup PEMDA juga mengakui bahwa persoalan data warga miskin ekstrem harus segera diselesaikan dengan melibatkan OPD teknis, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

“Sebagian desa sudah mengkategorikan sebagai miskin ekstrem, tentu kita harus bekerja sama dengan kementerian sosial dalam hal ini dinas sosial atau yang lebih tepatnya di BPS. Yang penting PEMDA akan berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, jangan kemiskinan ekstrem kita berharap warga miskin pun ga ada di Kobar, apalagi yang sampai kemiskinan ekstrem. Karena efek dari kemiskinan ekstrem ini bisa stunting, kriminalitas, macam-macam”. (Wawancara, 12 Juli 2024)

Persoalan kedua yang dihadapi adalah masih kurang fokusnya program dan kegiatan OPD teknis yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem. Bahkan seringkali OPD terkait tidak menggunakan data miskin dalam mengarahkan program dan kegiatannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Perencana Ahli Muda BAPPEDA Citra sebagai berikut:

“Apalagi kita taunya sudah di *tagging* itu kan di awal tahun 2024, kami sendiri tidak dapat *soundingnya* dari PUSDATIN juga tidak ada. Jadi dari pagu anggaran yang sudah diikat itu ada pagu anggaran yang sama sekali ga

(belum) menyentuh ke penanggulangan kemiskinan ekstrem”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Oleh karena itu, fokus pemilahan program dan kegiatan OPD untuk penanganan kemiskinan ekstrem menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

2. Evaluasi kinerja penurunan angka kemiskinan ekstrem

a. Kinerja penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo

Upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kulon Progo, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya menangani kemiskinan termasuk didalamnya kemiskinan ekstrem melalui intervensi berbagai program dan kegiatan di OPD teknis. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah sudah memetakan dan sudah mensikapi terhadap kondisi itu. Saya lupa jumlahnya berapa itu, itu kemudian kita intervensi bagi mereka itu dengan beberapa kegiatan program, termasuk juga karena ini namanya ekstrem, bantuan-bantuan untuk hidup ini sudah dialokasikan dari Pemkab Kulon Progo, walaupun nampaknya sampai akhir ini hasilnya belum begitu sesuai harapan, tapi sudah ada perkembangan. Sampai dengan akhir tahun inipun kita kondisikan agar itupun bisa lebih dipercepat. Itu yang kita lakukan di pemeritah kab kulon progo, kami sangat berharap dengan beberapa intervensi itu juga bisa menurunkan kemiskinan ekstrem”. (Wawancara, 24 September 2024)

Apabila dilihat kecenderungan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir mulai Tahun 2022 – 2024, jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi, dimana ketika terjadi penurunan dari Tahun 2022 – 2023, akan tetapi kemudian di tahun 2024 mengalami kenaikan, walaupun secara persentase mengalami penurunan penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan kemiskinan masih perlu dievaluasi dan diperbaiki strategi penanganannya. Sebagaimana data angka kemiskinan dibawah ini.

Tabel 4. 13 Data Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2022	73,21	16,39	381.666
2023	70,74	15,64	416.870
2024	71,48	15,62	438.007

Sumber : diolah dari BPS Kabupaten Kulon Progo, 2024

Upaya Pemerintah Daerah juga dilakukan untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan INPRES No. 4 Tahun 2022. Akan tetapi, angka kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi, walaupun sejak Tahun 2022, terjadi penurunan walaupun tidak signifikan. Sebagaimana data angka kemiskinan ekstrem dibawah ini.

Tabel 4. 14 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
2022	10.418
2023	9.816
2024	± 9.000

Sumber : diolah dari BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo, 2024

Berdasarkan realita angka kemiskinan ekstrem tersebut diatas, maka target 0 (nol) persen yang telah diamanatkan oleh INPRES No. 4 Tahun 2022 kemungkinan besar akan sulit untuk tercapai di Tahun 2024. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Jadi dari 9 ribu itu setelah kita cermati kita pilah data itu. Satu kondisinya sebagian besar adalah petani non lahan. Kedua, memang usia produktif, karena kemaren kan kita intervensinya di strategi nomor 2. Bekerjanya bekerja non formal, dia bekerja dalam tanda kutip buruh. Lebih terkait dengan geografis, itu lokus kemiskinan itu ada di sebelah utara kulonprogo, seperti samigaluh. Terus terang untuk mencapai 0 % kami sangat berat walaupun apabila diberikan survey riil saya yakin juga tidak ada. Tapi itu kan potret dari pemerintah pusat memberikan data makanya kita diangkat 2,41 % untuk kemiskinan ekstremnya kalo 0 (nol) kami dianggap belum mampu. Kalo miskin biasa kan di 15,6 %”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Penjelasan dari BAPPEDA tersebut memperkuat bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem 0 (nol) persen seperti sulit untuk direalisasikan pada Tahun 2024 dikarenakan permasalahan bukan hanya sekedar dari internal Pemerintah Daerah tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di

satu wilayah (Kapanewon) yang membuat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi sulit untuk dilakukan.

b. Kinerja penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat

Upaya Pemerintah Daerah dalam menurunkan kemiskinan juga telah dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan. Akan tetapi, harapan untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan memang sulit untuk direalisasikan. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 sebanyak 12,44 ribu jiwa meningkat menjadi sebesar 13,44 ribu jiwa di Tahun 2023 kemudian menurun sedikit di Tahun 2024 menjadi 13,43 ribu jiwa.

Tabel 4. 15 Data penduduk miskin Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota/Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (ribu jiwa) (ribu orang)			
	2021	2022	2023	2024
Kotawaringin Barat	12,29	12,44	13,44	13,43
Kotawaringin Timur	27,06	27,56	26,57	26,69
Kapuas	19,45	20,18	19,19	19,47
Barito Selatan	6,42	6,83	6,66	6,87
Barito Utara	7,4	7,7	7,14	7,6
Sukamara	2,38	2,48	2,71	2,9
Lamandau	2,92	2,78	2,63	2,79
Seruyan	15,07	15,96	15,71	16,06

Katingan	9,15	9,71	8,95	9,55
Pulang Pisau	5,43	6,04	5,92	5,91
Gunung Mas	6,29	6,7	6,55	6,86
Barito Timur	8,02	8,42	8,59	8,74
Murung Raya	7,31	7,69	7,81	8,05
Palangka Raya	10,86	10,62	10,31	10,7
Kalimantan Tengah	140,04	145,1	142,17	145,63

Sumber data : BPS Prov. Kalteng, 2024

Dari Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah diatas, terlihat bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan ke-4 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Walaupun pada Tahun 2024 berhasil mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di banding dengan mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data yang disampaikan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat data awal sebanyak 3.151 jiwa pada tahun 2022/2023 kemudian menurun menjadi 2.520 jiwa. Penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut tentu menjadi kabar baik bagi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4. 16 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
2022	3.151
2023	3.151
2024	2.520

Sumber data : diolah dari BAPPEDA Kab. Ktw. Barat, 2024

Apabila melihat tren penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut, maka dapat dikatakan pencapaian target 0 (nol) % kemiskinan ekstrem sesuai INPRES Nomor 4 Tahun 2022 akan sulit terwujud. Hal ini dikarenakan masih belum tepat sasaran program dan kegiatan OPD menysasar warga miskin ekstrem *by name by address*.

3. Tindak lanjut perbaikan

a. Kabupaten Kulon Progo

Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem adalah: pertama, perbaikan data warga miskin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda sebagai berikut:

“Kemudian saya ga tau, data itu kadangkala dengan BPS kurang terbuka, sementara BPS melakukan data hanya dengan survey, sementara itu kan kita harus dengan data penduduk, kalau dengan data itu kan keliatan siapa dimana, tapi kalau itu survey kita itukan ibarat, bermain kucing dalam karung. Disana ada sekian persen nanti kita intervensi ternyata sudah banyak ternyata sasaran bukan

itu, ini susahnya begitu. Ada yang perlu untuk disinkronkan”. (Wawancara, 24 September 2024)

Menurut pandangan Pejabat dilingkup Pemerintah Daerah tersebut, menyampaikan ada persoalan transparansi data dengan pihak BPS yang bertugas melakukan survey kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi data terlebih dahulu dengan pihak BPS sehingga data yang di survey dapat diakses oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan intervensi yang tepat sasaran.

Perlunya perbaikan data secara terus-menerus ini juga diakui oleh Penyuluh Muda Sosial Heri Kurniawan, yang menyampaikan bahwa perkembangan kemiskinan di level masyarakat juga harus diidentifikasi secara lebih akurat dan menyoroti perbedaan karakteristik kemiskinan desa dan perkotaan. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Di pegunungan, penampilan rumah dan lain sebagainya ketok (kelihatan) miskin, tapi asetnya banyak misalnya kita pernah melakukan pendampingan, ini rumahnya seperti ini lantainya masih tanah. Di belakangnya ada berhektar-hektar tanaman semisal pohon jati. Itu kalo dilihat dari pengeluaran perbulan itu pegunungan pasti banyak angka kemiskinannya. Kalo didalami kemiskinan kota yang lebih banyak, seperti daerah wates, pengasih, sentolo, itu ketika terjadi kemiskinannya agak mencolok. Samigaluh kokap itu kalo angka kemiskinan akan cenderung tinggi. Ada beberapa dukuh yang sudah sadar dan menonaktifkan bantuan ada beberapa (dikarenakan rumah tidak layak tetapi asetnya banyak). Itu jual satu pohon saja sudah cukup untuk hidup beberapa waktu walaupun dia tidak bekerja. Orang di gunung itu juga mereka punya hasil sendiri. Untuk di kota sendiri tergantung dari aktivitas ekonomi”. (Wawancara, 26 September 2024)

Kedua, perlunya intervensi program dan kegiatan dari OPD yang mendukung sasaran warga miskin ekstrem sesuai dengan data yang telah ditetapkan yang sekaligus menyoroti terkait data warga miskin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kulon Progo Restu Dewandaru sebagai berikut:

“jelas pertama satu data, itu menjadi kendala kami yang paling besar karena setelah kami petakan pun kemaren ada lolos 165 jiwa yang tidak ada. Tidak mendapat intervensi sama sekali. Kita sudah padankan satu data. Yang 165 sudah kita usulkan lagi. Kedua teman-teman OPD itu kurang konsen atau kurang total ketika harus melakukan program pemberdayaan jadi pemberdayaan yang dilakukan itu *business as usuall* aja, kelompoknya ya itu itu saja sementara kami pengen ada kelompok yang memang harus menjadi prioritas karena dia punya modal minimal punya modal keinginan untuk lepas. Karena di program PENA di 2021 sampai 2023 itu kami bisa menyampaikan sama sekali tidak tertarik masyarakat. Karena setelah diberikan bantuan modal 6 atau 8 juta tapi dari data itu hanya sekedar keluar. Yang kedua mental masyarakat perlu kita sadarkan perlu kita berikan informasi yang lebih detail mungkin disentuh dari sisi religi”. (Wawancara, 1 Oktober 2024)

Ketiga, ada yang menarik dengan penyampaian dari BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo tersebut, selain faktor internal Pemerintah Daerah yang belum maksimal dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ternyata juga diperlukan peran serta masyarakat untuk menyadari kondisi kemiskinan, hal ini dapat melalui pendekatan agama atau religi.

Keempat, hal yang paling penting adalah ketersediaan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang memang perlu secara berkesinambungan dianggarkan dalam APBD.

b. Kabupaten Kotawaringin Barat

Pertama, Permasalahan prioritas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah adalah verifikasi dan validasi data warga miskin ekstrem. Belum adanya data warga miskin ekstrem yang valid, tentu saja menjadi penghambat utama dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat H. Rody Iskandar yang sekaligus menyoroti indikator kemiskinan oleh BPS sebagai berikut:

“Langkah awal validasi dan verifikasi dari jumlah data yang di *publish*, menurut pihak sudah di validasi diverifikasi berarti kita masih bekerja keras supaya parameter atau kriteria masyarakat kategori miskin ekstrem dipahami keseluruhan oleh pihak2 yang melakukan validasi dan verifikasi.” (Wawancara, 12 Juli 2024)

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa perlu tindak lanjut penguatan kapasitas pemerintah desa untuk memverifikasi indikator kemiskinan ekstrem. Penguatan kapasitas pemerintah desa tersebut juga telah direspon oleh Kepala Dinas Sosial Muhammad Daoed, yang pada tanggal 18 – 20 September 2024 menyelenggarakan kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Serta Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta.



Gambar 4. 22 Dokumentasi Foto kegiatan Verifikasi dan Validasi DTKS di Yogyakarta

Menurut Kepala Dinas Sosial Muhammad Daoed, kegiatan BIMTEK tersebut diatas dalam rangka menyiapkan data warga miskin yang valid dan dapat digunakan oleh pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Pihak KPK mewanti wanti agar pihak desa tidak menginput yang salah (DTKS) artinya yang bujur (betul) kada (tidak) mampu yang memerlukan bantuan. Kami mengajukan anggaran di perubahan ni, Alhamdulillah disetujui 300 juta, untuk memverifikasi data, kami honda (ingin) membimtek sida (kelompok) aparaturnya dan kasi kesra desa kelurahan, Cuma dibagi 2 tahap sida desa dolo (dulu), rencana di Jogja kami mengundang dari PUSDATIN kementerian sosial, sidanya memberikan materi, sehari, seharinya dari kita sini. Tujuan ini ada 2 rencana bimtek. Pertama, memverifikasi data DTKS yang kedua kami memberikan pembelajaran aparaturnya dan kasi kesra kami ada aplikasi seko (sendiri) untuk

memverifikasi data tersebut. Nah aplikasi ini sederhana bisa sampai HP. Kena sida PUSDATIN langsung yang turun tangan. Hondaku tu sudah menetapkan fondasi, data yang akurat jadi yang penerus berikutnya nyaman”. (Wawancara, 16 Juli 2024)

Kedua, yang perlu menjadi perhatian tindak lanjut perbaikan oleh Pemerintah Daerah adalah intervensi program dan kegiatan OPD yang masih belum sejalan dengan pensasaran warga miskin ekstrem.

4. Analisis komparasi evaluasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek evaluasi strategi di kedua daerah yang telah disampaikan diatas, maka dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

a. Evaluasi dasar-dasar strategi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap strategi di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah, antara lain:

- 1) Permasalahan validitas dan integritas data. Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data warga miskin ekstrem. Di kedua kabupaten, data yang dijadikan dasar dalam penyusunan program belum bersifat *clean and clear*. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendataan belum sepenuhnya berbasis pada prinsip *data-driven decision making*, yang

berakibat pada ketidaktepatan sasaran program intervensi. Ketiadaan satu sistem data terpadu yang dikelola secara kolaboratif oleh OPD teknis (BAPPEDA, Dinas Sosial, DPMD, dan Pemerintah Desa) menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan.

- 2) Fragmentasi program dan minimnya orientasi outcome. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian outcome yang konkret, seperti peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin ekstrem. Banyak program yang bersifat generik, tidak kontekstual, serta kurang menyorot kelompok prioritas. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara perencanaan teknokratik dengan kebutuhan riil masyarakat miskin ekstrem di lapangan.
- 3) Kelemahan dalam koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan. Penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat dan sinergis. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa relasi antar-OPD maupun antara pemerintah daerah dan pusat masih berjalan secara sektoral. Ketidakterpaduan tersebut terlihat dari tidak sinkronnya penggunaan data, tidak adanya mekanisme *joint planning*, serta lemahnya forum koordinasi yang menghubungkan pemangku kepentingan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

b. Evaluasi kinerja penurunan angka kemiskinan ekstrem

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menunjukkan adanya progres, meskipun belum signifikan dan masih jauh dari target nasional sebesar 0% pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Pemerintah Daerah di kedua wilayah telah mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas intervensi masih terbatas, dan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan struktural kemiskinan ekstrem.

Di Kabupaten Kulon Progo, fluktuasi angka kemiskinan menunjukkan adanya dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Meskipun terdapat penurunan persentase penduduk miskin secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin ekstrem masih cukup tinggi dan penurunannya belum mencapai skala signifikan. Faktor-faktor penghambat seperti kondisi geografis, dominasi pekerja informal, serta keterbatasan kepemilikan aset menjadi tantangan utama. Keterbatasan dalam akurasi data dan penyasaran intervensi berbasis *by name by address* turut memperlemah efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem yang relatif lebih baik dibandingkan Kulon Progo, meskipun angka kemiskinan

umum mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah memberikan dampak, namun masih menghadapi kendala pada tingkat ketepatan sasaran dan kesinambungan program. Kurangnya integrasi lintas sektor serta belum optimalnya koordinasi antar-OPD menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, berbasis data yang akurat, serta didukung oleh sinergi antarsektor dan lintas level pemerintahan. Evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya perbaikan pada sisi perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan agar strategi penurunan kemiskinan ekstrem tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjangkau akar permasalahan secara struktural dan kontekstual sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

c. Tindak lanjut perbaikan

Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di dua kabupaten menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah terkait dengan keakuratan dan keterpaduan data. Baik di Kabupaten Kulon Progo maupun Kotawaringin Barat, validasi dan verifikasi data warga miskin ekstrem belum dilakukan secara optimal. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data dengan BPS dan dalam memperkuat kapasitas aparatur desa untuk memahami indikator

kemiskinan ekstrem secara menyeluruh. Ketiadaan data yang akurat akan berdampak langsung terhadap efektivitas intervensi program-program sosial.

Selain persoalan data, rendahnya kualitas intervensi program pemberdayaan juga menjadi hambatan utama. Program yang dijalankan oleh OPD cenderung masih bersifat rutin (business as usual), tanpa mempertimbangkan urgensi penanganan kemiskinan ekstrem secara khusus. Di Kulon Progo, kelompok sasaran program belum diperluas kepada warga yang memiliki keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan. Sementara itu, di Kotawaringin Barat, masih terdapat alokasi anggaran OPD yang tidak berkorelasi langsung dengan penghapusan kemiskinan, seperti honor pegawai dan perjalanan dinas.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat teknokratis belum cukup efektif. Perlu pendekatan sosial dan kultural, seperti pendekatan religi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami kondisi kemiskinannya. Upaya ini dinilai penting untuk mendorong partisipasi aktif warga, termasuk dalam menonaktifkan diri dari bantuan jika sudah tidak layak menerima, sebagaimana telah terjadi di beberapa dusun di wilayah pegunungan Kulon Progo.

Ketersediaan dan kesinambungan anggaran juga menjadi faktor krusial dalam mendukung langkah-langkah penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah daerah harus mampu menyusun rencana anggaran yang lebih berpihak kepada warga miskin ekstrem, dengan penguatan pada proses *budget tagging*

yang selektif, transparan, dan berbasis data yang valid. Hal ini perlu disertai dengan pengawasan internal yang ketat untuk menghindari penggunaan anggaran pada kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

E. Kebaruan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kebaruan penelitian sebagai berikut:

1. Hasil temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial belum berdampak terhadap penghapusan warga miskin ekstrem. hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Ailiyah (2023) yang menyatakan bahwa pemberian BPNT dinilai cukup efektif karena mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
2. Hasil temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas daerah belum berpengaruh terhadap implementasi program dan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum secara terpadu menggunakan data warga miskin ekstrem dalam formulasi dan implementasi program serta kegiatannya. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Musafra Harahap (2023) yang menunjukkan bahwa strategi paling efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem adalah dengan merancang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) secara terstruktur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0 % pada tahun 2024 sebagaimana sebagaimana Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Implikasinya, Pemerintah Daerah yang sebelumnya hanya menangani kemiskinan reguler kini mulai fokus menangani kemiskinan ekstrem. Penelitian ini pun mencoba untuk menggambarkan komparasi manajemen strategi Pemerintah Daerah dalam menangani kemiskinan ekstrem dan melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan studi kasus ganda di dua wilayah Kabupaten yakni Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV adalah sebagai berikut:

1. Formulasi strategi

- a. Kedua pemerintah daerah yaitu kabupaten kulon progo dan kabupaten kota waringin barat telah menetapkan visi dan misi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem sebagai bentuk komitmen.
- b. Kekuatan ekonomi berupa potensi ekonomi daerah dapat dikatakan kedua daerah merupakan daerah dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi.
- c. Kekuatan kondisi sosial, budaya, demografi dan lingkungan berupa demografi, pendidikan dan kesehatan. Dari aspek

demografi, jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo tercatat lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi ini turut memengaruhi angka kemiskinan ekstrem yang lebih tinggi di Kulon Progo. Dalam hal pendidikan, Angka Lama Sekolah (ALS) di Kulon Progo berada di bawah Kotawaringin Barat. Sementara itu, dari sisi kesehatan, tingkat Angka Harapan Hidup di Kulon Progo tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Kotawaringin Barat. Adapun dalam aspek politik, pemerintahan di kedua kabupaten sama-sama memperoleh dukungan kuat dari lembaga legislatif daerah masing-masing.

- d. Dari segi perencanaan, terdapat 2 (dua) permasalahan. Permasalahan pertama adalah masih belum validnya data warga miskin ekstrem. Permasalahan kedua adalah belum terpadunya program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menysasar warga miskin ekstrem. Dari segi pengorganisasian, kedua Pemerintah Daerah sama-sama memberikan pembagian tugas kepada OPD teknis di bidang urusan urusan sosial, perumahan rakyat, pendapatan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan tenaga kerja. Dari segi pemotivasian, Kedua Pemerintah Daerah menyadari bahwa penanganan kemiskinan bukan hanya sekedar menjalankan perintah INPRES No. 4 Tahun 2022, tetapi memang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menangani kemiskinan.
- e. Dari variabel analisis dan pilihan strategi, dapat dikatakan bahwa kedua Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan yang hampir sama, akan tetapi memang dari segi kesiapan data

warga miskin ekstrem *by name by address*, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, dari analisis matriks SWOT yang telah disusun pada BAB IV maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menghadapi tantangan masih rendahnya Angka Lama Sekolah (ALS). Kemudian terkait dengan pelaksanaan INPRES No. 4 Tahun 2022 dapat dikatakan masing-masing Pemerintah Daerah telah melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Akan tetapi, kedua Pemerintah Daerah masih lemah dalam strategi peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Implementasi strategi

- a. Dari segi implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, beberapa program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan oleh kedua Pemerintah Daerah.
- b. Dari segi implementasi anggaran dapat dikatakan bahwa kedua Pemerintah Daerah telah mengakomodir anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Dari segi implementasi prosedur yang dalam hal ini fokus pada perbaikan RTLH. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua Pemerintah Daerah memiliki keunggulan dan kelemahan terkait dengan prosedur salah program strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

3. Evaluasi strategi

- a. Dari segi evaluasi dasar-dasar strategi ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kedua Pemerintah Daerah antara lain, masih belum optimalnya proses verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem khususnya pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, masih lemahnya perencanaan program dan kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang terpadu dan memiliki *outcome* yang konkret kepada warga miskin ekstrem, serta masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.
- b. Dari segi evaluasi kinerja dalam hal ini penurunan angka kemiskinan ekstrem dapat dikatakan bahwa kedua Pemerintah Daerah telah mendapatkan hasil yang positif ditandai dengan menurunnya jumlah warga miskin ekstrem setiap tahunnya mulai tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan dan secara implisit target 0 (nol) persen kemiskinan ekstrem di Tahun 2024.
- c. Dari segi tindak lanjut perbaikan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, kedua Pemerintah Daerah telah melaksanakan langkah-langkah evaluatif diantaranya penguatan kapasitas aparatur serta sinkronisasi data warga miskin ekstrem, penguatan koordinasi program dan kegiatan melalui forum-forum pembahasan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat daerah serta *tagging* anggaran kemiskinan ekstrem dengan lebih cermat dan tepat sasaran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka faktor penghambat dan pendukung dari strategi penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

1. Masih belum validnya data warga miskin ekstrem;
2. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor sehingga berdampak pada belum terpadunya program dan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan data warga miskin ekstrem;
3. Masih terbatasnya anggaran daerah;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus masih kurangnya akses pendidikan yang lebih tinggi;
5. Terbatasnya jangka waktu penghapusan kemiskinan ekstrem yang di target 0 (nol) persen Tahun 2024 padahal INPRES No. 4 Tahun 2022 baru diterbitkan, sehingga jangka selama 2 (dua) tahun sangat sulit untuk direalisasikan;

2. Faktor pendukung

- a. Komitmen pimpinan daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Potensi pengembangan ekonomi di daerah;
- c. Dukungan legislatif daerah atau DPRD Kabupaten terhadap penanganan kemiskinan;
- d. Telah berjalannya program dan kegiatan penanganan kemiskinan serta tumbuhnya inovasi dari Pemerintah Daerah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat rekomendasikan setelah menganalisis aspek formulasi, implementasi dan evaluasi strategi penghapusan kemiskinan ekstrem baik di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi dan indikator kriteria warga miskin ekstrem yang melibatkan BPS dan Pemerintah Daerah dikarenakan kedua Pemerintah Daerah baik Kabupaten Kulon Progo maupun Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum memahami indikator warga miskin ekstrem yang digunakan oleh pihak BPS;
2. Perbaikan data warga miskin ekstrem dengan verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara objektif dan kontinu yang melibatkan tingkatan pemerintah di level bawah yakni Pemerintah Desa/Kalurahan/Kelurahan.
3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi program dan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara intensif antar Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya dengan pemanfaatan basis data warga miskin ekstrem yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan program dan anggaran strategi peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Peningkatan akses pendidikan kepada warga miskin ekstrem terutama anak-anaknya dengan beasiswa pendidikan sampai dengan perguruan tinggi dalam rangka memotong rantai kemiskinan ekstrem.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun kelemahan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan 3 (tiga) konsep yakni Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Strategi sehingga kemungkinan masih lemah dalam ketajaman dan kelengkapan baik wawancara informan dan data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal

- Achmad, W., Sidiq, S. S., & Prawira, R. Y. (2023). Analysis of the Factors Affecting Poverty in Padasari Village. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 189–194. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i1.58529>
- Ailiyah, N., Chalimah, N., Fauzi, M. A. N., & Wahyudi, M. A. (2023). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Seboro Kabupaten Probolinggo. *Sosio Konsepsia*, 12(3), 131–141. <https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3359>
- Bariyah, N. (2022). Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju Sustainable Development Goals. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 93–110. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.39343>
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik “Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing”* (Cetakan Ke). Penerbit Salemba Empat.
- Desmond, M. (2023). *Poverty, by America*. Random House Large Print.
- Eko Yunanto, S. (2020). Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada administrasi. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77>
- Guo, Y., Zhou, Y., & Liu, Y. (2022). Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province. *Journal of Rural Studies*, 93(March 2018), 430–440. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.007>
- Harahap, M. (2023). Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota

- Medan. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(2), 85–94.
<https://doi.org/10.51178/jecs.v5i2.1535>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriyani, H., Fadani, R. A., Ustiwaty, J., Utama, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dna Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hidayat, S., & Adji Suradji Muhammad. (2024). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *The Journalish: Social and Government*, 5, 183–189.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Manajemen Strategis*. Penerbit Andi.
- Idris, F., Mukhrijal, M., & Rasanjani, S. (2023). Efektifitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Sosio Konsepsia*, 12(2), 37–50.
<https://doi.org/10.33007/ska.v12i2.3240>
- Intan Suci Rahmawati, D., Yulyana, E., Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang, M., & Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang Abstract, D. (2022). Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 114–122.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7134027>
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2375>
- Karsadi. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif “Membantu Peneliti dan Mahasiswa untuk melakukan Penelitian Naturalistik”* (Cetakan 1). Pustaka Pelajar.

- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Rohima, S., Liliana, L., & Putri, A. K. (2020). Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province. *Society*, 8(2), 581–595. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.215>
- Rumadan, S. (2022). *Berbagai Prespektif Kemiskinan*. Ruang Karya Bersama.
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan* (Cetakan Pe). PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi 3). Penerbit Alfabeta.
- Susanto, A. (2014). *Manajemen Strategik Komprehensif untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Penerbit Erlangga.
- Syafiie, I. K. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Cetakan Ke). PT. Refika Aditama.
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). CA: SAGE Publications.

Dokumen dan peraturan perundang-undangan

- BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. (2023a). *Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Kulon Progo*.

BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. (2023b). *Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024*.

BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025*.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat. (2022). *RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023*.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat. (2023a). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024*.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat. (2023b). *RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2023-2028 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT*.

BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025*.

Sumber media online

Antara News. (2022). *Ketua DPRD Kulon Progo dorong pemda audit data kemiskinan*. <https://www.antaraneews.com/berita/2927549/ketua-dprd-kulon-progo-dorong-pemda-audit-data-kemiskinan>

Antara News. (2023). *Pemda Kulon Progo mendampingi 10 desa dengan kemiskinan ekstrem*. <https://jogja.antaraneews.com/berita/605499/pemkab-kulon-progo-mendampingi-10-desa-dengan-kemiskinan-ekstrem>

BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat. (2025). *Sinergi OPD Diperkuat, Rakor Bahas Strategi Tepat Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kobar*.

- <https://bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id/Artikel/sinergi-opd-diperkuat-rakor-bahas-strategi-tepat-sasaran-untuk-penanggulangan-kemiskinan-di-kobar>
- Bureau, U. S. C. (2022). *Poverty in United States : 2022*.
- Harian Jogja. (2024). *Pemkab Kulonprogo Diminta Lakukan Inovasi Penanganan Kemiskinan*.
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/04/27/514/1172603/pemkab-kulonprogo-diminta-lakukan-inovasi-penanganan-kemiskinan>
- Info PBun. (2022). *Pemkab Kobar Lakukan MoU Collaborative Governance dengan Perusahaan Besar Swasta*.
<https://kumparan.com/infopbun/pemkab-kobar-lakukan-mou-collaborative-governance-dengan-perusahaan-besar-swasta-1yqTdnmTKgS/full>
- kalteng.tribunnews.com. (2024). *Pj Bupati Kobar Sampaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Skala Prioritas*.
<https://kalteng.tribunnews.com/2024/10/22/pj-bupati-kobar-sampaikan-raperda-apbd-tahun-anggaran-2025-dengan-skala-prioritas>
- Kotawaringinnews. (2024). *DPRD Kobar Dukung Program Stunting dan Pengentasan Kemiskinan: Rudi Imam Gunawan Tegaskan Sinergi adalah Kunci*. <https://www.kotawaringinnews.co.id/dprd-kobar-dukung-program-stunting-dan-pengentasan-kemiskinan-rudi-imam-gunawan-tegaskan-sinergi-adalah-kunci/>
- Oxford, & UNDP. (2023). *Global Multidimensional Poverty Index 2023*.
- Prokom Kobar. (2021). *Pimpin Raker Perencanaan Pembangunan Desa, Bupati Hj Nurhidayah: Prioritaskan Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/35696/pimpin-raker-perencanaan-pembangunan-desa-bupati-hj-nurhidayah-prioritaskan->

upaya-penanggulangan-kemiskinan

Radar Sampit. (2024a). *DPRD Kobar Dorong Capaian Target Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. <https://radarsampit.jawapos.com/radar-utama/2345032015/dprd-kobar-dorong-capaian-target-pengentasan-kemiskinan-masyarakat>

Radar Sampit. (2024b). *Pemkab Kobar Realisasikan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*. <https://www.radarsampit.com/berita/pemkab-kobar-realisasikan-bantuan-sosial-perbaikan-rumah-tidak-layak-huni.html>

rri.co.id. (2024). *Siwi Komitmen Penuh Turunkan Kemiskinan Kulon Progo*. <https://www.rri.co.id/daerah/709552/siwi-komitmen-penuh-turunkan-kemiskinan-kulon-progo>

Setda Kalteng. (2023). *Gubernur Lantik Penjabat Bupati Barsel dan Kobar*. <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/gubernur-lantik-penjabat-bupati-barsel-dan-kobar>

suarapasar.com. (2024). *DPRD Minta Penjelasan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Kulon Progo*. <https://www.suarapasar.com/dprd-minta-penjelasan-penanganan-kemiskinan-ekstrem-di-kulon-progo/>

UGM. (2024). *Sasar 11 Kelurahan, UGM Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Kulon Progo*. <https://ugm.ac.id/id/berita/sasar-11-kelurahan-ugm-berhasil-turunkan-angka-kemiskinan-ekstrem-di-kulon-progo/>

World Bank. (2022). *Four Decades of Poverty Reduction in China*.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, <https://mip.apmd.ac.id>

AKREDITASI BAIK SEKALI SK. No. 4953/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023

Nomor : 360/S-2/VI/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dalam rangka penyelesaian studi di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk melakukan penelitian guna mendukung penyusunan tesis yang berjudul **STUDI KOMPARASI STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah**

Adapun Dosen Pembimbing Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. dan identitas mahasiswa tersebut adalah,

nama	: Indra Wibowo
nomor mahasiswa	: 23610055
jenjang	: Magister
program studi	: Ilmu Pemerintahan
tahun akademik	: 2024/2025
waktu observasi	: 4 bulan

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan serta kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

24 Juni 2024

Direktur


Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM,
NIP 170 230 210



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta, Telp (0274) 561971, Fax. (0274) 515989, <https://mip.apmd.ac.id>

AKREDITASI BAIK SEKALI SK. No. 4953/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023

Nomor : 360/S-2/VI/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dalam rangka penyelesaian studi di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan kesempatan bagi mahasiswa kami untuk melakukan penelitian guna mendukung penyusunan tesis yang berjudul **STUDI KOMPARASI STRATEGI PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI INDONESIA** (*Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah*)

Adapun Dosen Pembimbing Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. dan identitas mahasiswa tersebut adalah,

nama	: Indra Wibowo
nomor mahasiswa	: 23610055
jenjang	: Magister
program studi	: Ilmu Pemerintahan
tahun akademik	: 2024/2025
waktu observasi	: 4 bulan

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan serta kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

24 Juni 2024
Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

Nomor : 070/19/KESBANGPOL-IV/IV/2024

- a. Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.
- b. Menimbang : Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Nomor : 360/S-2/VI/2024 tanggal 24 juni 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **Indra Wibowo**
2. NIM/NPP : 23610055
3. Alamat : Jln. P.R.A. Kusuma Yudha No. 66 Kel. Raja Kec. Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Tujuan Penelitian : Studi Akhir Program Magister Ilmu Pemerintahan
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
6. Waktu Penelitian : Juni s.d September 2024
7. Bidang Penelitian : Pemerintahan
8. Judul Penelitian : Studi Komparasi Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia (Studi kasus Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah)
9. Penanggung Jawab : Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
10. Lembaga : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
11. Hal Perlu Perhatian : Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat wajib dipatuhi oleh Peneliti.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Yth. Ka. Bappedalitbang
Kadinkes
Aggr. Subantu Pross
Penelitian
12/7/24*

Diterbitkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Drs. EDIE FAGANTI
NIP. 19650802 199403 1 010

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik